

6. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
7. Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

B. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur

1. Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak;
2. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;
3. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan Provinsi;
4. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
5. Normalisasi Sungai dari seluruh sungai yang ada di Banten;
6. Normalisasi Situ untuk pengembalian fungsi Situ;
7. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;
8. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;
9. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan lokal;
10. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;
11. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
12. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;
13. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan dan Irigasi).

C. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK;
2. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 SMA, SMK;

3. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 Guru SMA, SMK;
4. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK;
5. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;
6. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama serta membentuk karakter yang Berakhlaqul Karimah.

D. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;
2. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.

E. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
2. Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;

Dalam menjalankan visi, misi dan program ini, juga melaksanakan amanat undang-undang yang berbasis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Tabel 5.2

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Banten (Sebelum Perubahan)

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat		2,8	3.1	3.2	-	-	-	-
1.1			Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	CC	B	BB	-	-	-	-
1.2			Pelayanan Publik Yang berkualitas	Capaian Pelayanan Publik	100	100	100	-	-	-	-
1.3			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	100	100	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1.4			Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-
1.5			Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Capaian Maturitas SPIP	2,00	2	3	-	-	-	-
1.6			Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	20,00	42.1	61.83	-	-	-	-
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,08	88.08	89	-	-	-	-
1.7			Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	60,00	65	70	-	-	-	-
1.8			Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	50	100	100	-	-	-	-
1.9			Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	10	10	15	-	-	-	-
1.1			Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	10	10	15	-	-	-	-
1.11			Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio terhadap pendapatan daerah (%)	62.89	59.3	60.62	-	-	-	-
1.12			Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	70,00	75	75	-	-	-	-
1.13			Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	68,46	70	74	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
			kondusif untuk mendukung NKRI								
				Angka Kriminalitas	5.002,00	4800	4500	-	-	-	-
1.14			Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	133,00	133	125	-	-	-	-
1.15			Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	50	80	80	-	-	-	-
2	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah		50	100	100	-	-	-	-
2.1			Infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas	Tingkat Kemantapan Jalan	78,98	87.43	89	-	-	-	-
2.2			Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta Ketersediaan Air Baku	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	15,51	20.89	26.27	-	-	-	-
				Pemenuhan tingkat layanan irigasi	15.118,50	15332.98	16721.78	-	-	-	-
2.3			Perencanaan dan Penataan ruang yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	80	82.5	85	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
2.4			Tersedianya Perumahan dan Pemukiman yang layak. Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh	375.29	114.6	203.2	-	-	-	-
				Persentase Rumah Layak Huni	82.86	84.02	85.18	-	-	-	-
				cakupan pelayanan pengelolaan sampah	0	0	20	-	-	-	-
2.5			Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30	40	50	-	-	-	-
2.6			Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	0	10	20	-	-	-	-
2.7			kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	0	10	20	-	-	-	-
3	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing	Rata rata lama sekolah		8.37	8.47	8.7	-	-	-	-
3.1			Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Rata rata lama sekolah	8.37	8.47	8.7	-	-	-	-
				Harapan lama sekolah	12.7	13	13.5	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
3.2			Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	0	100	100	-	-	-	-
3.3			Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0	10	20	-	-	-	-
				Indeks Pembangunan Olahraga	0	10	20	-	-	-	-
3.4			Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	Indeks pembangunan gender (IPD)	91.39	91.67	91.95	-	-	-	-
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.74	69.54	70.34	-	-	-	-
3.5			Minat Baca Masyarakat yang meningkat	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	25.1	30	35	-	-	-	-
3.6			Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	70	80	85	-	-	-	-
4	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup		69.46	69.76	70.06	-	-	-	-
4.1			Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	32	31	30	-	-	-	-
				Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	308	304	300	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
4.2			Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	75	90	100	-	-	-	-
4.3			Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76	70.06	-	-	-	-
4.4			Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	Laju pertumbuhan penduduk	2.01	1.96	1.91	-	-	-	-
5	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	LPE		5.26	6	6.2	-	-	-	-
			TPT		8.92	8.45	8.2	-	-	-	-
			Angka Kemiskinan		5.42	5.13	5	-	-	-	-
			Daya beli / Inflasi		2.94	3.7	4.2	-	-	-	-
5.1			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Nilai Investasi	52.3	56.4	60.8	-	-	-	-
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	82.16	83.62	85.22	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
5.2			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	3.05	3.7	3.95	-	-	-	-
5.3			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	4	4	-	-	-	-
				LPE Sektor Perdagangan	3.82	4.9	5.4	-	-	-	-
5.4			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD	7,05	5,3	5,6	-	-	-	-
5.5			Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,48	4,55	4,67	-	-	-	-
5.6			Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	82.4	89.2	90.6	-	-	-	-
5.7			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2.84	2.89	2.94	-	-	-	-
5.8			Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	NA	6	6	-	-	-	-
5.9			Usaha Kecil yang berdaya	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	NA	1	1	-	-	-	-
5.1			Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	8.24	4.49	3.89	-	-	-	-
				Index Gini	0,39	0.39	0.39	-	-	-	-
5.11			Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	95.2	97	98	-	-	-	-

NO	MISI	TUJUAN	RPJMD		Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2018	2019	2020	2021	2022	
5.12			Pengendalian, pengawasan dan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	12	12.5	13	-	-	-	-
5.13			Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri	Persentase Desa Mandiri	14	16.4	18.8	-	-	-	-
5.14			Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58.06	59.01	60.01	-	-	-	-
5.15			Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67	44.17	44.67	-	-	-	-
5.16			Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6	31.21	31.71	-	-	-	-

Tabel 5.3
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Banten (Setelah Perubahan)

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	SEKRETARIS DAERAH	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A		
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	OPD	
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	BADAN PENGHUBUNG	
			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DPRD	
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	2	3	3	4	4	4	INSPEKTORAT
				Capaian Kapabilitas APIP	Level	0	0	0	3	3	4	4	
			Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65	70	75	80	80	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	
			Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	50	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	%	0.00	0.00	0.00	70	75	80	80	
			Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10	10	15	20	25	30	30	BADAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	70	75	80	85	90	95	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	62.89	59.30	60.62	61.91	63.19	64.44	64.44	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75	75	80	80	85	85	SATPOL PP
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	68,46	70	74	76	78	80	80	BADAN KESBANGPOL
				Penanganan konflik masyarakat	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133	133	125	120	115	110	110	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO PEMERINTAHAN
				Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO HUKUM
			Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ORGANISASI
			Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO UMUM
			Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa	%	0.00	0.00	0.00	41.67	33.33	25	25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				tertinggal dan berkembang yang diberdayakan									
			Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08	89	89.55	90	90	90	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral	Nilai	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	70	80	85	90	95	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah		Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	50	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	50	60	70	80	85	90	90	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74.45	0.00	0.00	100	100	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83.00	0.00	0.00	93.5	95.9	100	100	
			Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	15,51	0.00	0.00	32.65	37.09	42.42	42.42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Luasan layanan irigasi	Ha	15.118,5	0.00	0.00	18.110,58	19.387,46	20.888,19	20.888,19	
				Persentase penyediaan prasarana air baku	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	0.00	0.00	87.5	90	92.5	92.5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375.29	114.6	203.2	274.6	333.3	375.29	375.29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase Rumah Layak Huni	%	82.86	84.02	85.18	86.34	87.5	88.66	88.66	
				cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	
			Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	0.00	0.00	0.00	75	88	100	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0.00	10	20	20	20	20	90	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	%	95.2	97	98	99	100	100	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	0.00	2.6	3	3.6	3.9	4	4	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	0.00	14.29	28.57	57.14	76.19	100.00	100.00	BIRO BINA INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
3.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	%	70.96	71,77	72,20	72,75	73,21	73,68	73,68	SERETARIS DAERAH
				Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,390	0,390	0,390	0,370	0,365	0,360	0,360	
				Kemiskinan	%	5.42	5,13	5,00	5,12	5,06	5,00	5,00	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.92	8,45	8,20	8,19	8,03	7,84	7,84	
			Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	12.7	13	13.5	14	14.5	15	15	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Rata rata lama sekolah	Tahun	8.37	8.47	8.7	8.9	9.1	9.3	9.3	
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91.39	91.67	91.95	92.23	92.51	92.79	92.79	
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71.13	72.9	74.67	76.45	78.22	80	80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57.21	58.77	60.33	61.88	63.44	65	65	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	0.00	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0.00	10	20	30	40	45	45	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0.00	10	20	30	40	45	45	
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.74	69.54	70.34	71.14	71.94	72.74	72.74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	0.00	0.00	0.00	72.73	77.27	100	100	
			Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	25.1	0.0	0.0	40	45	50	50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS SOSIAL
			Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	8.24	4.49	3.89	3.3	2.68	2.08	2.08	
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58.06	59.01	60.01	5.69	5.72	5.74	5.74	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	%	69.46	69.76	70.06	70.36	70.66	70.96	70.96	SEKRETARIS DAERAH

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	308	304	300	290	290	285	285	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	32	31	30	29	28	26	26	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	247	247	242	237	232	227	227	DINAS KESEHATAN
				Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jumlah	1,149	1,149	1,144	1,139.	1,134	1,129	1,129	
			Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75	90	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	0	60	65	70	75	80	80	DINAS KESEHATAN / RSUD
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	0	60	65	65	70	75	75	
			Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.4	0.00	0.00	2.21	2.23	2.26	2.26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIS DAERAH
5.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.26	6	6.2	6.4	6.7	7	7	
				Tingkat Inflasi	%	2.94	3.7	4.2	4	4	4	4	
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	0.00	0.00	0.00	6	6.2	6.4	6.4	ASISTEN PEMBANGUNAN

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	0.00	0.00	0.00	2.8	2.9	3	3	DAN PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	0.00	0.00	0.00	7	6	5	5	
			Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	0.00	0.00	0.00	49.00	51.30	53.90	53.90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82.16	85.09	85.22	85.47	85.72	85.97	85.97	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	3.05	3.7	3.95	4.2	4.45	4.7	4.7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	3.82	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	6.9	
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	7,05	0	0	5,8	6	6,2	6.2	DINAS PERTANIAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,48	0.00	0.00	4,72	4,80	4,93	4,93	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82.4	89.2	90.6	83.5	84.5	85.00	85.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	2.84	0.00	0.00	2.99	3.04	3.09	3.09	DINAS PARIWISATA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	NA	0.00	0.00	6	6	6	18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	NA	0.00	0.00	1	1	1	3	
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43.67	44.17	44.67	50.87	51.83	52.79	52.79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30.6	31.21	31.71	32.21	32.71	33.21	33.21	
			Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0.79	0.00	0.00	0.65	0.63	0.60	0.60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	0.00	0.00	0.00	43.75	45	46.29	46.29	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Tabel 5.5
Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional

RPJMD PROVINSI BANTEN 2017 -2022	RPJM NASIONAL 2015 -2019
VISI BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
MISI	MISI
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

BAB IX

PENUTUP

9.1. PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menjadi pedoman penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 (tahun transisi) atau tahun pertama dibawah kepemimpinan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2017-2022. Penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mengacu pada RKP Tahun 2018.

Selanjutnya ditetapkan **Pedoman Transisi** pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
2. Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Gubernur masa bakti 2017-2022 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2023 yang memuat penetapan indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2022-2027.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional 2015-2019.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 maka ditetapkan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berlaku dan berfungsi untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Gubernur Banten menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kepada masyarakat.
4. Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten.
6. Gubernur Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
7. Gubernur Banten berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
8. Penetapan dan perubahan indikator kinerja melalui Peraturan Gubernur dengan memperhatikan regulasi yang berlaku.
9. Partisipasi masyarakat Provinsi Banten dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MINTONO, SH., M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem manajemen atau implementasi teknologi.

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun 2018-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.1 STRATEGI

6.1.1 Strategi pada RPJPD Provinsi Banten 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 tahap akselerasi I berakhir dan dilanjutkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2018-2022 (Tahap akselerasi II). Dalam menyelaraskan perencanaan daerah tersebut merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005-2025 yang setiap tahapannya memiliki strategi dengan prioritas pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJPD 2005-2025 PROVINSI BANTEN

	RPJMD Ke-1 (2005-2007)	RPJMD Ke-2 (2008-20012)	RPJMD Ke-3 (2013-2017)	RPJMD Ke-4 (2018-2022)	RPJMD Ke-5 (2023-2025)
	Tahap Revitalisasi-I	Tahap Revitalisasi-II	Tahap Akselerasi-I	Tahap Akselerasi-II	Tahap Modernisasi
1	Peningkatan Cakupan Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;	1 .Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;	1 Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	1 Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	1 Peningkatan Kesejahteraan Sosial ;
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;	2 Penanggulangan Kemiskinan,	2 Pemantapan Kualitas Sumber	2 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya	2 Pemantapan Daya Saing Sumber Daya
3	PeningkatanPertumbu han Perekonomian;	3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;	3 Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Perekonomian;	3 Peningkatan Daya Saing Perekonomian;	3 Pemantapan Daya Saing Perekonomian;

	RPJMD Ke-1 (2005-2007)	RPJMD Ke-2 (2008-20012)	RPJMD Ke-3 (2013-2017)	RPJMD Ke-4 (2018-2022)	RPJMD Ke-5 (2023-2025)
	Tahap Revitalisasi-I	Tahap Revitalisasi-II	Tahap Akselerasi-I	Tahap Akselerasi-II	Tahap Modernisasi
4	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	4 Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;	4 Pemantapan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Wilayah;	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana wilayah;	4 Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
5	Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	5 Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	5 Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan	5 Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;	5 Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
7	Perencanaan dan Penataan Pelabuhan-Pelabuhan Lokal, Nasional, dan	7 Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis;	7 Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.	7 Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat	7 Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*.

Sebagaimana tabel 6.2 Uraian Tujuan, Sasaran, dan Strategi dan sebagaimana tabel 6.3 Uraian Arah Kebijakan setiap tahun (terlampir)

Tabel 6.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Banten 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.01 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.01 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
	1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan	1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan
	1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	1.03 Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan	1.04 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan
	1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP	1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	1.05 Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
	1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	1.06 Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi
	1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian	1.07 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan
	1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur	1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur	1.08 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur
	1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur	1.09 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	1.09 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur
			1.10 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.10 Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Optimal	1.10 Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah	1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi
	1.1.11 Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	1.11 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	1.12 Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM
	1.1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	1.13 Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
		1.13 Meningkatkan keamanan dan stabiitas daerah	1.14 Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
	1.1.13 Meningkatkan Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	1.14 Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	1.15 Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
	1.1.14 Meningkatkan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	1.15 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1.16 Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan
	1.1.15 Meningkatkan Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	1.16 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	1.1.16 Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1.18 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat
	1.1.17 Meningkatkan Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif	1.18 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	1.19 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi
	1.1.18 Meningkatkan Pelayanan Umum yang Prima	1.19 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah	1.20 Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima
	1.1.19 Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.20 Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	1.21 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
	1.1.20 Meningkatkan Pelayanan dan fasilitas Pimpinan	1.21 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	1.22 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.21 Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.22 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.23 Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan
	1.1.22 Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	1.23 Meningkatkan Aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	1.24 Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi
	1.1.23 Meningkatkan Administrasi Pembangunan Daerah	1.24 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan	1.25 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan
	1.1.24 Meningkatkan Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	1.25 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	1.26 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi
	1.1.25 Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	1.26 Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	1.27 peningkatkan data dan informasi perencanaan pembangunan
	1.1.26 Meningkatkan ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	1.27 Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektoral Secara Elektronik	1.28 Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektoral
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur			
2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	2.1.1 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah
	2.1.2 Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	2.02 Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
		2.03 Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi	2.03 Peningkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi
	2.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	2.04 Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	2.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
		2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.06 Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi	2.06 Pembangunan Bendung, empang dan situ
			2.07 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
	2.1.4 Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.07 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	2.08 Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi
	2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	2.08 Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman	2.09 penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
		2.09 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu	2.10 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
		2.10 Meningkatkan pengeloan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	2.11 Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		2.11 Meningkatkan pengeloan sarana dan prasarana persampahan	2.12 Pembangunan TPST Regional
	2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	2.12 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi	2.13 Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi
	2.1.7 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	2.13 meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	2.14 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
		2.14 Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	2.15 Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan
		2.15 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	2.16 Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
	2.1.8 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	2.16 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	2.17 Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
	2.1.9 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	2.17 Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT	2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan
	2.1.10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	2.18 Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi
	2.1.11 Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	2.19 Meningkatkan kualitas kebijakan Infrastruktur bagi masyarakat	2.20 Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktur bagi masyarakat

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas								
3.1	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	3.1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	
		3.1.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	3.02	Mengembangkan jiwa kewirausahaan	3.02	Menciptakan dan mengembangkan wirausaha	
		3.1.3	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	3.03	Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	3.03	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja	
		3.1.4	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	3.04	Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan	3.04	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	
		3.1.5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	3.05	Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau	3.05	Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	
						3.06	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah	
		3.1.6	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	3.07	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	3.07	Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten	
		3.1.7	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	3.08	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	3.08	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	
				3.09	Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	3.09	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	
			3.1.8	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	3.10	Meningkatkan pengarusutaaman gender pada semua sektor	3.10	Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga
			3.1.9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	3.11	Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3.11	Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
	3.1.10	Meningkatnya Budaya Literasi	3.12	Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah	3.12	Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah		
	3.1.11	Menurunnya PMKS	3.13	meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PMKS	3.13	Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial,		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan
	3.1.12 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	3.14 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan
			3.15 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja
Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas			
4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	4.1.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan	4.01 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	4.01 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	4.02 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	4.02 Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehata bagi Masyarakat
			4.03 Peningkatan Sarana Prasaran Kesehatan
			4.04 Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit
	4.1.3 Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	4.03 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat	4.05 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit
	4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	4.04 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan	4.06 Peningkatkan Kelas Pelayanan Rumah Sakit
	4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk	4.07 Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	5.1.1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan
	5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	5.02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemanfaatan Layanan Keuangan	5.02 Peningkatan Aksesibilitas dan pemanfaatn Layanan Keuangan kepada Masyarakat
	5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah	5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitif berbasis Potensi Daerah	5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetitif melalui Optimalisasi Potensi Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	5.04 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	5.04 Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ramah Lingkungan
	5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	5.05 Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi	5.05 Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku
		5.06 Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat	5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
	5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	5.07 Mengembangkan Sektor Industri	5.07 Pengembangan perwilayahan Industri dan Konektifitas antara industri kecil, menengah dan besar
			5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri
			5.09 Pengembangan kualitas produk industri
	5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	5.08 Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan strategis	5.10 Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
			5.11 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar
		5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah	5.12 Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkatkan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten
		5.10 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen
	5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	5.11 Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian	5.14 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
	5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan	5.15 Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	5.13 Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah	5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah
	5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	5.17 Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinasi wisata
			5.18 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			5.19 Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata
			5.20 Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
	5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi	5.15 meningkatkan pengawasan, pemberdayaan, kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi informasi	5.21 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan
			5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi
	5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	5.16 Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha	5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM
	5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	5.17 Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup	5.24 Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
	5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai	5.25 Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai
		5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
	5.1.16 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	5.20 Meningkatkan akses perekonomian masyarakat	5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat
	5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	5.21 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	5.28 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	5.22 meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	5.29 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
		5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan	5.30 memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Provinsi Banten 2017 - 2020

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan
Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi	Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD
Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Pembangunan Bendung, empang dan situ	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan Bendung, empang dan situ	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Pembangunan Bendung, empang dan situ	Peningkatan Capaian Leveling APIP	Pembangunan Bendung, empang dan situ
Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan TPST Regional	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya manusia	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi	Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
Pembangunan TPST Regional	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Peningkatan Kualitas Analisis kebutuhan Penelitian	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Peningkatan Kualitas Pelayanan data dan Informasi berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi
penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Pembangunan TPST Regional	Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan Pemanfaatan teknologi Informasi	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Peningkatan koordinasi penanggulangan kebencanaan	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku
	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	Peningkatan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	Peningkatan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	Pengembangan perwilayahan Industri melalui pembentukan sentra industri Kecil pada kawasan dan luar kawasan industri
	memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk tertib administrasi Kependudukan	Pengembangan kualitas produk industri kecil
		Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga	Peningkatan Capaian Nilai SAKIP	Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
		Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi	Peningkatan Capaian Maturasi SPIP	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
		Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Peningkatan Capaian Opini Laporan Keuangan	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
		Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat
		Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif
		Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Revitalisasi museum, pengembangan taman budaya	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
		Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan
		Pengembangan kualitas produk industri kecil	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis	Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas
		Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
		Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi	Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai
		Peningkatan Ketersediaan Pangan yang di dukung oleh Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah	Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
		Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	
		Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	
		Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	
		Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	
		Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	
		memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	
			Pengembangan kualitas produk industri kecil	
			Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	
			Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			dan bahan baku industri (agroindustri)	
			Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	
			Peningkatan Ketersediaan Pangan yang di dukung oleh Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah	
			Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	
			Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	
			Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	
			Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif	
			Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	
			Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan	
			Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan	
			Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba	
			Peningkatkan Penataan, pembinaan dan pengembangan Desa melalui Penataan dan Pembinaan Desa Adat serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa	
			Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan,	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas	
			Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	
			memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	
			Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	
			Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	

6.2.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BUMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai institusi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Karakteristik BUMD meliputi:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah
- b. Badan usaha dimiliki oleh :
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 3) 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan aktivitas tersebut antara lain adalah:

- a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dengan kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan daerah dengan kepala daerah sebagai pemegang saham.
- d. Pengelolaan BUMD memedomani pada dua regulasi yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang berkaitan dengan sektor privat.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk. Pada saat penyelenggaraan Business Summit Meeting pada tahun 2014 disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2014 total BUMD di seluruh Indonesia mencapai 1700 dengan 20% (340) diantaranya dalam kondisi sehat dan memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian Amdanata dan Mansor (2016) menyebutkan bahwa rendahnya kinerja BUMD disebabkan karena banyak BUMD belum menerapkan prinsip Good Corporate Governance.

Salah satu Provinsi yang memiliki Potret keberhasilan dalam pengelolaan BUMD baik dalam pelayanan publik atau pun peningkatan PAD adalah provinsi DKI Jakarta. Jika Dibandingkan dengan provinsi tetangga tersebut, jumlah maupun kualitas BUMD yang dimiliki Provinsi Banten masih tertinggal. Klaster usaha BUMD yang dimiliki provinsi DKI Jakarta meliputi sembilan klaster usaha yakni Transportasi, Properti, Keuangan, Pariwisata, Infrastruktur, Kawasan Industri, Utilitas, Pangan, Perpasaran dan industri lainnya.

Keunggulan komparatif berupa ketersediaan potensi sumber daya alam maupun wilayah yang sangat strategis yang dimiliki Provinsi Banten, diversifikasi BUMD merupakan suatu peluang untuk bisa direalisasikan. Lahirnya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan acuan yang lebih jelas agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCC) sehingga keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD atau pun pelayanan publik sehingga dapat selaras dengan perwujudan visi misi Gubernur.

6.2.2 ARAH KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten Sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional Yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, Dan Pariwisata.

Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar yang terdiri atas :

- a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
- c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

- a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
- b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
- c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri, perkebunan dan pendidikan.

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang, kebijakan pengembangan pola ruang, serta kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten.

6.2.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten
Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten dan lintas kabupaten/kota;
 - b. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.

2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:

- a. Strategi peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
 - 2) Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya;
 - 3) Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
 - 4) Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
- b. Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara;
 - 4) Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
 - 5) Mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan internasional bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten;

- 6) Mewujudkan jembatan selat sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung jawa – sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan pulau jawa di wilayah Provinsi Banten.
- c. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - 2) Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
 - 3) Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
 - 4) Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - 6) Mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
 - 7) Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;
 - 8) Mewujudkan pemanfaatan kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten

Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten meliputi sistem perkotaan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan di Provinsi Banten didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan.

Rencana sistem perkotaan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari :
 - Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
 - Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
 - Kawasan Perkotaan Cilegon.
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
- 3) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja; dan
- 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas dan Kawasan Cikeuruh Wetan.

b. Rencana sistem prasarana utama

Rencana sistem prasarana utama Provinsi Banten terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air

1) Sistem jaringan transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri dari pengembangan sistem jaringan transportasi darat, pengembangan sistem jaringan transportasi laut dan pengembangan sistem jaringan transportasi udara.

Adapun rencana pengembangan sistem transportasi darat di provinsi Banten adalah

a) Pengembangan jaringan jalan nasional meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer dan jalan tol melalui :

(1) Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Daerah meliputi : Jln. Raya Merak (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Cilegon), Jln. Raya Serang (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Serang), Jln. Letnan Jidun (Serang), Jln. Tb. Suwandi (Serang), Jln. Abdul Hadi (Serang), Jln Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang), Jln. Sudirman (Serang), Jln. Raya Serang (Tangerang), Jln. Otista (Tangerang), Jln. Ks. Tubun (Tangerang), Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts. DKI)

(2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Daerah meliputi Jln. Raya Anyer (Cilegon), Pasauran – Labuhan, Jl. A. Yani (Labuhan), Labuhan - Sp. Labuhan, Simp. Labuhan – Saketi, Cigadung – Cipacung Jln. By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta Rangkasbitung), Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung), Sp. Labuan – Cibaliung, Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen, Muara Binuangeun – Simpang, Simpang – Bayah, Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar, Jln. Raya Pandeglang (Serang) Jln. Raya Serang (Pandeglang) Bts.DKI Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor), Jln. Rambutan (Ciputat), Jln. Otista (Ciputat) Jln. Akses Tol Merak, Cikande – Rangkasbitung, Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung), Cibaliung - Sumur, Citereup - Tanjung Lesung, Serdang - Bojonegara – Merak.

(3) Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Daerah meliputi:

- Jakarta – Tangerang dan Jakarta – Tangerang II Elevated;

- Prof. Dr. Sedyatmo dan Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;
 - Pondok Aren – Serpong;
 - Pondok Aren – Ulujami;
 - Serpong – Balaraja;
 - Semanan – Sunter;
 - Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper;
 - Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong - Cinere
 - Bojong Gede – Balaraja.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi:
- Tangerang – Merak;
 - Cilegon – Bojonegara;
 - Serang – Panimbang;
 - Semanan – Rajeg – Balaraja; dan
 - Kamal – Teluk Naga – Rajeg.
- (5) Rencana Pengembangan jalan nasional Bayah – Cibarenok – Batas Provinsi Jawa Barat, Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta, Serang – Pandeglang, Pangarangan – Bayah – batas Provinsi Jawa Barat, Simpang 3 (tiga) Cilegon, Simpang 3 (tiga) Labuan, Simpang 3 (tiga) Tarogong;; Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – batas Provinsi Jawa Barat.
- (6) Rencana Pembangunan jalan nasional Cikande - Rangkasbitung, Jalan Cikande – Serang – Cilegon, Cipanas - Warung banten- Bayah, Jalan Tanjung Lesung - Sumur dan jalan lintas selatan Banten
- (7) Pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang berlokasi di:
- Cikande Kabupaten Serang; dan
 - Cimanuk Kabupaten Pandeglang.

- (8) Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh Wilayah Provinsi Banten;
 - (9) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan
 - (10) Rencana pembangunan jalan prospektif di wilayah Provinsi Banten
- b) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi:
- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi meliputi : Pakupatan – Palima, Palima - Pasar Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak – Anyer, Kramatwatu – Tonjong, Ciruas – Pontang, Parigi – Sukamanah, Ciomas – Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama – Pontang, Pontang – Kronjo, Kronjo – Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga – Dadap, Citeras – Tigaraksa, Tigaraksa – Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl.Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra (Ciputat), Jl. Raya Jombang., Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman (Ciputat), Jl. Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya, Jl.

Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung Lesung - Sumur, Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi - Ciandur, Picung - Munjul, Munjul - Panimbang, Cisekeut - Sobang - Tela, Munjul-Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja - Koleang, Saketi - Malingping - Simpang, Cipanas - Warung Banten, Bayah - Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas.

- (2) Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur - Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta;
- (4) Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
- (5) Jaringan jalan provinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW;
- (6) Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.; dan
- (7) Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

c) Pengembangan terminal

(1) Dukungan untuk Pengembangan terminal penumpang tipe A dalam wilayah provinsi meliputi: Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A meliputi:

- Terminal Merak yaitu Kawasan Terminal Terpadu Merak - Kota Cilegon;
- Terminal Pakupatan di Kota Serang;
- Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;
- Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang;
- Terminal Kadu Agung Mandala/Mandala di Kabupaten Lebak;
- Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;
- Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;
- Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang; dan
- Terminal Malingping di Kabupaten Lebak.

(2) Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A, meliputi:

- Terminal Cikande di Kabupaten Serang; dan
- Terminal Cikupa di Kabupaten Tangerang.

Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi meliputi:

- Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang;
- Terminal Bayah di Kabupaten Lebak;
- Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan;
- Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang;
- Terminal Ciledug di Kota Tangerang;
- Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon; dan
- Terminal Tanara di Kabupaten Serang.

(3) Rencana pembangunan terminal tipe B di Palima Kota Serang;

d) Pengembangan jaringan kereta api

Dukungan Pengembangan jaringan kereta api terdiri dari jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, serta stasiun kereta api. Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Banten meliputi:

- (1) Pengembangan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama yaitu pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas:
 - Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara;
 - Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta;
 - Serang – Cikande – Cikupa – Serpong;
 - Manggarai – Bandara Soekarno Hatta;
 - Bandara Soekarno Hatta – Pluit – Kota; dan
 - Rencana pembangunan jalur kereta api Bojonegara – Pantura – Tanjung Priuk;
- (2) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada Lintas Parung Panjang – Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang; Lintas Serang – sepadan tol – Balaraja, Lintas Balaraja – Jakarta – Cikarang;
- (3) Pengembangan angkutan perkotaan terutama pada Lintas Tangerang – Duri, dan Lintas Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang;
- (4) Pengembangan jalur ganda kereta api Jakarta – Kota Tangerang;
- (5) Pengembangan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang – Cilegon, Tanah Abang – Cigading dan jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan industri;
- (6) Pengembangan stasiun kereta api terpadu pada kawasan Terminal Merak, kawasan Bojonegara, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan

Bandar Udara Banten Selatan, dan Kawasan Bumi Serpong Damai;

- (7) Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Maja – Rangkasbitung – Merak;
- (8) Pembangunan lintas baru Cilegon – Anyer Kidul – Labuan – Panimbang;
- (9) Pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota yaitu Kereta Api Exprss SHIA jalur Soekarno Hatta-Sudirman;
- (10) Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung;
- (11) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta;
- (12) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang, dan Lintas Tangerang – Duri;
- (13) Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi;
- (14) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk Stasiun Merak di Kota Cilegon, Stasiun Krenceng, di Kota Cilegon, Stasiun Serang di Kota Serang, Stasiun Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Stasiun Pasar Anyar di Kota Tangerang, Stasiun Serpong di Kota Tangerang Selatan dan Stasiun Maja di Kabupaten Lebak;
- (15) Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (16) Pengaktifan kembali jalur kereta api lintas Ciwandan – Anyer Kidul, Rangkasbitung – Saketi – Labuan, Saketi – Malingping – Bayah;
 - (17) Perbaikan jaringan kereta api Rangkasbitung – Saketi – Malingping – Bayah dan jaringan kereta api Saketi – Labuan;
 - (18) Rencana Pengembangan Jalur KA lintasan Panimbang – Cibaliung – Malingping;
 - (19) Rencana pembangunan jalur KA Merak – Bandara Soekarno Hatta;
 - (20) Rencana pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
 - (21) Pengembangan angkutan massal terpadu berbasis rel Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batuceper-Serpong;
 - (22) Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang;
 - (23) Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
 - (24) Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD di seluruh Provinsi Banten;
 - (25) Rencana pengembangan angkutan massal berbasis rel dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta; dan
 - (26) Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel di seluruh Provinsi Banten.
- e) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Banten meliputi :
- (1) Rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu:

- Cituis – Kepulauan Seribu, Tanjungkait – Kepulauan Seribu, Tanjungpasir – Kepulauan Seribu, Dadap – Kepulauan Seribu;
 - Karangantu – Pulau Tunda, Grenjang – Pulau Panjang;
 - Sumur – Pulau Panaitan, Muarabinuangeun – Pulau Deli;
 - Labuan – Pulau Sangiang; dan
 - Merak – Kepulauan Anak Gunung Krakatau.
- (2) Rencana Pembangunan/Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak;
 - (3) Rencana Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai Pelabuhan Kelas I;
 - (4) Rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri sebagai Pelabuhan Kelas I;
 - (5) Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
 - (6) Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
 - (7) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - (8) Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan atau terisolir
 - (9) Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan yang meliputi : Pelabuhan Panimbang, Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande, Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan.
- f) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut
- Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut di Provinsi Banten meliputi:

- (1) Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Banten/Ciwandan di Kota Cilegon;
- (2) Rencana Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Peti Kemas Bojonegara di Kabupaten Serang;
- (3) Rencana Pengembangan Pelabuhan Merak Mas untuk dikembangkan menjadi pelabuhan utama;
- (4) Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon;
- (5) Rencana Pengembangan Pelabuhan Karangantu sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul;
- (6) Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu Pelabuhan Anyer Lor dan Pelabuhan Labuan.
- (7) Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal antara lain Pelabuhan Bayah, Muarabinuang, Panimbang, Genyang-Puloampel, Pasauran, Pulopanjang-Puloampel, Tanjung Leneng, Terate, Pulotunda-Tirtayasa, Lontar-Pontang, Muara Dadap;
- (8) Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo;
- (9) Rencana pengembangan Pelabuhan Cigading sebagai Terminal Umum Multipurpose KBS Cigading dan sebagai pelabuhan pengumpul di Kota Cilegon;
- (10) Rencana Pengembangan terminal khusus di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan;

- (11) Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir;
 - (12) Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.
- 2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi
- Rencana pengembangan sistem jaringan energi di Provinsi Banten meliputi :
- a) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik;
- (1) Rencana Pengembangan dan Pembangunan PLTU meliputi :
 - PLTU Labuan 1-2 di Kabupaten Pandeglang
 - PLTU Suralaya 1-8 di Kota Cilegon
 - PLTU Lontar 1-3 di Kabupaten Tangerang
 - PLTU Banten di Kabupaten Serang
 - PLTU Jawa-7 di Kramatwatu Kabupaten Serang
 - PLTU Lontar 4 di Kabupaten Tangerang
 - PLTU Jawa 9 di Kabupaten Serang
 - PLTU Jawa 6 atau indikasi lokasi di PLTU Suralaya 9,10
 - PLTU Jawa-5 di Kabupaten Tangerang.
 - (2) Rencana Pengembangan PLTM meliputi:
 - PLTM Cikotok di Kabupaten Lebak
 - PLTM Bojong Cisono di Kabupaten Lebak
 - PLTM Bulakan di Kabupaten Serang
 - PLTM Cisimeut di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cidanau di Kabupaten Serang
 - PLTM Cikidang di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cisungsang II di Kabupaten Lebak
 - PLTM Karang Ropong (Cibareno 1) di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cibareno di Kabupaten Lebak
 - PLTM Pasundan di Kabupaten Lebak

- PLTM Cisihih Mandiri di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cisihih Leutik di Kabupaten Lebak
 - PLTM Nagajaya di Kabupaten Lebak
- (3) Rencana Pengembangan PLTB meliputi :
- PLTB Pandeglang di Kabupaten Pandeglang
 - PLTB Lebak di kabupaten Lebak
- (4) Rencana Pengembangan PLTGU meliputi :
- PLTGU/MG Jawa-Bali 3 di Kabupaten Serang
 - PLTGU Jawa-4 Bojonegara di Kabupaten Serang
 - PLTGU Cilegon di Kota Cilegon
- (5) Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dalam melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil di PLTD Pulau Panjang dan PLTD Pulau Tunda;
- (6) Rencana Pengembangan PLTP Rawa Danau di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dan PLTP di G. Endut Kabupaten Lebak;
- (7) Rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan/EBT berupa Energi Hidro dan Biomassa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
- (8) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah Provinsi Banten
- (9) Rencana pembangunan tenaga listrik tenaga matahari di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
- (10) Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Provinsi Banten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik
- d) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Provinsi Banten meliputi :
 - (1) Rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - (2) Rencana pengembangan sistem distribusi jaringan tegangan rendah;
 - (3) Rencana pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi; dan
 - (4) Rencana pengembangan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa.
- 3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

Arahan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Banten, yaitu pengembangan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah, yang meliputi:

 - Rencana Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota; dan
 - Rencana Pengembangan transmisi penyiaran
 - Selain rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi juga dilakukan pengendalian pembangunan menara *Base Transceiver Station* untuk keterpaduan penggunaan tower bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung air baku dengan mengoptimalkan peruntukan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

 - a) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Banten, meliputi:
 - (1) Rencana pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;

- (2) Rencana pembangunan Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang dan Kota Serang;
- (3) Rencana pengembangan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang;
- (4) Rencana pengembangan Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Pandeglang;
- (5) Rencana pengembangan Bendung Ciliman di Kabupaten Pandeglang;
- (6) Rencana pengembangan Bendung Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
- (7) Rencana pengembangan Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;
- (8) Rencana pengembangan Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
- (9) Rencana pengembangan di Kota Tangerang;
- (10) Rencana pengembangan Bendung Cisadane Pintu Sepuluh di Kota Tangerang;
- (11) Rencana pemeliharaan CAT Rawa Danau di Serang-Pandeglang;
- (12) Rencana pemeliharaan CAT Serang-Tangerang;
- (13) Rencana pemeliharaan CAT Labuan di Kabupaten Pandeglang ;
- (14) Rencana pemeliharaan CAT Malingping di Kabupaten Lebak;
- (15) Rencana pemeliharaan CAT Jakarta di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang selatan;
- (16) Rencana pengendalian pemanfaatan ruang situ, waduk, danau, dan rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Serang sebagai kolam penyimpanan;
- (17) Rencana pengembangan Bendungan eks Teluk Lada di Kabupaten Pandeglang

- (18) Rencana pengembangan Bendungan Citeluk di Kabupaten Pandeglang
 - (19) Rencana pengembangan sumber air baku dari aliran sungai di Daerah dengan mempertimbangkan daya dukung sumberdaya air;
 - (20) Rencana pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Waduk Karian
 - (21) Rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Provinsi Banten; dan
 - (22) Rencana pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- b) Rencana pengembangan sistem Irigasi di Provinsi, yaitu :
- (1) Pengelolaan daerah irigasi di Daerah diarahkan untuk kebutuhan pertanian di wilayah Provinsi Banten;
 - (2) Rencana Pembangunan atau peningkatan Jaringan Irigasi yang dilintasi Sungai Cisadane Ciliman dan Cibaliung.
 - (3) Rencana Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
 - (4) Rehabilitasi Daerah Irigasi yang dilintasi Sungai Ciujung, Cisadane dan Cidurian.
 - (5) Rencana Pembangunan Irigasi yang dilintasi Sungai Ciseuket, Cikaduan, Cipatujah dan Caringin.
- c) Pengelolaan sumberdaya air lintas batas administrasi Daerah dan pemerintah kabupaten, meliputi
- (1) Wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi:
 - Cidanau – Ciujung – Cidurian; dan
 - Ciliwung – Cisadane;
 - (2) Wilayah sungai lintas kabupaten yang meliputi:
 - Ciliman – Cibungur; dan
 - Cibaliung – Cisawarna.

d) Rencana sistem prasarana lainnya

1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk, tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan, yang berada di:

- Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;
- Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
- Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III

Selain penyediaan ruang untuk TPAS dan/atau TPST regional juga mendukung percepatan proyek strategis nasional yaitu pembangunan infrastruktur energi asal sampah di seluruh kabupaten/kota;

2) Rencana pembangunan Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Tabel 6.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Provinsi Banten

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)							
I.1	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi : Perkotaan Kota Tangerang, Perkotaan Kota Tangerang Selatan, dan Perkotaan Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*
I.2	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan melalui peningkatan fungsi	d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kawasan Perkotaan Serang (Kota Serang dan Kabupaten Serang)	*	*	*	*	*
			Kawasan Perkotaan Cilegon	*	*	*	*	*
I.3	Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen f. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Kawasan Perkotaan Pandeglang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)							
II.1	Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen f. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Kawasan Perkotaan Pandeglang	*	*	*	*	*
			Kawasan Perkotaan Rangkasbitung	*	*	*	*	*
III	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)							
III.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi	Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil						
IV	Pengembangan jaringan jalan provinsi							

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang	Pakupatan – Palima, Palima - Pasang Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak – Anyer, Kramatwatu – Tonjong, Ciruas – Pontang, Parigi – Sukamanah, Ciomas – Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama – Pontang, Pontang – Kronjo, Kronjo – Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga – Dadap, Citeras – Tigaraksa, Tigaraksa – Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl.Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra (Ciputat), Jl. Raya Jombang., Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman (Ciputat), Jl.	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya, Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung Lesung – Sumur, Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi – Ciandur, Picung – Munjul, Munjul - Panimbang, Cisekeut - Sobang – Tela, Munjul-Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja – Koleang, Saketi - Malingping - Simpang , Cipanas - Warung Banten, Bayah – Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas					

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV.2	Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan		Kota Serang	*	*	*	*	*
IV.3	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Provinsi Banten			*	*	*
IV.4	Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten		Provinsi Banten			*	*	*
IV.5	Jaringan jalan provinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang	Provinsi Banten	*	*	*	*	
IV.6	Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IV.7	Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V	Pengembangan terminal							
V.1	Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan		Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang, Terminal Bayah di Kabupaten Lebak, Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang, Terminal				*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Ciledug di Kota Tangerang, Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon, Terminal Tanara di Kabupaten Serang					
V.2	Rencana pembangunan terminal tipe B		Palima Kota Serang				*	*
V.3	Rencana pembangunan terminal Pusat Distribusi Provinsi/Regional	a. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan b. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
VI	Pengembangan jaringan kereta api							
VI.1	Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi		Maja – Rangkasbitung – Merak		*	*	*	*
VI.2	Pembangunan lintas baru		Cilegon – Anyer Kidul – Labuan – Panimbang		*	*	*	*
VI.3	Pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota		Kereta Api Express SHIA jalur Soekarno Hatta – Sudirman		*	*	*	*
VI.4	Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api		Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung		*	*	*	*
VI.5	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api		Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta		*	*	*	*
VI.6	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan		Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang, dan Lintas Tangerang – Duri		*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VI.7	Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api		Provinsi Banten		*	*	*	*
VI.8	Pengaktifan kembali jalur kereta api		Ciwandan – Anyer Kidul, Rangkasbitung – Saketi – Labuan, Saketi – Malingping – Bayah		*	*	*	*
VI.9	Perbaikan jaringan kereta api		Rangkasbitung – Saketi – Malingping – Bayah dan jaringan kereta api Saketi – Labuan		*	*	*	*
VI.10	Rencana Pengembangan Jalur KA		Panimbang – Cibaliung – Malingping		*	*	*	*
VI.11	Rencana pembangunan jalur KA		Merak – Bandara Soekarno Hatta		*	*	*	*
VI.12	Pengembangan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel		Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batuceper-Serpong		*	*	*	*
VI.13	Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat		Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang		*	*	*	*
VI.14	Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel		Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan		*	*	*	*
VI.15	Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD		Provinsi Banten		*	*	*	*
VI.16	Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel		Provinsi Banten		*	*	*	*
VII	Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan							

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VII.1	Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.2	Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.3	Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.4	Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan atau terisolir		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.5	Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan		Pelabuhan Panimbang, Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande, Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan	*	*	*	*	*
VIII	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut							
VIII.1	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul		Pelabuhan Karangantu	*	*	*	*	*
VIII.2	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Anyer Lor, dan Pelabuhan Labuan	*	*	*	*	*
VIII.3	Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pelabuhan Bayah, Muarabinuangun, Panimbang, Genyang-Puloampel, Pasauran, Pulopanjang-Puloampel, Tanjung Leneng, Terate, Pulotunda-Tirtayasa, Lontar-Pontang, Muara Dadap	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VIII.4	Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Lokal		Cituis dan Kresek/Kronjo	*	*	*	*	*
VIII.5	Rencana Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan	a. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan b. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*
VIII.6	Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VIII.7	Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
IX	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara							
IX.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.2	Rencana pembangunan Bandara Udara		Panggarangan/Cihara dan Maja di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
X	Rencana pengembangan sistem jaringan energi							
X.1	Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik PLTU, PLTM, PLTGU, PLTD, PLTP, EBT, PLTSa dan PLTS	Program Pengembangan, Pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.2	Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi							

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.3	Rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga	Program Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan geologi, air tanah, mineral dan batubara	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi							
XI.1	Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi Banten					
XI.2	Pengembangan transmisi penyiaran		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI.3	Pengembangan , pengendalian dan pembangunan menara Base Transceiver Station untuk keterpaduan penggunaan tower bersama		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air							
XII.1	Rencana pengembangan dan Pembangunan sistem jaringan sumber daya air Bendungan, CAT, Situ, Waduk, Danau, Rawa dan Kolam Penyimpanan	a. Program Keciaptakaryaan b. Program Penataan Ruang	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII.2	Peningkatan Dan Pemeliharaan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI)		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII.3	Pembangunan atau peningkatan jaringan Irigasi		Provinsi Banten	*	*	*		
XII.4	Peningkatan dan Pemeliharaan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada		Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
XII.5	Rehabilitasi Daerah Irigasi		Ciujung, Cisdane, Cidurian	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XII.6	Pembangunan Irigasi		Ciseukeut, Cikaduan, Cipatujah, Caringin	*	*	*	*	*
XII.7	Pengelolaan Wilayah Sungai		WS Cidanau – Ciujung – Cidurian, WS Ciliwung – Cisadane, WS Ciliman – Cibungur, WS Cibaliung – Cisawarna	*	*	*	*	*
XIII	Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya							
XIII.1	Pengembangan TPST Regional	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Penataan Ruang	Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I, Kabupaten Serang untuk melayani WKP II, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III	*	*	*	*	*
XIII.2	Pembangunan infrastruktur energi asal sampah		di seluruh kabupaten/kota		*	*	*	*

6.2.4 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri dari kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

1. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten
 - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - 2) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - 4) Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
 - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:
 - 1) Peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
 - 2) Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - 3) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - 4) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten
 - a. Strategi pengembangan kawasan lindung
 - 1) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya* meliputi:
 - a) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b) Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;

- c) Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
 - d) Mewujudkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - e) Mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.
- 2) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup* meliputi:
- a) Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b) Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.
- 3) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup*, meliputi:
- a) Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b) Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c) Meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d) Mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f) Mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - g) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- 4) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang*, meliputi:
- a) Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggir sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
 - b) Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
 - c) Mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
 - d) Meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.
- b. Strategi pengembangan kawasan budidaya
- 1) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *peningkatan produktivitas kawasan budidaya*, meliputi:
- a) Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
 - b) Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;

- c) Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *Optimalisasi potensi sumberdaya alam dalam mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan*, meliputi:
- a) Meningkatkan aksesibilitas pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal
 - b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal perkotaan dan perdesaan
 - c) Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
- 3) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya*, meliputi:
- a) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
 - b) Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan dalam mendukung perwujudan ketahanan sumberdaya alam;
 - d) Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;

- e) Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.
- 4) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan*, meliputi:
 - a) Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b) Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
 - c) Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - d) Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

3. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten

a. Pola ruang kawasan lindung

Pola ruang kawasan lindung di Provinsi terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Luas Pola ruang kawasan lindung lebih kurang 200.208,45 (dua ratus ribu dua ratus delapan koma empat lima) hektar.

- 1) Kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 10.387,29 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma dua sembilan) hektar berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air berada pada:
 - a) Kabupaten Serang;
 - b) Kabupaten Pandeglang; dan
 - c) Kabupaten Lebak.
- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan lindung geologi dan RTH Perkotaan.
 - a) Sempadan pantai seluas lebih kurang 3.326,36 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga enam) hektar berada di:
 - Kabupaten Serang;
 - Kota Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten lebak; dan
 - Kota Cilegon.
 - b) Sempadan sungai seluas lebih kurang 27.504,48 (dua puluh tujuh ribu lima ratus empat koma empat delapan) hektar dan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen meliputi:
 - DAS Ciujung;
 - DAS Cidurian;
 - DAS Cilemer;
 - DAS Ciliman;
 - DAS Cibanten;
 - DAS Cidanau;
 - DAS Cimanceuri;
 - DAS Cisadane;
 - DAS Cibuangeun;
 - DAS Cihara;
 - DAS Cimadur; dan
 - DAS Cibareno.

- c) Kawasan sekitar danau atau waduk seluas lebih kurang 555,59 (lima ratus lima puluh lima koma lima sembilan) hektar berada di:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Tangerang;
 - Kota Tangerang Selatan;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kota Cilegon
 - d) Kawasan sekitar mata air yang berada di:
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Pandeglang; dan
 - Kabupaten Serang.
 - e) Kawasan lindung geologi seluas lebih kurang 1.961,49 (seribu sembilan ratus enam puluh satu koma empat sembilan) hektar di Kabupaten Lebak.
 - f) RTH Perkotaan di Provinsi Banten tersebar di kabupaten atau kota
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi kawasan: Cagar alam, taman nasional, taman hutan raya Banten, taman wisata alam; dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a) Kawasan cagar alam meliputi :
 - Cagar Alam Rawa Danau seluas lebih kurang 3.542,43 (tiga ribu lima ratus empat puluh dua koma empat tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang;
 - Cagar Alam Gunung Tukung Gede seluas lebih kurang 1.521,01 (seribu lima ratus dua puluh satu koma nol satu) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang; dan
 - Cagar Alam Pulau Dua seluas lebih kurang 34,52 (tiga puluh empat koma lima dua) hektar yang terdapat di Kota Serang.
 - b) Kawasan Taman Nasional meliputi:
 - Taman Nasional Ujung Kulon seluas lebih kurang 61.363,05 (enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh

- tiga koma nol lima) hektar yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang; dan
- Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas lebih kurang 31.978,63 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak.
- c) Kawasan Taman Hutan Raya Banten meliputi Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang seluas lebih kurang 1.595,90 (seribu lima ratus sembilan puluh lima koma sembilan nol) hektar;
- d) Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Pulau Sangiang seluas lebih kurang 558,64 (lima ratus lima puluh delapan koma enam empat) hektar terdapat di Kabupaten Serang;
- e) Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan meliputi:
- Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy seluas lebih kurang 4.564, 12 (empat ribu lima ratus enam puluh empat koma satu dua) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak;
 - Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
 - Kawasan Kasepuhan Cisitu yang terdapat di Kabupaten Lebak;
 - Kawasan masyarakat hukum adat kasepuhan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - Kawasan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
 - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 1.505,65 (seribu lima ratus lima koma enam lima) hektar diarahkan pada Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang
- 5) Kawasan rawan bencana terdiri dari: Rawan banjir;, Rawan tsunami, Rawan gempa bumi, Rawan kebakaran hutan dan lahan, Rawan cuaca ekstrim, angin topan dan puting beliung ,

Rawan tanah longsor, Rawan kekeringan; dan Rawan gagal teknologi.

a) Kawasan rawan banjir meliputi:

- Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;
- Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.

b) Kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:

- Pantai Utara, terletak di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang;
- Pantai Selatan, terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
- Pantai Barat, terletak Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

c) Kawasan rawan gempa bumi meliputi :

- Kabupaten Pandeglang
- Kabupaten Lebak;
- Kabupaten Serang;
- Kabupaten Tangerang; dan
- Kota Serang.

d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:

- Kabupaten Pandeglang;
- Kabupaten Lebak;
- Kabupaten Serang;
- Kabupaten Tangerang;
- Kota Serang; dan
- Kota Cilegon.

e) Kawasan rawan angin topan dan puting beliung meliputi:

- Kabupaten Pandeglang;
- Kabupaten Lebak;

- Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Serang;
 - Kota Cilegon;
 - Kota Tangerang; dan
 - Kota Tangerang Selatan.
- f) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:
- Kabupaten Pandeglang
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kabupaten Serang.
- g) Kawasan rawan bencana diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
- h) Kawasan rawan bencana gagal teknologi meliputi;
- Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Serang;
 - Kota Cilegon;
 - Kota Tangerang; dan
 - Kota Tangerang Selatan
- i) Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan
- j) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.

b. Pola ruang kawasan budidaya

Pola ruang kawasan budidaya di Provinsi Banten dengan luas lebih kurang 779.800,93 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus koma sembilan tiga) hektar, meliputi Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan perkebunan, Kawasan peruntukan pertambangan, Kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan lainnya.

1) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi

- a) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas lebih kurang 84.217,45 (delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas empat koma empat lima) hektar
 - b) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
 - Hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 39.008,40 (tiga puluh sembilan ribu delapan koma empat nol) hektar; dan
 - Hutan produksi tetap seluas lebih kurang 45.209,04 (empat puluh lima ribu dua ratus sembilan koma nol empat) hektar.
 - c) Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kota Cilegon.
- 2) Kawasan budidaya pertanian
- a) Kawasan budidaya pertanian lebih kurang 196.000,10 (seratus sembilan puluh enam ribu koma satu nol) hektar, meliputi :
 - Kawasan budidaya pertanian lahan basah seluas lebih kurang 124.263,54 (seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima empat) hektar
 - Kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas lebih kurang 71.736,56 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma lima enam) hektar
 - Kawasan budidaya pertanian diarahkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
 - b) Kawasan budidaya hortikultura diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kota Tangerang Selatan.
 - c) Kawasan budidaya peternakan diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan

- Kota Serang;
- d) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 196.012,28 (seratus sembilan puluh enam ribu dua belas koma dua delapan) hektar terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan cadangan di daerah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Ketentuan lebih rinci mengenai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f) Kawasan agropolitan diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Tangerang.
- g) Kawasan Sistem Pertanian Terpadu diarahkan di wilayah Kota Serang
- 3) Kawasan peruntukan perkebunan
 Kawasan peruntukan perkebunan seluas lebih kurang 191.065,09 (seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima koma nol sembilan) hektar yang diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kota Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak
- 4) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan
 - a) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan seluas lebih kurang 1.620,02 (seribu enam ratus dua puluh koma nol dua) hektar seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - b) Mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Pandeglang; dan
 - Kota Serang.

c) Prasarana Pelabuhan Perikanan meliputi:

- Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara di Kota Serang.
- Pangkalan Pendaratan Ikan Cilegon di Kota Cilegon;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Banyuasih, Carita, Cikeusik, Citerep, Panimbang, Sidamukti, Sukanegara, Sumur, Tamanjaya di Kabupaten Pandeglang;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Anyer, Domas, Kepuh, Lontar, Pasauran, Pulau Panjang, Pulokali, Tengkurak, Terate, Wadas di Kabupaten Serang;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Bayah, Binuangeun, Cibareno, Panyaungan, Pulomanuk, Sawarna, Situregen, Sukahujan, Tanjungpanto di Kabupaten Lebak;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis, Dadap, Ketapang, Kronjo, Mauk Barat, Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang;
- Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan di Kabupaten Pandeglang;
- Pelabuhan Perikanan Pantai Binuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- Rencana Pembangunan pelabuhan perikanan Citarate Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak

5) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan meliputi: Kawasan peruntukan pertambangan mineral, Kawasan peruntukan pertambangan batubara, Kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

a) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

- Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan batu bara diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c) Pola ruang kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Pola ruang kawasan peruntukan industri
- a) Pola ruang kawasan peruntukan industri seluas lebih kurang 54.459,93 (lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar meliputi:
 - Industri besar, diarahkan di wilayah: Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang; dan Kabupaten Lebak.
 - Industri menengah, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - Industri kecil, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - b) Rencana Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang Kabupaten Serang.
- 7) Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata
- Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 2.598,05 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma nol lima) hektar diarahkan di wilayah:
- a) Kawasan pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung;
 - b) Kawasan pariwisata Pantai Utara ;
 - c) Kawasan pariwisata Budaya Banten Lama;

- d) Kawasan pariwisata Pantai Selatan;
 - e) Kawasan pariwisata Budaya Permukiman Baduy;
 - f) Kawasan pariwisata Alam Taman Nasional Ujung Kulon;
 - g) Kawasan pariwisata Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak;
 - h) Kawasan pariwisata Geopark, dan
 - i) Kawasan pariwisata Agro.
- 8) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman
- a) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman di Daerah seluas lebih kurang 249.840,27 (dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh koma dua tujuh) hektar;
 - b) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten;
 - c) Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja; dan
 - d) Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh di Provinsi Banten.
- 9) Kawasan peruntukan lainnya
- Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan andalan nasional, Pertahanan keamanan, kawasan untuk pelayanan umum dan kawasan lainnya;
- a) Kawasan andalan nasional di Provinsi Banten meliputi :
 - Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan pertambangan dan panas bumi;
 - Kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
 - b) Kawasan Pertahanan Keamanan di wilayah Provinsi Banten dengan memperhatikan fungsi kawasan meliputi :
 - Daerah Latihan Pertahanan Pantai
 - Daerah Pertempuran
 - Daerah Latihan Hambat
 - Daerah Komunikasi
 - Daerah Belakang

- Daerah Pangkal Perlawanan
- c) Kawasan untuk pelayanan umum meliputi:
 - Pelayanan kesehatan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
 - Pelayanan pendidikan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- d) Rencana Pengembangan Kawasan pada sepanjang jalan tol dan interchange jalan tol;
- e) Rencana pembangunan dan pengembangan budidaya peternakan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- f) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang kawasan dengan potensi pertanian dan perkebunan; dan
- g) Rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Banten.

Tabel 6.5
Hasil Telaahaan Pola Ruang Provinsi Banten

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Lindung	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
II	Pengendalian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya							
II.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan resapan air	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
III	Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat							
III.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Sempadan pantai	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan C. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang , Kabupaten lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
III.2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sempadan sungai	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan C. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	DAS Ciujung, DAS Cidurian , DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanau, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, DAS Cibareno, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak KotaCilegon	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III.3	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan sekitar mata air	d. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
III.4	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi Bentang Alam Karst		Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IV	Pengendalian Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya							
IV.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Cagar Alam	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan C. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	a. Cagar Alam Rawa Danau b. Cagar Alam Gunung Tukung Gede c. Cagar Alam Pulau Dua	*	*	*	*	*
IV.2	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Nasional		a. Taman Nasional Ujung Kulon b. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	*	*	*	*	*
IV.3	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Hutan Raya		Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
IV.4	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Wisata Alam		Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kab. Serang	*	*	*	*	*
IV.5	Rehabilitasi Perlindungan Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan		a. Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy b. Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya c. Kawasan Kasepuhan Cisitu d. Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan e. Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V	Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Alam							
V.1	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Banjir	a. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan b. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutana. Program Penanggulangan Bencana c. Program Penataan Ruang	Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang, Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang, Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibuungeun di Kabupaten Lebak, Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
V.2	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami		Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang,, Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
V.3	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.4	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Program Penanggulangan Bencana b. Program Penataan Ruang c. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan d. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.5	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan		Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak , Kabupaten Serang , Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
V.6	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem, Angin Topan dan Puting Beliung	Program Penanggulangan Bencana	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.7	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor		Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V.8	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.9	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gagal Teknologi		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	*	*	*	*	*
V.10	Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.11	Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintergrasi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VI	Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi							
VI.1	Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi	a. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
VII	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Peruntukan Pertanian							
VII.1	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
VII.2	Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan	*	*	*	*	*
VII.3	Pengembangan Kawasan Budidaya Peternakan		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VII.4	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B)		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.5	Pengembangan Kawasan Agropolitan		Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, KabupatenTangerang	*	*	*	*	*
VII.6	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Terpadu		Kota Serang	*	*	*	*	*
VIII	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IX	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan							
IX.1	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Budidaya Perikanan, dan Kawasan Pengolahan Ikan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.2	Pengembangan Kawasan Minapolitan		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang	*	*	*	*	*
IX.3	Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.4	Pelabuhan Perikanan Pantai		Labuan di Kabupaten Pandeglang, Binuangeun di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IX.5	Rencana Pembangunan pelabuhan perikanan Pantai		Citarate di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X	Pengendalian Kawasan Peruntukan Pertambangan							
X.1	Pengendalian Pertambangan Mineral	a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.2	Pengendalian Pertambangan Batubara		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.3	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Panas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.4	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Industri							
XI.1	Pengembangan dan Pengendalian Industri	Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI.2	Rencana Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang		Kab. Serang	*	*	*	*	*
XII	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata							
XII.1	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIII	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Permukiman							
XIII.1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XIII.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIII.3	Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja		Kab. Lebak dan Kab. Tangerang	*	*	*	*	*
XIII.4	Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Lainnya							
XIV.1	Kawasan Andalan Nasional	a. Program Penataan Ruang b. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya	*	*	*	*	*
XIV.2	Kawasan Pertahanan keamanan	a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.3	Kawasan untuk pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XIV.4	Rencana pengembangan kawasan pada sepanjang ruas tol dan interchange Tol	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.5	Rencana pembangunan dan pengembangan budidaya peternakan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.6	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cibaliung dengan potensi pertanian dan perkebunan		Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
XIV.7	Rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

6.2.5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

1. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten meliputi:

- a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
- b. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- d. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
- e. Pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

3. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten meliputi :

- a. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah*, meliputi :
 - 1) Menetapkan kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi lindung;

- 2) Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - 4) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - 5) Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - 6) Mewujudkan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten;
 - 7) Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- b. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar*, meliputi:
- 1) Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - 2) Meningkatkan kepariwisataan;
 - 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) Melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- c. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional*, meliputi:

- 1) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam, kegiatan budidaya unggulan, dan posisi atau letak strategisnya sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - 3) Mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - 4) Memanfaatkan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - 5) Mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan dan efisiensi pemanfaatan kawasan;
 - 6) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - 7) Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;
 - 8) Mewujudkan terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada pusat-pusat pertumbuhan dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.
- d. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan*, meliputi:
- 1) Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - 2) Meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - 3) Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - 4) Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
 - 6) Mewujudkan terselenggaranya interaksi kawasan-kawasan strategis nasional di Provinsi Banten dengan penataan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota

- e. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa*, meliputi:
- 1) Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya bangsa yang mencerminkan jati diri yang berbudi luhur;
 - 2) Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat;
 - 3) Melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- f. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, meliputi:
- 1) Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - 2) Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- g. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara*, meliputi:
- 1) Mendelineasikan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara yang terletak di wilayah Provinsi Banten;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 3) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

h. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten

Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan kawasan strategis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengaturan ruang kawasan strategis provinsi diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

a. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas .

b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:

1) Kawasan strategis nasional meliputi:

- Kawasan Selat Sunda;
- Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.

2) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

- Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
- Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
- Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
- Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan

Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;

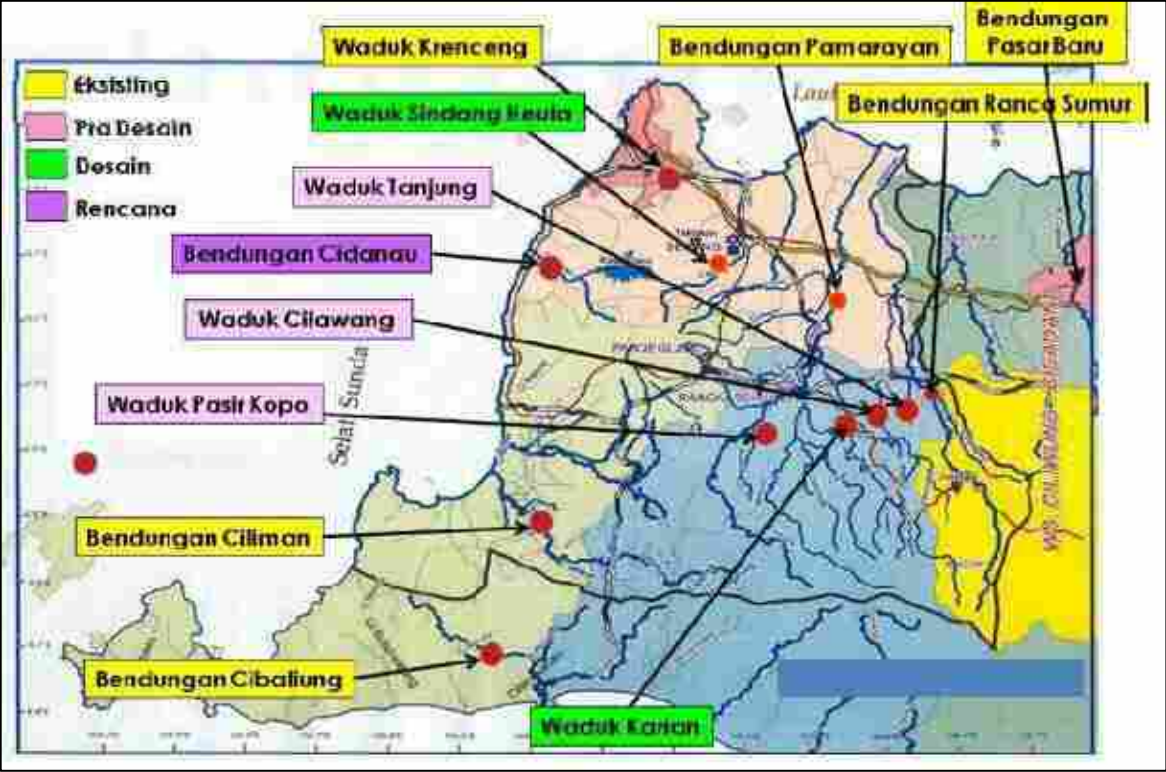
- Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- e. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
 - 1) Kawasan Strategis Nasional yaitu sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
 - 2) Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Tabel 6.6
Hasil Telaahan Kawasan Strategis Provinsi Banten

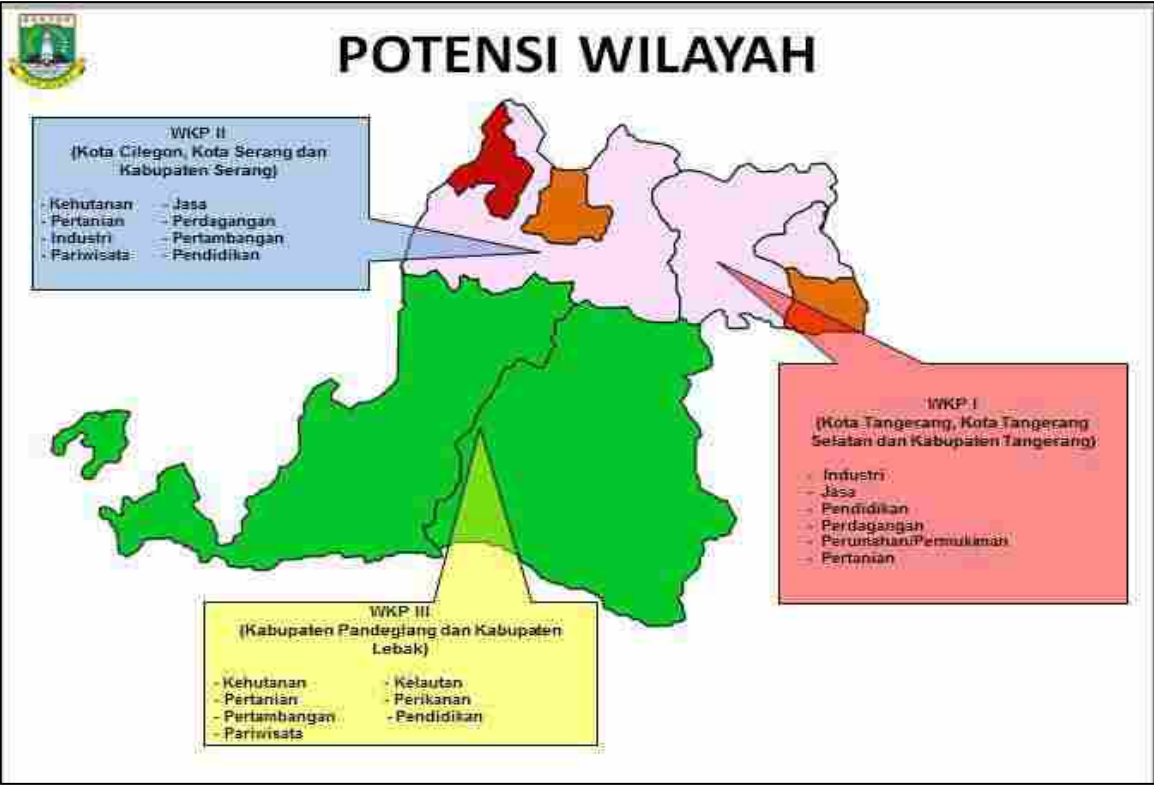
NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi							
I.1	Pengembangan dan Pengendalian KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang	Kota Serang (Kecamatan Curug, Cipocokjaya dan Kecamatan Serang)	*	*	*	*	*
I.2	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon)	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
I.3	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Serang Utara Terpadu	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang	Kabupaten Serang (Kecamatan Bojonegara, Kramatwatu, Pontang, Tirtayasa, Tanara), Kota Serang (Kecamatan Kasemen)	*	*	*	*	*
I.4	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Pantai Selatan Terpadu	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cikeusik), Kabupaten Lebak (Kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Ciligrang, Cibeber)	*	*	*	*	*

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.5	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
II	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Sosial dan Budaya							
II.1	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Situs Banten Lama	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif f. Program Pelestarian Kebudayaan	Kota Serang Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
III	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi							
III.1	Pembangunan Bendungan Karian	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Keciaptakaryaan	Kabupaten Lebak	*	*	*	*	

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup							
IV.1	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Strategis Provinsi	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup f. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan g. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*



Gambar 6.1 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



Gambar 6.2 Wilayah Kerja Pembangunan

6.3 ARAH KEBIJAKAN HOLISTIK TEMATIK INTEGRATIF SPASIAL PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

A. HOLISTIK – TEMATIK

Pengertian holistik adalah cara pandang yang menyatakan keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting dari pada bagian-bagiannya. Kata holistik berasal dari bahasa Inggris Holistic yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling terkait dari bagian-bagiannya.

Pengertian tematik dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung pengertian segala sesuatu berhubungan dengan tema (menjadi pokok permasalahan). Dalam pendekatan tematik di artikan sebagai sebuah pola yang menyatukan unsur yang dikaitkan/terpusat pada suatu tema/pokok permasalahan sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

Pendekatan tematik – holistik adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat keterkaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi pendekatan ini mengutamakan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas pembangunan di Provinsi dengan indikasi kegiatan sampai koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta antar perangkat daerah bertujuan mencapai sasaran prioritas nasional dan prioritas tingkat provinsi yang didukung oleh kementerian dan lembaga, perangkat daerah pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten /kota.

B. PENDEKATAN INTEGRATIF

Pengertian integratif sebagai penyatuan berbagai aspek kedalam satu keutuhan yang padu yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek kedalam satu proses. Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, pendekatan integratif melakukan proses mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah agar dapat saling terintegrasi dengan kegiatan pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung keberhasilan kebijakan prioritas.

C. PENDEKATAN SPASIAL

Pengertian spasial dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang dan tempat.

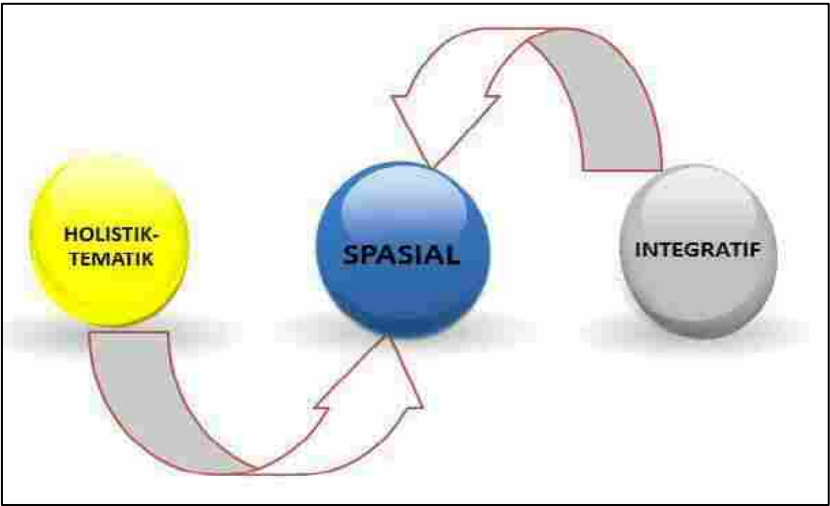
Pendekatan spasial lebih sering digunakan dalam bidang geografi (keuangan) yang merupakan pendekatan yang khas, karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Dalam pembangunan daerah pendekatan spasial instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, pembahasan spasial digunakan saat pembahasan menyepakati fokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa acuan perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya diselaraskan dengan usulan kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 melakukan pendekatan holistik – tematik, integratif spasial pada 6 tema pembangunan dengan mempertimbangkan:

1. Tematik tersebut merupakan agenda pembangunan nasional yang selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
2. Tematik tersebut merupakan isu strategis pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin diselesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
3. Tematik tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
4. Tematik tersebut merupakan pilihan tema pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ingin dikembangkan diprovnsi Banten.

Arah kebijakan tematik tersebut yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran;
2. Ketahanan Pangan;
3. Pariwisata;
4. Kota Metropolitan Serang;
5. Daya saing daerah;
6. Daya saing perekonomian daerah.



Gambar 6.3 Tematik-Holistik Integratif Spasial

Penataan dari masing masing tematik- holistik integrasi spasial sebagai berikut:

6.3.1 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

LEVEL 1 : Meningkatkan taraf hidup penduduk ekonomi desa miskin dan peluang bekerja



LEVEL 2 : 1. Perencanaan, pengendalian pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan dan inflasi rendah



LEVEL 2 : 2. Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya



LEVEL 2 : 3. Perkuatan infrastruktur desa miskin



LEVEL 2 : 4 . Pembangunan kewirausahaan KUKM dan ekonomi kreatif



LEVEL 2 : 5 . Pengurangan beban penduduk miskin



MATRIK TEMATIK PENANGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	(Meningkatkan taraf hidup penduduk ekonomi desa miskin dan peluang bekerja	1	Angka kemiskinan
		2	Tingkat pengangguran terbuka

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Perencanaan, pengendalian pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan dan inflasi rendah	Bappeda	1	Penyusunan program dan kegiatan kemiskinan dan pengangguran terealisasi baik
			2	Kaji terap penelitian intervensi kemiskinan dan pengangguran
		BPS banten	3	Arahan kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran versi BPS
		Bank Indonesia	4	Arahan kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran versi BI
		Biro Perekonomian	5	Kebijakan ekonomi dalam intervensi kegiatan kemiskinan dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	6	kaji terap strategi naker dalam intervensi pengangguran
2	Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Kegiatan padat karya pembangunan jalan jembatan dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	Kegiatan padat karya pembangunan praswil dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	target penanaman modal dalam solusi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Pariwisata	4	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada pariwisata

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Pertanian	5	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada pertanian
		TNI	6	Kegiatan manunggal pada opd terkait dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Kelautan dan Perikanan	7	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada kelautan dan perikanan
		Dinas Ketahanan Pangan	8	Target pertumbuhan pangan intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	Kegiatan bersama mitra strategi naker intervensi kemiskinan dan pengangguran
3	Perkuatan infrastruktur desa miskin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Kegiatan perbaikan lingkungan pemukiman desa miskin
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Kegiatan perbaikan infrastruktur desa miskin
		Dinas Perhubungan	3	Kegiatan perbaikan akses transportasi desa miskin
		Dinas Pertanian	4	Kegiatan perbaikan infrastruktur pertanian desa miskin
4	Pembangunan kewirausahaan KUKM dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Pengadaan sarpras pembangunan umkm bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Pengadaan sarpras pembangunan indag bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Pariwisata	3	Pengadaan sarpras pembangunan pariwisata bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Sisinfokemiskinan dan ketenagakerjaan
		Dinas Pertanian	5	Pengadaan sarpras pembangunan pertanian bagi miskin dan pengangguran

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6	Pengadaan sarpras pembangunan bidang pora bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Kelautan dan Perikanan	7	Pengadaan sarpras pembangunan bidan kelautan dan perikanan bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8	Pengadaan sarpras pembangunan bidan energi sdm bagi miskin dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	Pengadaan sarpras pembangunan bidan nakertrans bagi miskin dan pengangguran
5	Pengurangan beban penduduk miskin	Dinas Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan bagi masyarkat miskin
		Dinas Sosial	2	Penangan masyarakat miskin
		BPJS	3	Subsidi masyarakat miskin
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Bea siswa masyarkat miskin
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Penanganan masyarkat miskin pesisir
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	6	Kegiatan dengan mitra strategis nakertransdalam penanggulangan kemiskinan
		Dinas Pertanian	7	Kegiatan dengan mitra strategis pertanian dalam penanggulangan kemiskinan
		Biro Kemasyarakatan	8	Kebijakan dalam intervensi beban kemiskinan dan pengangguran

6.3.2 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN

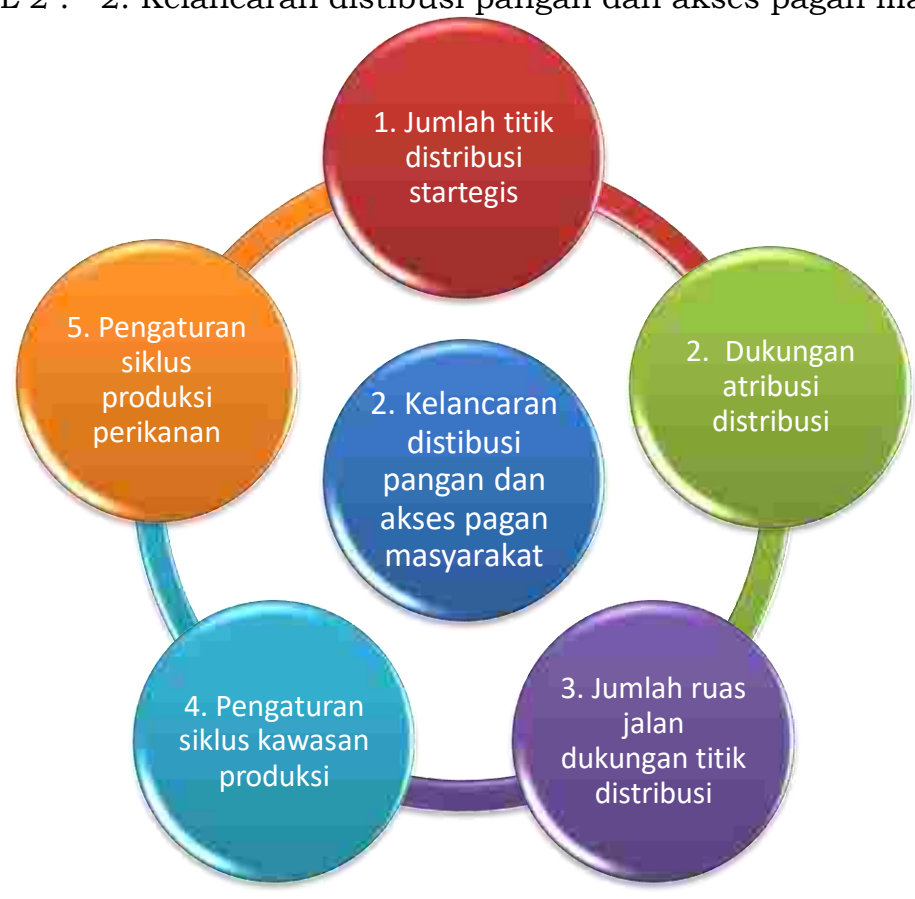
LEVEL 1 : Pembangunan ketahanan pangan



LEVEL 2 : 1. Pembangunan ketahanan pangan



LEVEL 2 : 2. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat



LEVEL 2 : 3. Peningkatan mutu kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat



LEVEL 2 : 4. Penanganan gangguan terhadap produksi pangan



LEVEL 2 : 5. Penguatan kelembagaan petani



LEVEL 2 : 6. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah produk pangan



Matrik Tematik Ketahanan Pangan

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
	Pembangunan ketahanan pangan dalam meningkatkan indeks ketahanan pangan daerah	1	Indeks Ketahanan Pangan

	Integrasi Tema Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Indikasi Kegiatan	
1	Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	1	Sistem pengendalian ketahanan pangan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Penataan kawasan produktifitas
		Dinas Pertanian	3	Peningkatan produksi padi
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4	Peningkatan produksi perikanan
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5	Luasan lahan hijau produktif
2	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Jumlah titik distribusi strategis
		Dinas Perhubungan	2	Dukungan atribusi distribusi
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Jumlah ruas jalan dukungan titik distribusi
		Dinas Pertanian	4	Pengaturan siklus kawasan produksi
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Pengaturan siklus produksi perikanan
3	Peningkatan mutu kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Ketersediaan pangan lokal
		Dinas Kesehatan	2	Tingkat kesehatan Produk Makanan
		BPOM	3	Tingkat kesehatan pangan dan halal
		Dinas Pertanian	4	Ketersediaan pangan lokal
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Gerakan makan produk ikan

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
4	Penanganan gangguan terhadap produksi pangan	Dinas Pertanian	1	Wilayah cegah hama tanaman
		Dinas Pertanian	2	Wilayah cegah penyakit ternak
		Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Wilayah cegah penyakit ikan
5	Penguatan kelembagaan petani	Dinas Pertanian	1	Kelompok petani katagori baik
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Kelompok koperasi katagori baik
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	Kelompok UMKM katagori baik
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4	Kelompok nelayan katagori baik
6	Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah produk pangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Tersedia teknologi pengolahan ikan
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Tersedia teknologi dan menjamin UMKM berkelanjutan
		Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Tersedia teknologi alat deteksi ikan
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Sismonev pengembangan umkm
		Dinas Ketahanan Pangan	5	Sisdaketpa (sistem pengendalian ketahanan pangan Banten)
		Biro Perekonomian	6	Kebijakan peningkatan ekonomi Banten
			7	Kebijakan infrastruktur ekonomi Banten

6.3.3 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK METROPOLITAN SERANG

LEVEL 1 : Pembangunan tematik metropolitan serang



LEVEL 2 : 1. Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik



LEVEL 2 : 2. Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik



LEVEL 2 : 3. Infrastruktur Keterkaitan Antar Kota metropolitann serang Dalam Sistem Perkotaan



LEVEL 2 : 4. Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)



LEVEL 2 : 5. Mengembangkan kota cerdas, dan hijau secara berkelanjutan



LEVEL 2 : 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota



MATRIK TEMATIK KOTA METROPOLITAN SERANG

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Meningkatnya aktifitas penataan wilayah serang yang mengukur kinerja pencapaian menuju kota Metropolitan Serang	1	Prosentase kinerja pengembangan kota Metropolitan Serang

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda	1	Perencanaan Pembangunan Metropolitan Serang
		Badan Kepegawaian Daerah	2	Penilaian kompetensi aparatur Kota Serang
		Bidang pemerintahan	3	Kerjasama pemerintahan Kota Serang
2	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Standar pelayanan pendidikan Kota Serang
		Dinas kesehatan	2	Standar pelayanan kesehatan Kota Serang
3	Infrastruktur Keterkaitan Antar Kota metropolitann serang Dalam Sistem Perkotaan	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota serang	1	Konektifitas dengan Pusat Kawasan Nasional
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	2	Pengembangan kawasan perkotaan Metropolitan Serang
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	3	Konektifitas dengan pusat kawasan wilayah
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang, dinas terkait	4	Konektifitas dengan pusat kawasan strategis kota (Pariwisata, perdagangan, pendidikan, industri, iptek)
		Dinas PUPR ,dishub Banten dan PUPR, dishub Kota serang,	5	konektiftas moda transportasi antar kawasan
4	Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)	Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	1	Ketersediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan
		Dinas pendidikan Banten dan Dinas pendidikan Kota Serang	2	Ketersediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya yang berkualitas

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas PRKP Banten dan Dinas PRKP Kota Serang	3	Ketersediaan sarana permukiman
		Dinas Perhubungan Banten dan Dinas Perhubungan Kota Serang	4	Ketersediaan sistem transportasi publik
		Dinas sosial Banten dan Dinas sosial Kota Serang	5	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan serang
5	Mengembangkan kota cerdas, dan hijau secara berkelanjutan	Dinas PUPR Banten dan Dinas PUPR kota serang	1	Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan
		Dinas Kominfo Banten dan Dinas kominfo Kota Serang	2	ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelolan kota metropolitan serang
		Dinas Kominfo,Indag,Kop ukm Banten dan Kominfo,Indag,Kop UMKM Kota Serang	3	Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
		Dinas Kominfo,Dis LH hutan, Banten dan kominfo, Dis LH hutan Kota Serang	4	ketersediaan Sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan
		Dinas Kominfo, Dis LH hutan,Dishub Banten dan Dinas kominfo, Dis LH hutan, Dishub Kota Serang	5	Ketersediaan Transportasi cerdas dan ramah lingkungan
		Dinas Kominfo,Dinas pariwisata Banten dan Dinas Dinas kominfo,Dinas pariwisata Kota Serang	6	Ketersediaan city brandig destinasi wisata kota metropolitan serang

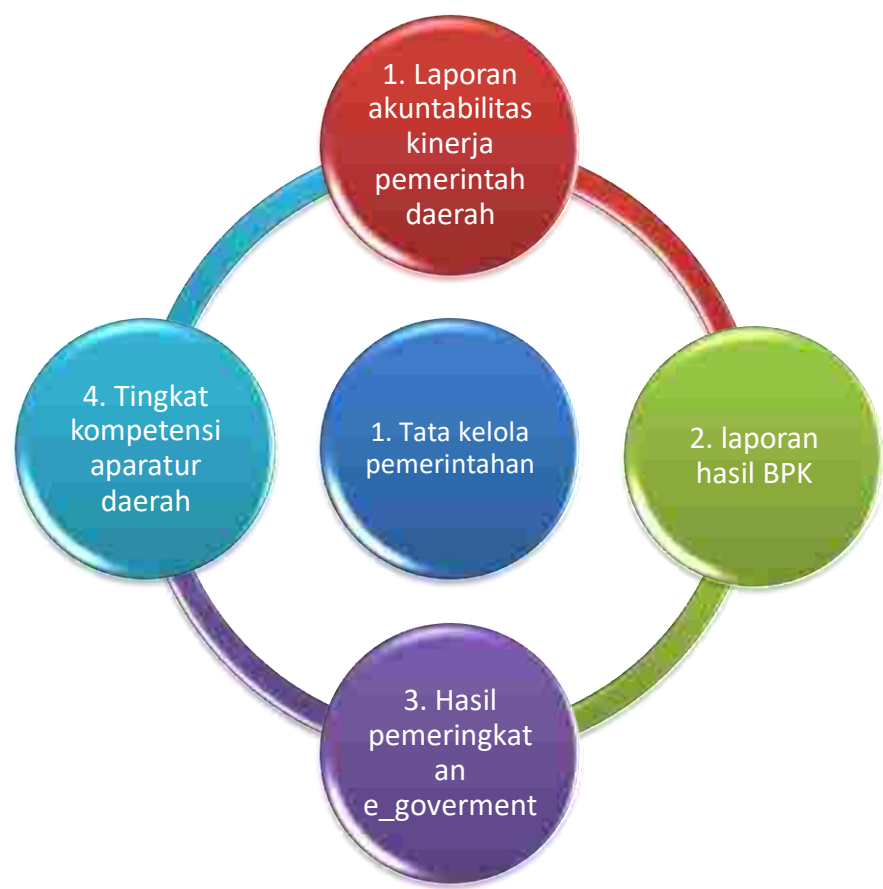
INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
6	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota	Bapeda, Biro hukum , setwan, Banten dan Dinas Dinas Bapeda, Biro hukum , setwan Kota Serang	1	ketersedian perencanaan, peraturan ,prosedur Kota metropolitan serang Berkelanjutan
		Bapeda, Biro pemerintahan Bapeda dan Bapeda, Biro pemerintahan Kota Serang		ketersediaan kelembagaan Badan Koordinasi dan kerjasama Pembangunan Kawasan antar Perkotaan metropolitan
		Bapeda, Diskominfo, Banten dan Bapeda, Diskominfo Kota Serang	3	ketersediaan Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu kota metropolitan serang

6.3.4 TEMATIK DAYA SAING DAERAH

LEVEL 1 Pembangunan pariwisata Banten



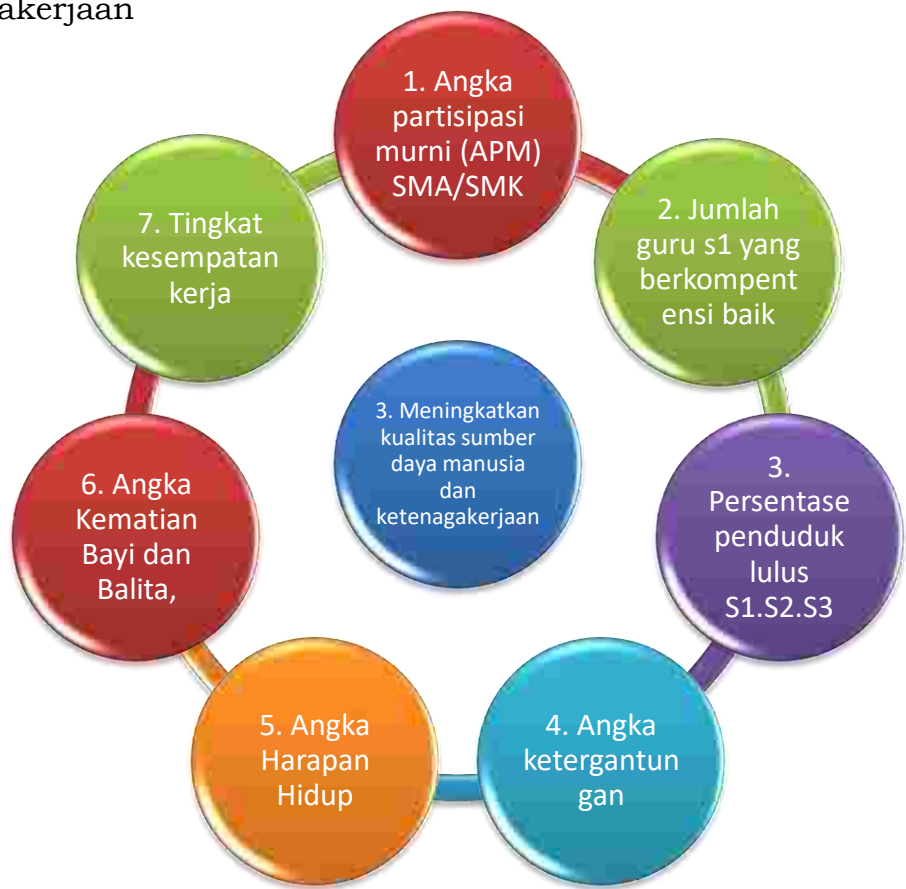
LEVEL 2 : 1. Tata kelola pemerintahan



LEVEL 2 : 2. Mendorong aktivitas perekonomian daerah



LEVEL 2 : 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan



LEVEL 2 : 4. Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha



LEVEL 2 : 5. Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya



LEVEL 2 : 6. Meningkatkan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan



MATRIK TEMATIK DAYA SAING DAERAH

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Pembangunan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan bekerja	1	Meningkatkan PDRB HK terhadap angkat kerja
		2	Meningkatkan PDRB ADHB Terhadap jumlah penduduk
		3	Tingkat kesempatan kerja

	INTERGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Tata kelola pemerintahan	Biro Organisasi	1	Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Inspektorat	2	laporan hasil BPK
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Hasil pemeringkatan e_government
		Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4	Tingkat kompetensi aparatur daerah
2	Mendorong aktivitas perekonomian daerah	Badan Pendapatan Daerah	1	Jumlah PAD
		Badan Pendapatan Daerah	2	Jumlah APBD
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	Jumlah investasi daerah
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Jumlah guru S1 yang berkompentensi baik
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Persentase penduduk lulus S1.S2.S3
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Perencanaan ketenagakerjaan
		Dinas Kesehatan	5	Angka Harapan Hidup

	INTERGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Kesehatan	6	Angka Kematian Bayi dan balita,
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	Tingkat kesempatan kerja
4	Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha	Biro Perekonomian	1	Perda kemudahan investasi
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	Pengurangan waktu perizinan usaha
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Teknologi online Pelayanan terpadu satu pintu
		Satuan Polisi Pamong Praja	4	Penegakan Peraturan Daerah
5	Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Panjang jalan pada akses distribusi dalam kondisi baik
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Jumlah jembatan pada akses distribusi dalam kondisi baik
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Jumlah ketersediaan listrik untuk usaha/industri
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Jumlah akses ketersediaan jaringan komunikasi
6		Biro Perekonomian	1	Ketersediaan jumlah kantor cabang bank untuk melayani masyarakat

	INTERGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
	Meningkatkan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan	Biro Perekonomian	2	Ketersediaan jumlah lembaga keuangan untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	3	Ketersediaan produk perbankan untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	4	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perbankan
		Biro Perekonomian	5	Jumlah UKM yang memanfaatkan perbankan

6.3.5 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK PARIWISATA

LEVEL 1 Pembangunan pariwisata Banten



LEVEL 2 : 1 Promosi Wisata Banten



LEVEL 2 : 2. Pengembangan destinasi wisata



LEVEL 2 : 3. Peningkatan SDM , kelembagaan dan pemanfaatan teknologi



LEVEL 2 : 4. Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat



LEVEL 2 : 5. Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi



Matrik Tematik Pariwisata Banten

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
	Pembangunan kepariwisataan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	1	Kunjungan wisatawan
		2	Destinasi wisata

Integrasi Tema Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Indikasi Kegiatan	
1	Promosi Wisata Banten	Dinas Pariwisata	1	Strategi pengembangan pariwisata banten
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	Minimalisir perizinan pariwisata
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Sistem informasi pariwisata banten
2	Pengembangan destinasi wisata	Dinas Pariwisata	1	Destnasi wisata Banten (7 woderful)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	Penataan wilayah pariwisata
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	pembangunan ruas pusat pariwisata
		Dinas Perhubungan	4	pembangunan atribut pusat pariwisata
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	Peningkatan Sekolah pariwisata
3	Peningkatan SDM , kelembagaan dan pemanfaatan teknologi	Dinas Pariwisata	1	Organisasi pariwisata penumbuh SDM
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Pelatihan sdm pariwisata kerjasama
			3	Penumbuhan jurusan pariwisata
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	Kesertaan organisasi masyarkat dalam pariwisata dalam SDM dan lembaga
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	Kesertaan UMKM penunjang pariwisata

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6	Sistem Informasi pariwisata, kelembagaan UMKM, lembaga pendidikan pariwisata
4	Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	penciptaan produk umkm penunjang pariwisata
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	penciptaan pola dukungan produk UMKM penunjang pariwisata
		Dinas Pariwisata	3	pengembangan budaya lokal dukungan penunjang pariwisata
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Penciptaan kurikulum khusus budaya pariwisata lokal pada sekolah pariwisata di Banten
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Kemitraan strategis untuk membangun jenis kearifan lokal yang akan kembangkan
5	Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi	Polisi	1	SOP pengamanan pariwisata kemitraan dengan polisi
		Dinas Pariwisata	2	Kebijakan pengamanan di lokasi wisata
		Satuan Polisi Pamong Praja	3	SOP pengamanan pariwisata kemitraan dengan pol-PP
		Biro Perekonomian	4	Kebijakan peningkatan ekonomi melalui pariwisata
		Biro Perekonomian	5	Kebijakan peningkatan infrastruktur mendukung pariwisata

6.3.6 TEMATIK DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH

LEVEL 1 Daya saing perekonomian daerah yang dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah



LEVEL 2 : 1 Kebijakan Tata kelola pemerintahan



LEVEL 2 : 2 Penguatan terhadap sektor perekonomian daerah



LEVEL 2 : 3 Kerjasama perekonomian antar daerah



LEVEL 2 : 4. Peningkatan peran Perbankan dan keuangan



LEVEL 2 : 5. Peningkatan Infrastruktur daerah



LEVEL 2 : 6. Pengelolaan Sumber daya alam yang berdaya saing



LEVEL 2 : 7. Pengelolaan Sumber daya manusia yang berdaya saing



LEVEL 2 : 8. Implementasi Teknologi informasi dan inovasi daerah



MATRIK TEMATIK DAYA SAING PEREKONOMIAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Daya saing perekonomian daerah yang dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi
		2	Investasi Daerah

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Kebijakan Tata kelola pemerintahan	Sekretariat Dewan	1	Pengelolaan regulasi Politik
		Biro Hukum	2	Regulasi Perda kemudahan usaha daerah
		Satpol PP	3	Pengelolaan aspek Kemanan/kriminalitas
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	Investasi daerah dan pelayanan terpadu satu pintu
		Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5	Capaian kompetensi aparatur daerah
		Biro Perekonomian	6	Kerjasama dan sinergi perusahaan daerah
2	Penguatan terhadap sektor Perekonomia daerah	Biro Perekonomian	1	Kebijakan kinerja Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
		Biro Perekonomian	2	Kebijakan kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian
		Biro Perekonomian	3	Kebijakan kinerja Sektor Industri Pengolahan
		Biro Perekonomian	4	Kebijakan kinerja Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
		Biro Perekonomian	5	Kebijakan kinerja Sektor Konstruksi
		Biro Perekonomian	6	Kebijakan kinerja Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
		Biro Perekonomian	7	Kebijakan kinerja Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Biro Perekonomian	8	Kebijakan kinerja Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
		Biro Perekonomian	9	Kebijakan kinerja Jasa-Jasa
3	Kerjasama perekonomian antar daerah	Biro Perekonomian	1	Kerjasama antar daerah dalam propinsi
		Biro Perekonomian	2	Kerjasama antar daerah luar provinsi
		Biro Perekonomian	3	Kerjasama antar provinsi
		Biro Perekonomian	4	Kerjasama internasional
4	Peningkatan peran Perbankan dan keuangan	Biro Perekonomian	1	Ketersediaan jumlah kantor cabang bank untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	2	Ketersediaan jumlah lembaga keuangan non untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	3	Ketersediaan produk perbankan untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	4	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perbankan
		Biro Perekonomian	5	Jumlah UKM yang memanfaatkan perbankan
5	Peningkatan Infrastruktur daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Panjang jalan dalam kondisi baik

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Jumlah jembatan dalam kondisi baik
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Jumlah ketersediaan listrik untuk rumah tangga/usaha/industri
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Jumlah akses ketersediaan jaringan komunikasi
6	Pengelolaan Sumber daya alam yang berdaya saing	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Sumber daya kemaritiman
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	Pengelolaan Sumber daya kehutanan
		Dinas Pertanian	3	Pengelolaan Sumber daya pertanian, peternakan dan perkebunan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4	Pengelolaan Sumber daya alam tambang
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	Pengelolaan potensi perdagangan dan industri
		Dinas Pariwisata	6	Pengelolaan potensi pariwisata
		Biro Perekonomian	7	Pengelolaan posisi geografis strategis Banten

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
7	Pengelolaan Sumber daya manusia yang berdaya saing	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Ketersedian dan daya saing sdm umk
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Ketersediaan dan daya saing sdm industri
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Ketersediaan sdm industri kreatif
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Keselarasan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	Tingkat produktifitas sdm Banten
8	Implementasi Teknologi informasi dan inovasi daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1	Implentasi TI pelayanan pemerintahan
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2	Implentasi TI pelayanan industri / ukm
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Implentasi TI pelayanan perencanaan daerah
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Implentasi TI pengendalian kinerja daerah
		Biro Organisasi	5	Inovasi pelayanan publik
		Biro Perekonomian	6	Inovasi penumbuhan perekonomian daerah

6.4 ARAH KEBIJAKAN KORIDOR EKONOMI BANTEN

Koridor ekonomi dalam pengertian *Asian Development Bank* adalah jaringan infrasturktur terintegrasi dalam geografi yang dicanangkan untuk menstimulasi pengembangan ekonomi, koridor tersebut berkembang antar negara, dalam sebuah negara atau antar kawasan-kawasan. Koridor ekonomi membuat infrastruktur terintegrasi seperti jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan serta menghubungkan antar kota-kota atau negara-negara.

Di indonesia telah dikembangkan 6 koridor ekonomi sebagai berikut :

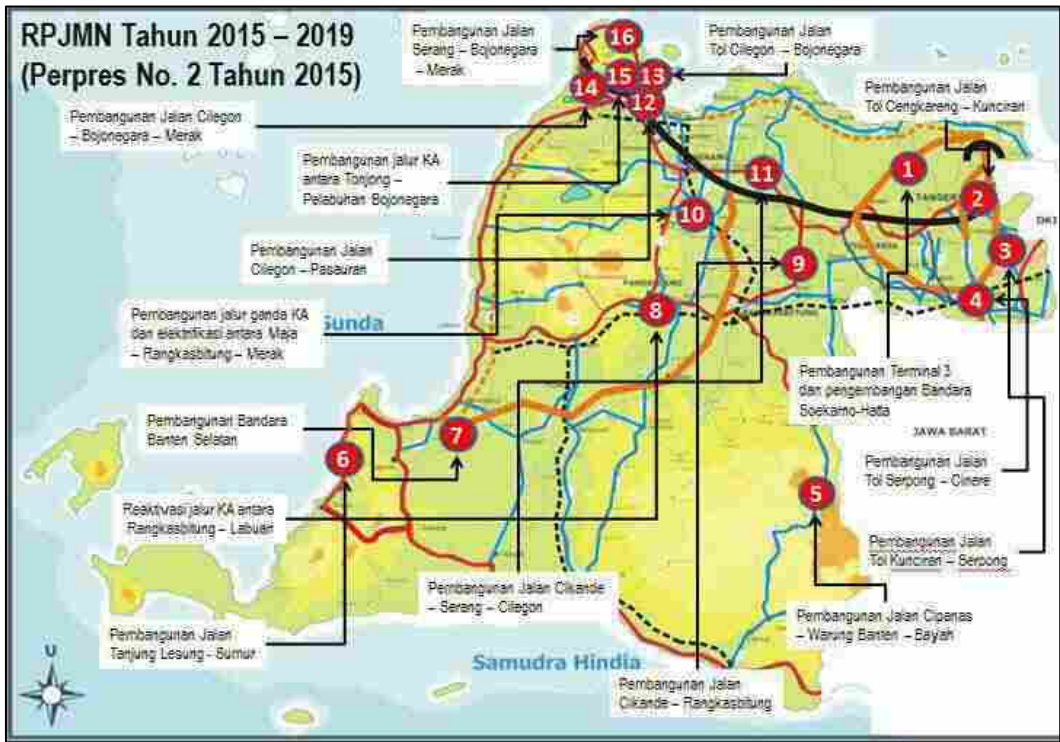
- 1. Koridor Ekonomi Sumatera : Sebagai sentra produksi dan pengelolaan hasil bumi dan lumbung energi nasional;
- 2. Koridor Ekonomi Jawa : Sebagai pendorong industri dan jasa nasional;
- 3. Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi;
- 4. Koridor Ekonomi Sulawesi – Maluku Utara : sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian perkebunan dan perikanan nasional;
- 5. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara : Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional;
- 6. Koridor Ekonomi Papua – Maluku sebagai Pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera;



Gambar 6.4 Koridor Ekonomi Nasional

Terdapat pembangunan sarana strategi di Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam beberapa keputusan antara lain;

1. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional tahun 2015 – 2019 mencantumkan 15 proyek strategis nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten. Tentang Rencana Jalan Kerata Api Serang-Cikande-Cikupa--Serpong
4. Jalan Kerata Api ini merupakan salah satu angkutan massal baik untuk penumpang maupun barang. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas barang dan jasa dengan selesainya pembangunan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu mengurangi beban jalan Tol Jakarta Merak,
5. Pembangunan jalan tol Serang – Panimbang yang merupakan jalur transportasi strategis yang menghubungkan transportasi utara menuju ke selatan.



Gambar 6.5 Proyek Starategis Nasional di Provinsi Baanten dalam RPJMN 2015- 2019



Gambar 6.6 Proyek Starategis Nasional
di Provinsi Banten dalam Perpres No 3 .2016



Gambar 6.7 Jalur Kerata Api Serang – Cikande- Cikupa Serpong



Gambar 6.8 Jalur Pembangunan Tol Serang-Panimbang

Berdasarkan rencana pengembangan proyek nasional tersebut dikembangkan Transit Oriented Development (TOD) yaitu model orientasi pengembangan transit yang merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan masal seperti kereta api, bus umum. Dengan demikian perjalanan/Trip akan didominasi menggunakan angkutan umum yang terhubung langsung dengan tujuan perjalanan, tempat pemberhentian angkutan umum yang mempunyai kepadatan relatif tinggi. Untuk itu kebijakan model TOD ini harus di tempatkan 1) pada jaringan utama angkutan masal, 2) pada koridor jaringan bus yang berfrekuensi tinggi, 3) pada jaringan penumpang bus yang waktu tempuhnya kurang dari 10 menit dari jaringan utama angkutan masal.

Ada beberapa tataruang campuran yang yang berorientasi pada pengembangan transit antara lain ;

1. Penggunaan ruang campuran yang terdiri dari pemukiman, perkantoran serta fasilitas pendukung.
2. Kepadatan penduduk yang tinggi ditandai dengan berkembangnya perumahan.
3. Tersedianya fasilitas perbelanjaan
4. Fasilitas kesehatan

- 5. Fasilitas pendidikan
- 6. Fasilitas hiburan
- 7. Fasilitas olah raga
- 8. Fasilitas perbankan

KORIDOR EKONOMI BANTEN

Dalam mengembangkan pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana telah dijabarkan, telah kembangkan Koridor Ekonomi Banten yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Koridor Utara : Menghubungkan sentra-sentra pertumbuhan primer Tangerang – Balaraja – Cikupa – Serang – Cilegon – Merak yang memfokuskan pada sektor industri manufaktur, perdagangan , logistik, permukiman dan jasa.
- 2. Koridor Tengah : Dibangun sepanjang jalur tol Serang – Panimbang menghubungkan sentra – sentra Serang – Pandegelang – Rangkasbitung – Panimbang. Yang memfokuskan pada sektor agrobisnis industri, pertanian, pengolahan hasil bumi dan laut, Peternakan, Perikanan dan Parawosata.
- 3. Koridor Selatan : Dirancang pembangunan Jalan tol Panimbang – Cikeusik –Simpang – Bayah – Sukabumi.



Gambar 6.9 Pengembangan Koridor Ekonomi Banten

6.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan beserta program yang akan dilaksanakan.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah serta menggambarkan keterkaitan antar bidang pada urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran daerah beserta target pelaksanaan indikasi kegiatan tahunan selama 5 tahun.

Setelah kebijakan umum dan program pembangunan dibuat, langkah selanjutnya adalah meletakkan program pembangunan daerah sesuai bidang pada tiap urusan pemerintahan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan.

Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala daerah yang terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan dan meliputi program pembangunan dan kerangka pendanaan.

Penganggaran untuk melaksanakan urusan dan kewenangan pemerintah Provinsi Banten diformulasikan melalui belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah provinsi Banten, selanjutnya program unggulan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, pola penganggarannya diformulasikan melalui bantuan keuangan khusus (specifik grand) yang meliputi :

1. Bidang Pendidikan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
2. Bidang Kesehatan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
3. Bidang Infrastruktur, ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan selanjutnya diselaraskan dengan misi pembangunan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarkat	
1.1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN SELURUH OPD
	Program Tata Kelola Pemerintahan Seluruh OPD	Seluruh OPD
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	BPKAD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Program Penatausahaan Aset Daerah	
1.3	Meningkatnya Kualitas SPIP	INSPEKTORAT
	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT
1.4	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	BAPPEDA
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
1.5	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	BAPPEDA
	Program Penelitian dan Pengembangan	
1.6	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Bappeda
	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	
1.7	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	BPSDM
	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional	
	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	
1.8	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.9	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Bapenda
	Proram Peningkatan Pajak Daerah	
	Proram Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	
1.10	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Satpol PP
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	
1.11	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	
1.12	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
1.13	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Diskominfo

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	

2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
2	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	SEKRETARIS DAERAH
2.1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2.2	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	DPUPR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
2.3	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	DPUPR
	Program Pembangunan Sumberdaya Air	
2.4	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR
	Program Penataan Ruang	
2.5	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	DPRKP
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
	Program Keciptakaryaan	
2.6	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	DPRKP
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	
2.7	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
2.8	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	
2.9	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	DINAS ESDM
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	
2.10	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	DINAS KOMINFO
	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	DINAS KOMINFO

3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	SERETARIS DAERAH
3.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Asisten Kesejahteraan Rakyat
3.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
3.3	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	
3.4	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	
3.5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	DINDIKBUD
	Program Pendidikan Menengah Atas	
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	
	Program Pendidikan Khusus	
3.6	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	DISPORA
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	
3.7	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	DP3AKB
	Program Pemberdayaan Perempuan	
3.8	Meningkatnya Budaya Literasi	DPAD
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
3.9	Menurunnya PMKS	DINSOS
	Program Penangan Fakir Miskin	
3.10	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	DISNAKERTRANS
	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	

4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
4	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	SEKRETARIS DAERAH
4.1	Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Asisten Kesejahteraan Rakyat
4.2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	DINKES
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	
4.3	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	DINKES
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
4.4	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	DINKES/ RSUD
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping	

5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	SEKRETARIS DAERAH
5.1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
5.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	
5.3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	
5.4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	
5.5	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	DINAS PMPTSP
	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	
5.6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	DINAS PERINDAG
	Program Peningkatan Daya Saing Industri	
5.7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	DINAS PERINDAG
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
5.8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	
5.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	DINA KELAUTAN DAN PEIKANAN
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	
5.10	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	DINAS KETAPANG
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
5.11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	DINAS PARIWISATA
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
5.12	Meningkatnya Kualitas Koperasi	DISKOP UKM
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
5.13	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	DISKOP UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	
5.14	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	DINAS LHK
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
5.15	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	DINAS LHK
	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	
5.16	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	DINAS ESDM
	Program pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	
5.17	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	DISNAKERTRAN
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	

Arah kebijakan umum merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala daerah yang terdiri dari program pada setiap Perangkat Daerah dikelompokkan pada masing-masing urusan yang meliputi program dalam kerangka regulasi.

Program pembangunan daerah Provinsi Banten dituangkan dalam Tabel 6.7 berikut :

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Banten 2017 – 2022
(Sebelum Perubahan)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)															
1	1		Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	2,8	3.1		3.2		-		-		-		-		
1	1	1	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Capiian LAKIP Provinsi Banten (Satuan: nilai)	CC	B		BB		-		-		-		-	Badan Penghubung, Setda, Set DPRD	
30	1	1	Program Tata Kelola Pemerintahan				123,936,883,181		124,256,575,404		-		-		-		-	Badan Penghubung, Setda, Set DPRD
				Nilai IKM (Satuan: skala)	2.5	2.8		3		-		-		-		-		
30	1	1	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				1,864,417,500		1,864,417,500		-		-		-		-	Biro Organisasi
				Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %)	10	30		50		-		-		-		-		
1	1	2	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP		WTP		-		-		-		-		BPKAD
30	4	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5,457,470,000		5,786,470,000		-		-		-		-	BPKAD Bidang Perbendaharaan dan Anggaran

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	1	3		Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)	2	2		3		-		-		-		Inspektorat					
30	2	15		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			12,472,800,000		12,722,200,000		-		-		-		Inspektorat					
					Capaian Nilai SAKIP (Satuan: %)	55	75		75		-		-		-							
					Indek Integritas (Satuan: poin)	72.48	73.48		74.48		-		-		-							
					Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	2	2		3		-		-		-							
					Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100	100		100		-		-		-							
1	1	4		Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: %)	20	42.1		61.83		-		-		-		Diskominfo					
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: Nilai)	88,08	88,08		89		-		-		-							
12	10	15		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			7,689,600,000		7,843,400,000		-		-		-		Diskominfo					
					Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	12.14	30.26		48.38		-		-		-							
12	15	15		Program Tata Kelola Persandian			1,157,600,000		1,180,700,000		-		-		-		Diskominfo					
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)	10	20		40		-		-		-							

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	5	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: %)	60	65	70		-		-		-		-	Bappeda	
30	3	15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			8,802,029,600		8,993,329,600		-		-		-		Bidang P4	
				Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	100	100	0		-		-		-		-		
				Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100	100	100		-		-		-		-		
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	70	80	85		-		-		-		-		
				Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	50	70	75		-		-		-		-		
12	14	1	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah			2,464,000,000		2,513,300,000		-		-		-		Bappeda, Diskominfo	
				Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	30	50	60		-		-		-		-		
1	1	5	Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %)	50	100	100		-		-		-		-		
30	7	15	Program Penelitian dan Pengembangan			4,977,900,000		5,077,500,000		-		-		-		Bappeda	
				Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	30	50	60		-		-		-		-		
				Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	30	50	60		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	6	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (Satuan: %)	5	10		15		-		-		-		-		BKD
30	5	15	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah				4,359,073,000		4,459,073,000		-		-		-		-	BKD
				Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	0	85		90		-		-		-		-		
				Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	0	85		90		-		-		-		-		
				Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	0	85		90		-		-		-		-		
1	1	7	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan: %)	5	10		15		-		-		-		-		BPSDM
30	6	15	Program Pengembangan SDM Aparatur				18,706,934,000		18,906,934,000		-		-		-		-	BPSDM
				Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-		
				Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-		
1	1	8	Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (Satuan: %)	62.89	59.3		60.62		-		-		-		-		Bapenda
30	4	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah				9,808,953,400		10,108,953,400		-		-		-		-	Bapenda
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	55.6	57.58		58.94		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1			2			3			4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	44.4	42.42		41.06		-		-		-		-		-		-				
1	1	9	Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70,00	75		75		-		-		-		-		-		-		-			Satpolpp	
11	5	15	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah				850,000,000		900,000,000	-		-		-		-		-		-		-		-	Satpolpp	
				Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70	75		75		-		-		-		-		-		-		-				
1	1	10	Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten (Satuan: %)	68.46	70		74		-		-		-		-		-		-		-			Badan Kesbangpol	
				Angka Kriminalitas (Satuan: Jumlah)	5,002.00	4,800.00		4,500.00				-		-		-		-		-		-			Badan Kesbangpol	
11	5	17	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan				2,909,968,000		3,000,000,000		-		-		-		-		-		-		-		Badan Kesbangpol	
				Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	70.83	0		73		-		-		-		-		-		-		-				
				Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	63	0		0		-		-		-		-		-		-		-				
1	1	11	Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai)	133	133		125		-		-		-		-		-		-		-			BPBD	
11	5	16	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				3,570,445,500		4,141,528,000		-		-		-		-		-		-		-		BPBD	
				Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100	100		100		-		-		-		-		-		-		-				

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	12	Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (Satuan: %)	50	80	80		-		-		-		-	DP3AKKB	
12	6	15	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			880,000,000		897,600,000		-		-		-		DP3AKKB	
				Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	60	64.86	67.38		-		-		-		-		
				Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	20	23.33	30.81		-		-		-		-		
				Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	80	85.76	86.47		-		-		-		-		
				Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	77	79.19	80.99		-		-		-		-		
				Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	80	85	100		-		-		-		-		
1	1	13	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	100	100		-		-		-		-	Set DPRD	
30	1	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			135,757,270,500		136,075,787,950		-		-		-		Set DPRD	
				Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	0	100	100		-		-		-		-		
				Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	0	100	100		-		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pemenuhan tingkat layanan irigasi	15.118,50	15,333		16,722		-		-		-		-		
11	3	17	Program Pembangunan Sumberdaya Air				148,491,294,800		148,491,294,800		-		-		-		-	DPUPR
				Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir(Satuan:)	15.51	20.89		26.27		-		-		-		-		
				Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha)	15,118.50	15,332.98		16,721.78		-		-		-		-		
				Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan:%)	46.21	51.59		56.97		-		-		-		-		
2	1	2	Perencanaan dan Penataan ruang yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	80	82.5		85		-		-		-		-		DPUPR
11	3	18	Program Penataan Ruang				4,920,000,000		4,920,000,000		-		-		-		-	DPUPR
				Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi(Satua%)	0	25		37.5		-		-		-		-		
2	1	3	Tersedianya Perumahan dan Pemukiman yang layak. Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	375.29	114.6		203.2		-		-		-		-		DPRKP
				Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: Hektar)	82.86	84.02		85.18		-		-		-		-		DPRKP
				Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0	0		20		-		-		-		-		DPRKP
11	4	15	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan				87,434,896,540		89,954,896,540		-		-		-		-	DPRKP
				Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375.29	114.6		203.2		274.6		333.3		333.3		375.29		
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	82.86	84.02		85.18		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1	6	Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30	40		50		-		-		-		-			DPRKP
11	4	16	Program Pengembangan dan Penataan Pusat Pemerintahan				26,875,000,000		27,875,000,000		-		-		-		-		DPRKP
				persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0	25		50		-		-		-		-			
				persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0	28		69		-		-		-		-			
2	1	4	Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	10	10		20		-		-		-		-			Dishub
12	9	15	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan				4,642,000,000		4,742,000,000		-		-		-		-		Dishub
				Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	0	20		20		-		-		-		-			
				Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0	0		0		-		-		-		-			
2	1	7	kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	0	10		20		-		-		-		-			Dishub
12	9	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan				3,200,000,000		3,300,000,000		-		-		-		-		Dishub
				Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0	0		0		-		-		-		-			
				Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	10	10		20		-		-		-		-			

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	0	10		20		-		-		-		-		
3			Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas															
3	1		Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	8.37	8.47		8.7		-		-		-		-		
3	1	1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Rata rata lama sekolah	8.37	8.47		8.7		-		-		-		-		Dindikbud
				Harapan lama sekolah	12.7	13		13.5		-		-		-		-		Dindikbud
11	1	15	Program Pendidikan Menengah				724,856,659,000		746,599,800,000		-		-		-		-	Dindikbud
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	71.13	72.9		74.67		-		-		-		-		
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	57.21	58.77		60.33		-		-		-		-		
				Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0.25	0.22		0.19		-		-		-		-		
				Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0.5	0.44		0.38		-		-		-		-		
				Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98.83	98.64		98.85		-		-		-		-		
				Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99.87	99.89		99.9		-		-		-		-		
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	50.7	51.96		53.22		-		-		-		-		
				Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	54.7	55.5		56.3		-		-		-		-		
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	47.6	48.68		49.76		-		-		-		-		
				Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	10	17		34		-		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	1	16	Program Pendidikan Khusus				9,795,900,000		9,991,900,000		-		-		-		-	Dindikbud
				Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	15	17		34		-		-		-		-		
3	1	2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	30	100		100		-		-		-		-		Dindikbud
12	16	15	Program Pelestarian Kebudayaan				3,203,289,000		3,268,289,000		-		-		-		-	Dindikbud
				Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
				Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
				Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
				Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
3	1	3	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	10	10		20		-		-		-		-		Dispora
				Indeks Pembangunan Olahraga	10	10		20		-		-		-		-		Dispora
12	13	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan				3,950,000,000		4,050,000,000		-		-		-		-	Dispora
				Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)	70	75		80		-		-		-		-		
				Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	0	75		80		-		-		-		-		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	3	16	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga				5,574,835,000		5,665,135,000		-		-		-		-	Dispora
					Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	50	70		75		-		-		-		-		
3	1	4		Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	Indeks pembangunan gender (IPD)	91.39	91.67		91.95		-		-		-		-		DP3AKKB
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.74	69.54		70.34		-		-		-		-		
12	2	15		Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				3,806,605,000		3,856,605,000		-		-		-		-	DP3AKKB
					Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	50	60		63.33		-		-		-		-		
					Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50	50		55		-		-		-		-		
					asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58.72	58.72		62.27		-		-		-		-		
					Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	70	75		75		-		-		-		-		
					Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %)	65.19	66.66		67.62		-		-		-		-		
3	1	5		Minat Baca Masyarakat yang meningkat	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	25.1	30		35		-		-		-		-		DPAD
12	1	7	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				3,479,100,000		3,549,100,000		-		-		-		-	DPAD
					Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan:%)	75	85		90		-		-		-		-		
3	1	6		Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	70	80		85		-		-		-		-		DPAD

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	8	15	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan				3,250,800,000		3,315,800,000		-		-		-		-	DPAD
					Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-		
					Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-		
					Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
4				Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas															
4	1			Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76		70.06		-		-		-		-		
4	1	1		Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	32	31		30		-		-		-		-		DINKES
					Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	308	304		300		-		-		-		-		DINKES
11	2	15		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat				1.711.000.000		2.075.000.000		-		-		-		-	DINKES
					Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	45	65		81		-		-		-		-		
					Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100	100		100		-		-		-		-		
					Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	50	55		60		-		-		-		-		
4	1	2		Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	75	100		100		-		-		-		-		DINKES
11	2	16		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				128.581.505.000		132.300.000.000		-		-		-		-	DINKES

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				75	90		100		-		-		-		-		
				45	65		81		-		-		-		-		
				10	20		35		-		-		-		-		
				0	20		30		-		-		-		-		
4	1	3	Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76	70.06		-		-		-		-		DINKES
11	2	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan			118.901.451.886		146.306.978.140		-		-		-		-	DINKES/RSUD
				70	70		70		-		-		-		-		
				88	88		88		-		-		-		-		
				70	70		75		-		-		-		-		
				50	60		70		-		-		-		-		
				30	40		50		-		-		-		-		
				50	60		70		-		-		-		-		
4	1	4	Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	Laju pertumbuhan penduduk	2.01	1.96	1.91		-		-		-		-		DP3AKKB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	8	15	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana			2,467,400,000		2,516,700,000		-		-		-		-	DP3AKKB
			Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.4	2.33		2.29		-		-		-		-		
			Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR) (Satuan: %)	59	60.9		61		-		-		-		-		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10.3	10.26		10.18		-		-		-		-		
			Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2.6	2.53		25.18		-		-		-		-		
5			Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi														
5	1		Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	LPE	5.7	6	6.2		-		-		-		-		
			TPT	8.69	8.45		8.2		-		-		-		-		
			Kemiskinan	5.25	5.13		5		-		-		-		-		
			Inflasi	4	3.7		4.2		-		-		-		-		
5	1	1	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Nilai Investasi	52.3	56.4	60.8		-		-		-		-		DPMP TSP
			Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	82.16	83.62		85.22		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	1	15	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi			4,700,515,000	4,700,515,000		-		-		-		-	DPMPTSP	
				Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliyun)	12.4	15	17.5		-		-		-		-		
				Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	39.9	43	47		-		-		-		-		
5	1	2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	3.05	3.7	3.95		-		-		-		-	Disperindag	
20	7	15	Program Peningkatan Daya Saing Industri			2,593,200,000	2,593,200,000		-		-		-		-	Disperindag	
				Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	0	20	20		-		-		-		-		
				Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	0	20	20		-		-		-		-		
				Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	0	20	20		-		-		-		-		
5	1	3	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	4	4		-		-		-		-	Disperindag	
				LPE Sektor Perdagangan	3.82	4.9	5.4		-		-		-		-	Disperindag	
20	6	15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri			106,217,259,850	56,375,459,850		-		-		-		-	Disperindag	
				Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	0	5	5		-		-		-		-		
				Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	5	10	12		-		-		-		-		
				capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	6.93	5	5		-		-		-		-		
				Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100	100	100		-		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri			1,292,573,000		1,292,573,000		-		-		-		-	Disperindag
				Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	2828.83	2,970.27		3,118.79		-		-		-		-	
5	1	4	Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,48	4,55		4.67		-		-		-		-	DKP
20	1	15	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			12,248,733,825		12,248,733,825		-		-		-		-	DKP
				Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	7.49	8.01		8.08		-		-		-		-	
5	1	5	Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	82.4	89.2		90.6		-		-		-		-	Dinas Ketapang
12	3	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			3,298,272,500		3,491,172,500		-		-		-		-	Dinas Ketapang
				Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93.9	95.1		96.3		-		-		-		-	
5	1	6	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2.84	2.89		2.94		-		-		-		-	DISPAR
20	2	15	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			2,650,000,000		2,750,000,000		-		-		-		-	DISPAR
				Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	2	1		1		1		1		1		5	
20	2	16	Program Pemasaran Produk Pariwisata			6,475,000,000		6,587,900,000		-		-		-		-	DISPAR
				Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14,705,763	15,146,936		15,601,344		-		-		-		-	
				Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.33	1.36		1.39		-		-		-		-	
				Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3,634,490	3,743,525		3,852,216		-		-		-		-	
5	1	7	Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	0	6		6		-		-		-		-	Dinas KUKM

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	1	16	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi				4,244,190,500		4,244,190,500		-		-		-		-	Dinas KUKM
				Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	0	6	6			-		-		-		-		-	
5	1	8		koperasi dan Usaha Kecil yang berdaya	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	0	1	1			-		-		-		-		Dinas KUKM
12	1	1	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil				4,635,352,000		4,735,352,000		-		-		-		-	Dinas KUKM
				Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	0	1	1			-		-		-		-		-	
5	1	9		Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	8.24	4.49	3.89			-		-		-		-		DINSOS
					Index Gini	0.39	0.39	0.39			-		-		-		-		
11	6	15		Program Rehabilitasi Sosial				1,764,850,000		1,764,850,000		-		-		-		-	DINSOS
					Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang)	1429	573	608			-		-		-		-		
5	1	10		Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	95.64	97	98			-		-		-		-		Dinas ESDM
20	5	16		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				15,427,130,000		15,427,130,000		-		-		-		-	Dinas ESDM
					Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)	10,000.00	10,000	10,000			-		-		-		-		
5	1	11		Pengendalian, pengawasan dan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	12	12.5	13			-		-		-		-		Dinas ESDM
20	5	15		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara				4,129,442,000		4,293,642,000		-		-		-		-	Dinas ESDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	60	65	70		-		-		-		-		
				Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	37.67	41.1	44.52		-		-		-		-		
5	1	12	Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri	Persentase Desa Mandiri	14	16.4	18.8		-		-		-		-		Dinas PMD
12	7	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4,031,500,000		4,131,500,000		-		-		-		Dinas PMD
				Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa)	158	2	2		-		-		-		-		
				Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)	1022	2	2		-		-		-		-		
5	1	13	Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58.06	59.06	60.06		-		-		-		-		Disnakertrans
12	1	15	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja				5,831,730,000		5,831,730,000		-		-		-		Disnakertrans
				Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4.31	4.35	4.4		-		-		-		-		
5	1	14	Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67	44.17	44.67		-		-		-		-		DLHK
12	5	15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				13,142,300,000		13,405,100,000		-		-		-		DLHK
				Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	51	51.5	52		-		-		-		-		
				Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	58.8	59	59.2		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1			2			3			4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	1	15	Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6	31.21		31.71		-		-		-		-		-		-		-		-		DLHK
20	4	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan				7,744,000,000		7,898,900,000		-		-		-		-		-		-		-		DLHK	
				Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)	69,466.00	5,000.00		5,000		-		-		-		-		-		-		-		-		
				Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	38	10		10		-		-		-		-		-		-		-		-		
5	1	16	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD	7.05	5.3		5.6		-		-		-		-		-		-		-		-	DISTAN	
20	3	15	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan				6,104,225,000		6,104,225,000		-		-		-		-		-		-		-		DISTAN	
				Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)	55.68	57.35		59.07		-		-		-		-		-		-		-		-		
				Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2,396,688	2,408,671		2,420,714		-		-		-		-		-		-		-		-		
				Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	20,551.00	21,579.00		22,657		-		-		-		-		-		-		-		-		
				Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	6,801.00	7,141.05		7,498.10		-		-		-		-		-		-		-		-		

Tabel 6.8
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Banten 2017 – 2022
(Setelah Perubahan)

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)															
1	1			Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2.8	3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		3.5	
1	1	1		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A	ASISTEN PEMERINTA HAN
					Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A	
					Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A	Seluruh OPD
30	01	01		Program Tata Kelola Pemerintahan Seluruh OPD				971,947,431,712		834,409,220,624		972,711,110,503		963,299,156,300		890,479,306,700		4,632,846,225,839	Seluruh OPD
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100		

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																																																
							2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp																																															
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17			
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	0.00	0.00			0.00			100			100			100			100			100			100			100																																			
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0.00	0.00			0.00			100			100			100			100			100			100			100																																			
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0.00	0.00			0.00			100			100			100			100			100			100			100																																			
1	1	4		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP			WTP			WTP			WTP			WTP			WTP			WTP			WTP			WTP						BPKAD																													
3 0	0 4	1 6		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					1,150,276,600.00		2,263,079,200.00		1,732,702,000.00		2,353,610,000.00		2,353,610,000.00		2,353,610,000.00		9,853,277,800.00																																														
					Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang- undangan di Bidang Keuangan	%	75	80			85		90		95		100		100		100																																														
3 0	0 4	1 8		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah					1,204,452,000.00		1,787,890,500.00		918,359,000.00		1,859,410,000.00		1,859,410,000.00		1,859,410,000.00		7,629,521,500.00																																														

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah	%	70	80		90		100		100		100		
3 0	0 4	1 9	Program Penatausahaan Aset Daerah				3,681,829,000.00		6,847,750,000.00		2,606,925,000.00		7,121,660,000.00		7,121,660,000.00		27,379,824,000.00
				Capaian tertib Administrasi Aset daerah	%	100	100		100		100		100		100		
1	1	5	Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	2.00		3.00		3.00		4.00		4.00		INSPEKTOR AT
				Capaian Kapabilitas APIP	Level	0.00	0.00		0.00		3.00		3.00		4.00		
3 0	0 2	1 5	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				10,205,688,900.0 0		21,160,361,500.00		16,304,392,500.00		22,006,780,000.0 0		22,006,780,000.00		91,684,002,900.00
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00
				Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab			
								2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Pemberantasan Korupsi																
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
					Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
					Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
1	1	6	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65		70		75		80		80		80			BAPPEDA	
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A				
3 0	0 3	1 5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan					4,716,741,600.00		8,457,524,000.00		6,816,010,000.00		8,795,830,000.00		8,795,830,000.00		37,581,935,600.00			
				Persentase dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	%	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00				
				Persentase Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	%	100,00	100,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00				

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					70,00	80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		85,00	
					50,00	70,00		75,00		0,00		0,00		0,00		75,00	
					0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		85,00		85,00	
					0,00	0,00		0,00		4.000 .000. 000,0 0		5.000 .000. 000,0 0		6.000. 000.00 0,00		15.000. 000.00 0,00	
1	1	7	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan Pengembangan	%	50	100		100		100		100		100		BAPPEDA
30	07	15	Program Penelitian dan Pengembangan				6,020,531,200.00		7,306,303,000.00		4,142,810,000.00		7,598,560,000.00		7,598,560,000.00		32,666,764,200.00
				Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan	%	30,00	50,00		60,00		75,00		80,00		80,00		
				Meningkatnya inovasi yang diadopsi	%	30,00	50,00		60,00		75,00		80,00		100,00		
1	1	8	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	%					70		75		80		80	Bappeda
12	14	02	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah				457,450,000.00		900,000,000.00		263,840,000.00		936,000,000.00		936,000,000.00		3,493,290,000.00
				Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan	%	0,00	0,00		0,00		70,00		80,00		90,00		

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Pembangunan Sesuai SIPD																
1	1	9		Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10.00	10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		30.00	BPSDM	
30	06	17		Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional				0.00		0.00		2,486,874,000.00		3,523,245,000.00		3,523,245,000.00		9,533,364,000.00		
				Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik	%	0.00	0.00		0.00		90,00		95,00		100,00		100,00			
30	06	18		Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan				0.00		0.00		14,035,374,000.00		19,884,425,000.00		19,884,425,000.00		53,804,224,000.00		
				Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik	%	0.00	0.00		0.00		90,00		95,00		100,00		100,00			
1	1	10		Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	70	75		80		85		90		95		95	BKD	
30	05	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3,827,180,000.00		3,688,260,000.00		3,019,138,000.00		3,835,800,000.00		3,835,800,000.00		18,206,178,000.00		
				Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	%	70,00	85,00		90,00		0,00		0,00		0,00		90,00			
				Persentase tingkat pencapaian kualifikasi pendidikan	%	0,00	0,00		0,00		85,00		90,00		95,00		95,00			

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																			
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																	
1				2			3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1	1	1	1	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	%	62.89	59.30		60.62		61.91		63.19		64.44		64.44		64.44																	Bapenda
3 0	0 4	2 0		Proram Peningkatan Pajak Daerah					0.00		0.00		24,390,798,200		22,204,720,000		22,204,720,000				68,800,238,200.00																
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	0,00	0,00		0,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00																	
					Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan	%	2,36	0.00		0.00		17,56		18,10		18,64		18,64		18,64																	
3 0	0 4	2 1		Proram Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain					0.00		0.00		1,050,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000				3,050,000,000.00																
					Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	%	0,00	0,00		0,00		2.95		2.95		2.96		2.96		2.96																	
1	1	1	2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75		75		80		80		85		85		85																	Satpol PP
1 1	0 5	1 5		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum					3,354,000,000.00		2,100,000,000.00		2,262,363,000.00		2,184,000,000.00		2,184,000,000.00				12,084,363,000.00																
					cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	%	100	100		100		100		100		100		100		100																	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	1	3	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	68,46	70		74		76		78		80		80	Badan Kesbangpol	
					Penanganan konflik masyarakat	%	100	0.00		0.00		100		100		100		100		
1	1	0	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional					1,197,156,000.00		1,060,000,000.00		1,150,000,000.00		1,102,400,000.00		1,102,400,000.00		5,611,956,000.00	
					Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah	%	0,00	0,00		0,00	100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
1	1	1	4	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133,00	133		125		120		115		110		110	BPBD	
1	1	0	1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					1,458,883,000.00		1,175,160,000.00		2,048,760,000.00		1,222,170,000.00		1,222,170,000.00		7,127,143,000.00	
					Indek Ketahanan Daerah	%	0,00	0,00		0,00		0,42		0,53		0,65		0,65		
1	1	1	2	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100	Diskominfo	
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08		89		89.55		90		90		90		
1	2	1	1	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik					18,879,736,400.0 0		13,144,748,000.00		11,662,000,000.00		13,670,540,000.0 0		13,670,540,000.00		71,027,564,400.00	
					Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	10,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		

Kode			TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab			
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1			2		3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2					Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur																
2	1		Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	50	100		100			100		100		100		100		SEKRETARIS DAERAH	
2	1	1	Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	50	60		70			80		85		90		90		Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
2	1	2	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74.45	0.00		0.00			100		100		100		100		DPUPR	
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83	0.00		0.00			93.5		95.9		100		100			
11	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					803,919,019,223		947,142,635,132		511,896,479,600		691,693,630,000		724,141,190,000		3,678,792,953,955			
				Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m)	%	46,75	0,00		0,00		64,94		67,53		71,43		71,43				
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74,45	79,56		84,67		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83,00	86,30		89,70		93,50		95,90		100,00		100,00				

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km)	%	0,00	0,00		0,00		10,00		35,00		55,00		100,00			
2	1	3	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	15,51	0.00		0.00		32.65		37.09		42.42		42.42		DPUPR	
				Persentase layanan irigasi	Ha	15.118,5	0.00		0.00		18.11 0.58		19.38 7.46		20.888 .19		20.888. 19			
				Persentase penyediaan prasarana air baku	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100			
1 1	0 3	1 7	Program Pembangunan Sumberdaya Air					179,949,467,170. 00		173,618,060,200.0 0		117,492,300,000.0 0		118,976,000,000. 00		123,735,040,000.0 0		713,770,867,370		
				Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi	Ha	15.118,5 0	15.332 ,98		16.72 1,78		18.11 0,58		19.38 7,46		20.888 ,19		20.888, 19			
				Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi	%	46,21	51,59		56,97		62,56		68,06		73,56		73,56			
				Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir	%	15,51	20,89		26,27		31,89		37,39		42,89		42,89			
2	1	4	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80.00	0.00		0.00		87.50		90.00		92.50		92.50		DPUPR	
1 1	0 3	1 8	Program Penataan Ruang					5,240,233,500.00		5,411,717,600.00		4,892,240,000.00		6,032,000,000.00		6,240,000,000.00		27,816,191,100		
				Persentase Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang (RTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi	%	0,00	0,00		0,00		62,50		75,00		100,00		100,00			
				Presentase Kesesuaian Pembinaan Pemanfaatan Ruang	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	1	5	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375.29	114.60		203.20		274.60		333.30		375.29		375.29		DPRKP	
				Persentase Rumah Layak Huni	%	82.86	84.02		85.18		86.34		87.50		88.66		88.66			
				cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		80.00			
1145	045		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan					192,116,720,475.00		112,362,260,000.00		116,771,150,000.00		104,000,000,000.00		108,160,000,000.00		633,410,130,475		
				Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	375,29	114,60		203,20		274,60		333,30		333,30		333,30			
				cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	%	0,00	0,00		0,00		33,33		33,33		33,33		100,00			
				Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	%	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
1147	047		Program Keciptakaryaan					46,440,619,695.00		119,434,000,000.00		54,535,380,000.00		62,400,000,000.00		62,400,000,000.00		345,209,999,695		
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	%	0,00	0,00		0,00		81,24		88,04		96,53		96,53			
				cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	%	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00			
				Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota	%	0,00	0,00		0,00		5,00		15,00		100,00		100,00			

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	1	6	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	0.00	0.00		0.00		75.00		88.00		100.00		100.00		DPRKP	
1	0	1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan					175,609,091,130.00		263,596,440,000.00		752,040,600,000.00		422,719,750,000.00		124,592,410,000.00		1,738,558,291,130		
				Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	%	0.00	28.00		69.00		83.00		89.00		100.00		100.00			
				Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	%	0,00	25,00		50,00		75,00		88,00		100,00		100,00			
				Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	%	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
2	1	8	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0	10		20		20		20		20		90		Dinas Perhubungan	
1	0	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan					5,249,682,527.00		11,690,000,000.00		5,936,900,000.00		11,157,600,000		11,157,600,000.00		45,191,782,527		
				Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	%	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00			
				Persentase ketersediaan dan	%	0,00	0,00		0,00		30,77		30,77		38,46		100,00			

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab			
								2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				pemeliharaan Prasarana Transportasi																	
				Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	%	0,00	0,00		0,00		15,00		15,00		20,00		50,00				
2	1	8		Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	0.00	0.00		0.00		100.0 0		100.0 0		100.00		100.00		Dinas Perhubung an	
1 2	0 9	1 6		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan				4,051,686,000.00		3,150,000,000.00		20,598,365,000.00		18,755,310,000.0 0		18,755,310,000.00		65,310,671,000			
				Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan	%	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00				
2	1	9		Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	%	95.2	97		98		99		100		100		100		DINAS ESDM	
2 0	0 5	1 6		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				20,815,338,500.0 0		21,886,450,000.00		21,641,390,000.00		22,761,910,000.0 0		22,761,910,000.00		109,866,998,500			
				Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan	ss	10.000,0 0	10.000 ,00		10.00 0,00		10.00 0,00		10.00 0,00		10.000 ,00		50.000, 00				
2	1	9		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	0	2.6		3		3.6		3.9		4		4		DINAS KOMINFO	
1 2	1 0	1 5		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi				12,736,064,600.0 0		15,078,782,000.00		15,968,430,000.00		15,681,940,000.0 0		15,681,940,000.00		75,147,156,600			

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase penyediaan perangkat teknologi informsi dan komunikasi (TIK)	%	12,41	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00	
				Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	12,41	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00	
3				Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas														
3	1			Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	%	70.96	71.77		72.2		72.75		73.21		73.68		73.68	SERETARIS DAERAH
				Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,39	0.39		0.39		0,370		0,365		0,360		0,360	
				Kemiskinan	%	5.42	5.13		5		5,12		5,06		5,00		5,00	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.92	8.45		8.2		8,19		8,03		7,84		7,84	
3	1	1		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Thn	12.7	13		13.5		14		14.5		15		15	Asisten Kesejahtera an Rakyat
				Rata rata lama sekolah	Thn	8.37	8.47		8.7		8.9		9.1		9.3		9.3	
3	1	2		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	%	0	0		0		100		100		100		100	
3	1	3		Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100	
3	1	4		Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Nilai	91.39	91.67		91.95		92.23		92.51		92.79		92.79	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																				
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																					
1				2			3				4			5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
3	1	5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71.13	72.9		74.67		76.45		78.22		80		80																			Kadis Dindikbud			
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57.21	58.77		60.33		61.88		63.44		65		65																						
				Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100																						
1 1	0 1	2 0	Program Pendidikan Menengah Atas					0.00		0.00		39,522,720,000.00		111,492,258,056. 29		111,492,258,056.2 9		262,507,236,113																					
				Angka Putus Sekolah SMA	%	0,25	0.00		0.00		0,16		0,13		0,10		0,10																						
				Angka Kelulusan SMA	%	98,83	0.00		0.00		99,07		99,28		99,49		99,49																						
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA	%	50,70	0.00		0.00		54,48		55,74		57,00		57,00																						
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS	%	47,60	0.00		0.00		50,84		51,92		53,00		53,00																						
				Persentase Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	0.00	0.00		0.00		50.00		55.00		60.00		60.00																						
				Persentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B	%	0.00	0.00		0.00		70,00		75,00		80.00		80.00																						
1 1	0 1	2 1	Program Pendidikan Menengah Kejuruan					0.00		0.00		31,734,587,000.00		89,522,197,943.7 1		89,522,197,943.71		210,778,982,887																					
				Angka Putus Sekolah SMK	%	0,50	0.00		0.00		0,32		0,26		0,20		0,20																						
				Angka Kelulusan SMK	%	99,87	0.00		0.00		99,92		99,93		99,95		99,95																						
				Nilai Rata-rata Ujian SMK	%	54,70	0.00		0.00		57,10		57,90		58,70		58,70																						

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD															
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp														
1				2			3				4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	
					Persentase SMK yang menerapkan link and match	%	10,00	0.00		0.00			51,00		68,00		85,00		85,00													
					Persentase Lulusan SMK yang terserap di pasar kerja	%	0.00	0.00		0.00			80.00		85.00		90.00		90.00													
11	01	16	Program Pendidikan Khusus						13,388,500,000.00		11,238,432,000.00		17,150,000,000.00		9,016,270,000.00		9,784,770,000.00		60,577,972,000													
					Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus	%	15.00	17.00		34.00		51.00		68.00		85.00		85.00														
3	1	7	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0	10		20		30		40		45		45															DISPORA
				Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0	10		20		30		40		45		45															
12	13	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan					8,479,512,000.00		8,141,070,000.00		4,963,685,000.00		8,466,720,000.00		8,466,720,000.00		38,517,707,000														
					Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri	%	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		100,00		100,00														
3	1	7	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.74	69.54		70.34		71.14		71.94		72.74		72.74														DP3AKB	
12	02	17	Program Pemberdayaan Perempuan					0.00		0.00		1,800,000,000.00		3,443,860,000.00		3,443,860,000.00		8,687,720,000														
					Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleman	%	0,00	0,00		0,00		15,29		16,47		17,64		17,64														
					Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi	%	0,00	0,00		0,00		32,13		33,13		34,13		34,13														

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan	%	0,00	0,00		0,00		16,67		20,00		23,33		23,33		
				Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender	%	0,00	0,00		0,00		82,22		93,33		100,00		100,00		
3	1	9		Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	25.1	0.00		0.00		40.00		45.00		50.00		50.00	DPAD
1 2	1 7	1 5		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				2,784,654,500.00		1,427,000,000.00		1,215,000,000.00		1,484,080,000.00		1,484,080,000.00		8,394,814,500	
				Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah	%	75,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
3	1	10		Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	8.24	4.49		3.89		3.3		2.68		2.08		2.08	DINSOS
1 1	0 6	1 8		Program Penangan Fakir Miskin				1,545,318,000.00		650,000,000.00		560,000,000.00		676,000,000.00		676,000,000.00		4,107,318,000	
				Cakupan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota	Kab/ kota	0,00	0,00		0,00		8,00		8,00		8,00		8,00		
3	1	11		Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58.06	59.01		60.01		5.69		5.72		5.74		5.74	DISNAKERT RANS
1 2	0 1	1 5		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja				3,796,056,000.00		2,848,484,000.00		4,523,494,000.00		2,962,430,000.00		2,962,430,000.00		17,092,894,000	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	%	4,31	4,35		4,40		4,42		4,44		4,46		4,46			
4				Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas																
4		1		Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan		69.46	69.76		70.06		70.36		70.66		70.96		70.96		SEKRETARIS DAERAH	
4		1	1	Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jml	308	304		300		290		290		285		285	Asisten Kesejahtera an Rakyat	
					Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jml	32	31		30		29		28		26		26		
4		1	2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jml	247	247		242		237		232		227		227	DINKES	
					Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jml	1149	1149		1144		1139		1134		1129		1129		
1 1	0 2	1 5		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat					6,628,400,000.00		6,015,060,000.00		2,206,500,000.00		6,255,670,000.00		6,255,670,000.00		27,361,300,000	
					Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	45,00	65,00		81,00		86,00		90,00		94,00		94,00		
					Prevalensi Stunting	%	0,00	0,00		0,00		24,60		23,60		23,60		23,60		
					Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/ kota	0,00	0,00		0,00		7,00		8,00		8,00		8,00		
4		1	3	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75	90		100		100		100		100		100	DINKES	
1 1	0 2	1 6		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					65,562,430,841.0 0		155,379,175,000.0 0		253,936,000,000.0 0		245,594,350,000. 00		245,594,350,000.0 0		966,066,305,841	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	%	75,00	90,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
		Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium)	%	45,00	65,00		81,00		86,00		90,00		94,00		94,00			
		Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat	%	10,00	20,00		35,00		50,00		75,00		90,00		90,00			
		Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan	%	0,00	20,00		30,00		40,00		50,00		50,00		50,00			
4	1	4	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	0.00	60		65		70		75		80		DINKES/ RSUD	
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	0.00	60		65		65		70		70			
1 1	0 2	1 7	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD Banten)			88,864,205,844.0 0		77,018,902,727.00		90,613,209,413.00		61,127,922,000.0 0		61,127,922,000.00		378,752,161,984		
			Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM pelayanan keperawatan RSUD Banten	%	0,00	0,00		0,00		90,00		93,00		93,00		93,00		
			Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	%	88,00	88,00		88,00		90,00		93,00		93,00		93,00		
			Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	%	70,00	70,00		70,00		90,00		93,00		93,00		93,00		

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1				2				3								4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Capaian Pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten dan presentase kelengkapan pengisian rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan (Satuan: %)	%	0,00	0,00		0,00		85,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab			
								2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Tingkat Inflasi	%	2.94	3.7		4.2		4		4		4		4			
5	1	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	0.00	0.00		0.00		6		6.2		6.4		6.4		Asisten Ekonomi dan Pembangun an		
5	1	2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	0.00	0.00		0.00		2.8		2.9		3		3				
5	1	3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100				
5	1	4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100						
5	1	5	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	52.3	0.00		0.00		49.00		51.30		53.90		53.90		DINAS PMPTSP		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82.16	85.09		85.22		85.47		85.72		85.97		85.97				
1 2	1 2	1 5	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi						3,867,933,240.00		2,891,390,000.00		2,250,000,000.00		3,007,050,000.00		3,007,050,000.00		15,023,423,240		
				Jumlah calon investor yang mendaftar	Investor	0,00	0,00		0,00		1000, 00		1000, 00		1000,0 0		1000,0 0				
				Jumlah Kerjasama BUMD	BUMD	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00				
5	1	6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	3.05	3.7		3.95		4.2		4.45		4.7		4.7		DINAS PERINDAG		
2 0	0 7	1 5	Program Peningkatan Daya Saing Industri						2,320,140,000.00		4,548,563,000.00		2,300,000,000.00		4,730,510,000.00		4,730,510,000.00		18,629,723,000		

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match	Jml	0,00	0,00	0,00	18,00		18,00		18,00		54,00		
				Persentase Pertumbuhan Produk Ekspor industri yang berbasis sumber daya alam dan atau Lokal	%	0,00	0,00	0,00	3,00		3,00		4,00		10,00		
5	1	7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	3.82	4.9	5.4	5.9		6.4		6.9		6.9		DINAS PERINDAG
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	0.00	0.00	0.00	4		4		4		4		
2 0	0 6	1 5	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri				1,807,687,500.00		3,917,439,800.00		2,650,000,000.00		4,074,140,000.00		4,074,140,000.00		16,523,407,300
				Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah	%	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		
				Neraca ketersediaan barang pokok	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
				Peningkatan Persentase Produk Lokal yang beredar pada Retail Modern	%	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00		10,00		30,00		
				Jumlah Komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka	Komoditi	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00		2,00		6,00		
2 0	0 6	1 6	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri				1,071,557,000.00		1,586,966,000.00		1,550,000,000.00		1,650,450,000.00		1,650,450,000.00		7,509,423,000
				Surplus Neraca Perdagangan	Triliyun	2828,83	2970,27	3118,79	3274,72		3438,46		3610,38		3610,38		
				Calon eksportir baru	Eksp	0,00	0,00	0,00	5,00		5,00		5,00		15,00		

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor	Jml	0,00	0,00		0,00		6,00		6,00		6,00		18,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Capaian Produksi Tanaman Kelapa	Ton	43116,0 0	43978, 00		44858 ,00		4575 5,00		4667 0,00		47604, 00		47604, 00		
				Penyediaan Benih Sumber tanaman perkebunan (Kakao, Kelapa)	Batang	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		300,00		
				Pengamanan Produksi Tanaman Perkebunan dari gangguan serangan OPT dan DPI	%	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
				Pengawasan Benih Perkebunan	Komoditi	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
2 0	0 3	1 8		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan				1,931,445,925.00		3,937,665,925.00		4,963,800,000.00		4,095,180,000.00		4,095,180,000.00		19,023,271,850	
				Peningkatan Produksi Daging	Ton	33,52	33,52		34,18		1451 35,00		1479 78,00		15088 1,00		443998 ,00		
				Peningkatan Capaian Retribusi UPTD BP3T	%	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00		
5	1	9		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	%	4,48	0.00		0.00		4,72		4,80		4,93		4,93		DINA KELAUTAN DAN PEIKANAN
2 0	0 1	1 5		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				2,188,586,493.00		3,824,455,000.00		2,912,700,000.00		3,977,440,000.00		3,977,440,000.00		16,880,621,493	
				Persentase Produksi Perikanan	%	7,49	8,01		8,08		8,16		8,23		8,61		8,62		
				Persentase capaian kinerja pelayanan usaha kepelabuhanan	%	0,00	0,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00		
				Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Provinsi Banten	%	0,00	0,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00		

Kode			TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten	%	0,00	0,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00		
5	1	10	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82.40	89.20		90.60		83.50		84.50		85.00		85.00			DINAS KETAPANG
12	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					989,783,400.00		2,300,670,225.00		1,937,810,000.00		2,392,700,000.00		2,392,700,000.00		10,013,663,625		
				Ketersediaan pangan	%	93,90	95,10		96,30		93,50		94,50		95,00		95,00			
5	1	11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	2.84	0		0		2.99		3.04		3.09		3.09			DINAS PARIWISAT A
20	02	18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					2,696,897,400.00		2,404,926,350.00		2,350,000,000.00		2,501,130,000.00		2,501,130,000.00		12,454,083,750		
				Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Sapta Pesona	%	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00			
5	1	12	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	NA	0.00		0.00		6		6		6		18			DISKOP UKM
12	11	16	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi					763,425,000.00		1,075,493,000.00		1,050,000,000.00		2,368,520,000.00		2,368,520,000.00		7,625,958,000		
				Capaian Koperasi Aktif	%	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		30,00			
5	1	13	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	NA	0.00		0.00		1		1		1		3			DISKOP UKM
12	11	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil					2,234,167,200.00		2,125,116,000.00		1,575,000,000.00		3,509,510,000.00		3,509,510,000.00		12,953,303,200		

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain	%	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
5	1	1	4	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43.67	44.17		44.67		50.87		51.83		52.79		52.79		DINAS LHK
1	0	1		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup					5,415,175,900.00		4,199,900,000.00		3,073,746,000.00		4,367,900,000.00		4,367,900,000.00		21,424,621,900	
				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Klp		203,00	52,00		60,00		68,00		76,00		78,00		334,00		
				Indeks Kualitas Air	Nilai		51,00	51,50		52,00		52,50		53,00		53,50		53,50		
				Indeks Kualitas Udara	Nilai		58,80	59,00		59,20		66,80		68,80		70,80		70,80		
				Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%		0,00	0,00		0,00		16,90		17,60		19,00		19,00		
5	1	1	5	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30.6	31.21		31.71		32.21		32.71		33.21		33.21		DINAS LHK
2	0	1		Program Perencanaan dan Pemanfaatn Hutan					0.00		0.00		1,300,000,000.00		1,801,152,000.00		1,801,152,000.00		4,902,304,000	
				Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat			0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan: Kelompok)	Klp		0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		9,00		

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1				2				3								4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klp	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

6.6 PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PROVINSI BANTEN

Tingginya potensi ekonomi daerah disertai adanya pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten tentunya dapat meningkatkan target kinerja perekonomian terutama di sektor infrastruktur dengan banyaknya proyek pembangunan berskala besar dengan besarnya anggaran yang dibelanjakan. Dampak positif dari pembangunan tersebut haruslah bersifat *effect multiplier* (efek pengganda).

Tabel 6.9
Proyek Strategis

No	Rencana Proyek
1	Kerjasama pendirian Banten <i>Mangrove Center</i>
2	Kerjasama pengelolaan Situ
3	SPAM Regional
4	Pengelolaan Sampah Terpadu
5	Sport Center Provinsi Banten
6	<i>Public facilities</i> terkait pembangunan Tol Serang – Panimbang
7	<i>Public facilities</i> terkait pembangunan Waduk Karian dan Sindang Heula
8	Revitalisasi Banten Lama

Proyek strategis daerah pada tabel 6.9 diperlukan anggaran yang sangat besar, dengan terbatasnya kapasitas fiskal, pemerintah Provinsi Banten harus mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan proyek strategis tersebut. Ada beberapa skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan dan dimungkinkan oleh aturan yang berlaku. Alternatif pembiayaan pembangunan diantaranya yaitu melalui Skema Pembiayaan Investasi Non Pemerintah (PINA), KPBU dan Obligasi (pinjaman) Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Provinsi Banten, sehingga perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain serta.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL / *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejauh ini, sudah cukup

banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema tersebut hanya belum dapat diklaim mengingat belum tertuang didalam RPJMD. Namun demikian, sinergi antara kegiatan TJSKBL dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat perlu dioptimalisasi baik dari sisi koorporate maupun Pemerintah Provinsi Banten didalam pengelolaannya.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Provinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintahan Provinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran per PD beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per PD untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung, adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2022 Provinsi Banten

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n+2)	Tahun 2021 (Tahun n+3)	Tahun 2022 (Tahun n+4)
1			2	3	4	5	6	7
			KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
5			BELANJA	11.055.264.730.612	12.154.531.396.800	12.854.498.603.650	13.002.532.723.000	13.305.715.000.000
5	1		Belanja Tidak Langsung	1.849.085.000.000	2.218.718.430.000	2.488.504.853.650	2.595.032.413.000	2.913.139.010.250
5	1	1	Belanja Pegawai	1.849.085.000.000	2.218.718.430.000	2.488.504.853.650	2.595.032.413.000	2.913.139.010.250
5	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5	1	4	Belanja Hibah	2.132.051.721.820	2.310.418.836.000	2.280.418.830.000	2.280.418.830.000	2.280.418.830.000
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	69.735.000.000	105.979.000.000	105.979.000.000	105.979.000.000	105.979.000.000
5	1	6	Belanja Bagi Hasil	2.370.396.604.634	2.502.794.028.200	2.874.861.200.000	2.986.514.740.000	3.076.706.299.750
5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	464.093.476.400	432.693.476.400	432.693.470.000	432.693.470.000	472.693.470.000
5	1	8	Belanja Tidak Terduga	19.189.017.758	55.430.000.000	45.000.000.000	63.000.000.000	64.000.000.000
5	2		Belanja Langsung	4.150.713.910.000	4.528.497.626.200	4.627.041.250.000	4.538.894.270.000	4.392.778.390.000
5	2	1	Belanja Pegawai	266.963.509.100	55.587.557.000	76.879.822.000	90.777.880.000	87.855.560.000
5	2	2	Belanja Modal	2.119.833.963.595	2.785.054.925.626	2.609.020.656.47	2.723.336.554.000	2.504.922.830.000
5	2	3	Belanja Barang dan Jasa	1.763.916.437.305	1.687.855.143.574	1.941.140.771.530	1.724.779.836.000	1.800.000.000.000

Selain itu, dalam pembahasan juga diuraikan Program Pembangunan Daerah dan indikator kinerja, capain kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Bidang urusan dan OPD penanggung jawab. Bidang urusan dan Program Prioritas pembangunan yang dimaksud dan PD penanggung jawab dapat dilihat dibawah ini :

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.2 untuk Sebelum Perubahan, rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan setelah perubahan diuraikan pada tabel 7.3, berikut lampir :

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Banten (Sebelum Perubahan)

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program			Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab															
												2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD													
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp												
1			2			3			4			5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
11			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																																		
11	01		Pendidikan					793,254,200,000			817,418,200,000			-		-			-																		
11	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan					40,708,300,000			40,826,500,000			-		-			-																Dindikbud		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala)		2,50	2,80			3,00			-		-			-		-															Seluruh OPD		
11	01	15	Program Pendidikan Menengah					724,856,659,000			746,599,800,000			-		-			-																Dindikbud		
			1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)		71,13	72,90			74,67			-		-			-		-															Bid. SMA dan Bid. SMK		
			2	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)		57,21	58,77			60,33			-		-			-		-															Bid. SMA dan Bid. SMK		
			3	Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)		0,25	0,22			0,19			-		-			-		-															Bid. SMA		
			4	Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)		0,50	0,44			0,38			-		-			-		-															Bid. SMK		
			5	Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)		98,83	98,64			98,85			-		-			-		-															Bid. SMA		
			6	Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)		99,87	99,89			99,90			-		-			-		-															Bid. SMK		
			7	Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)		50,70	51,96			53,22			-		-			-		-															Bid. SMA		
			8	Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)		54,70	55,50			56,30			-		-			-		-															Bid. SMK		
			9	Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)		47,60	48,68			49,76			-		-			-		-															Bid. SMA		
			10	Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)		10,00	17,00			34,00			-		-			-		-															Bid. SMK		
11	01	16	Program Pendidikan Khusus					9,795,900,000			9,991,900,000			-		-			-																Dindikbud		
			1	Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)		15,00	17,00			34,00			-		-			-		-															BID. PENDIDIKAN KHUSUS		
11	01	17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					16,043,341,000			18,000,000,000			-		-			-																Dindikbud		
			1	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai)		56,23	56,98			57,74			-		-			-		-															BID. Ketenagaan dan Kelembagaan		
			2	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)		64,57	64,86			65,14			-		-			-		-															BID. Ketenagaan dan Kelembagaan		
			3	Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)		95,26	96,21			97,16			-		-			-		-															BID. Ketenagaan dan Kelembagaan		
			4	Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)		48,28	54,63			60,97			-		-			-		-															BID. Ketenagaan dan Kelembagaan		
11	01	18	Program Peningkatan Mutu Pembelajaran					1,850,000,000			2,000,000,000			-		-			-																Dindikbud		
			1	Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)		10,00	20,00			30,00			-		-			-		-															Balai Tekom		
11	02		Kesehatan					412,970,000,000			557,510,400,000			-		-			-																		
11	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan					151,236,543,114			257,728,421,860			-		-			-																Dinkes		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))		2,50	2,80			3,00			-		-			-		-															Sekretariat Dinas, TU		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
11	02	15	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat						1,711,000,000				2,075,000,000				-				-			-								Dinkes		
				1	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	45,00	65,00		81,00		-		-		-		-				-			-								BID. KESEHATAN MASYARAKAT		
				2	Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		-		-		-		-				-			-								BID. KESEHATAN MASYARAKAT		
				3	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	50,00	55,00		60,00		-		-		-		-				-			-								BID. KESEHATAN MASYARAKAT		
11	02	16	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan						128,581,505,000				132,300,000,000				-				-			-								Dinkes		
				1	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	75,00	90,00		100,00		-		-		-		-				-			-								BID. PELAYANAN KESEHATAN		
				2	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	45,00	65,00		81,00		-		-		-		-				-			-								BID. PELAYANAN KESEHATAN		
				3	Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	10,00	20,00		35,00		-		-		-		-				-			-								BID. PELAYANAN KESEHATAN		
				4	Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	0,00	20,00		30,00		-		-		-		-				-			-								BID. PELAYANAN KESEHATAN		
11	02	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan						118,901,451,886				146,306,978,140				-				-			-								Dinkes		
				1	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Bantent (Satuan: %)	70,00	70,00		70,00		-		-		-		-				-			-								RSUD BANTEN		
				2	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	88,00	88,00		88,00		-		-		-		-				-			-								RSUD BANTEN		
				3	Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan: %)	70,00	70,00		75,00		-		-		-		-				-			-								RSUD BANTEN		
				4	Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	50,00	60,00		70,00		-		-		-		-				-			-								RSUD MALINGPING		
				5	Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	30,00	40,00		50,00		-		-		-		-				-			-								RSUD MALINGPING		
				6	Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	50,00	60,00		70,00		-		-		-		-				-			-								RSUD MALINGPING		
11	02	18	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit						2,200,000,000				2,650,000,000				-				-			-								Dinkes		
				1	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	60,00	75,00		85,00		-		-		-		-				-			-								BID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
11	02	19	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian																													Dinkes		
			1	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang)	0,00	70,00		170,00		-		-		-		-		-														BID. SUMBERDAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN		
			2	Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00		80,00		-		-		-		-		-														BID. SUMBERDAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN		
			3	Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	40,00	50,00		60,00		-		-		-		-		-														BID. SUMBERDAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN		
11	02	20	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah																													Dinkes		
			1	Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	27,00	32,00		37,00		-		-		-		-		-														BALAI. LABKESDA		
11	02	21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat																													Dinkes		
			1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)	5,00	6,40		6,40		-		-		-		-		-														BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT		
11	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																															
11	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan																													DPUPR		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-		-														Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT		
11	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																													DPUPR		
			1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	74,45	79,56		84,67		-		-		-		-		-														BID. BINA MARGA dan BALAI JALAN & JEMBATAN		
			2	Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	26,60	27,20		28,99		-		-		-		-		-														BID. BINA MARGA		
			3	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	83,00	86,30		89,70		-		-		-		-		-														BID. BINA MARGA		
11	03	18	Program Penataan Ruang																													DPUPR		
			1	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	25,00		37,50		-		-		-		-		-														BID. TATA RUANG		
11	03	16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi																													DPUPR		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1	Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	0,00	10,00		20,00		-		-		-		-		UPT PBB
11	03	17		Program Pembangunan Sumberdaya Air				148,491,294,800		148,491,294,800		-		-		-			DPUPR
				1	Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	15,51	20,89		26,27		-		-		-		-		BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air
				2	Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha)	15.118,50	15.332,98		16.721,78		-		-		-		-		BID.Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air dan BALAI PSDA
				3	Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	46,21	51,59		56,97		-		-		-		-		BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air
11	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				184,986,500,000		188,532,600,000			-		-		-		
11	04	01		Program Tata Kelola Pemerintahan				8,986,500,000		9,012,600,000			-		-		-		DPRKP
				1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-		Sekretariat Dinas dan UPT KP3B
11	04	15		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan				87,434,896,540		89,954,896,540			-		-		-		DPRKP
				1	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375,29	114,60		203,20		-		-		-		-		BID. KAWASAN PERMUKIMAN
				2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	82,86	84,02		85,18		-		-		-		-		BID. PERUMAHAN
11	04	16		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				26,875,000,000		27,875,000,000			-		-		-		DPRKP
				1	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	25,00		50,00		-		-		-		-		
				2	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	28,00		69,00		-		-		-		-		
11	04	17		Program Keciptakaryaan				61,690,103,460		61,690,103,460			-		-		-		DPRKP
				1	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	71,05	72,75		76,15		-		-		-		-		BID. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
				2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	67,94	72,86		75,57		-		-		-		-		BID. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
				3	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0,00	0,00		20,00		-		-		-		-		BID. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
11	05			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				65,449,500,000		66,427,800,000			-		-		-		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan					19,343,300,000		19,399,400,000		-		-		-			Badan Kesbangpol, BPBD, Satpolpp
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80			3,00		-		-		-		-		Sekretariat Dinas/Badan
11	05	15	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum					6,000,000,000		6,000,000,000		-		-		-			Satpolpp
			1	cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		-		-		-		-		BID.ketentraman ketertiban umum
11	05	16	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					3,570,445,500		4,141,528,000		-		-		-			BPBD
			1	Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		-		-		-		-		BIDANG Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
11	05	17	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan					2,909,968,000		3,000,000,000		-		-		-			Badan Kesbangpol
			1	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)	5,00	22,00			24,00		-		-		-		-		Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
11	05	18	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah					850,000,000		900,000,000		-		-		-			Satpolpp
			1	Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70,00	75,00			75,00		-		-		-		-		BID. Penegakan Perundang-undangan Daerah
11	05	19	Program Perlindungan Masyarakat					600,000,000		700,000,000		-		-		-			Satpolpp
			1	Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		-		-		-		-		BID.Perlindungan Masyarakat
11	05	20	Program Penanganan Bencana Kebakaran					9,049,600,000		9,049,600,000		-		-		-			Satpolpp
			1	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		-		-		-		-		BID. DAMKAR
11	05	21	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					5,900,237,000		6,000,000,000		-		-		-			BPBD
			1	Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		-		-		-		-		BIDANG Kedaruratan Dan Logistik
11	05	22	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana					7,028,917,500		7,028,917,500		-		-		-			BPBD
			1	Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		-		-		-		-		BIDANG Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
11	05	23	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional							2,939,642,000			2,950,964,500			-			-			-					-					Badan Kesbangpol		
			1	Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	0,00		100,00			100,00			-			-			-			-				-						Bidang Kewaspadaan Nasional		
11	05	24	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi							3,516,410,000			3,516,410,000			-			-			-				-						Badan Kesbangpol		
			1	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70,00		70,00			70,00			-			-			-			-				-						Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi		
11	05	25	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat							3,740,980,000			3,740,980,000			-			-			-				-						Badan Kesbangpol		
			1	Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	70,83		0,00			0,00			-			-			-			-				-						Bidang Fasilitas Pembinaan Politik		
			2	Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	62,78		0,00			0,00			-			-			-			-				-								
			3	Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	68,66		0,00			70,00			-			-			-			-				-								
			4	Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)	56,67		65,00			0,00			-			-			-			-				-								
11	06		Sosial							18,692,000,000			18,940,200,000			-			-			-				-								
11	06	01	Program Tata Kelola Pemerintahan							7,352,300,000			7,373,700,000			-			-			-				-						Dinsos		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50		2,80			3,00			-			-			-			-				-						Sekretariat Dinas dan TU Balai		
11	06	15	Program Rehabilitasi Sosial							1,764,850,000			1,764,850,000			-			-			-				-						Dinsos		
			1	Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang)	1.429,00		573,00			608,00			-			-			-			-				-						BID. Rehabilitasi Sosial		
11	06	16	Program Pemberdayaan Sosial							1,827,417,000			1,877,417,000			-			-			-				-						Dinsos		
			1	Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial (Satuan: Orang)	1.624,00		1.505,00			1.520,00			-			-			-			-				-						Bid. Pemberdayaan Sosial		
11	06	17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							3,220,048,000			3,220,048,000			-			-			-				-						Dinsos		
			1	Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %)	100,00		100,00			100,00			-			-			-			-				-						BID. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
			2	Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang)	2.120,00		1.300,00			1.300,00			-			-			-			-				-						BID. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
			3	Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk)	48.150,00		30.000,00			25.000,00			-			-			-			-				-						BID. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
11	06	18	Program Penangan Fakir Miskin							2,200,359,000			2,200,359,000			-			-			-				-						Dinsos		
			1	Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk)	1.850,00		940,00			949,00			-			-			-			-				-						BID. Penangan Fakir Miskin		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
11	06	19	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti						935,000,000			1,111,800,000			-			-			-											Dinsos		
			1	Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang)	390,00	110,00		110,00			-			-			-			-												Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial		
11	06	20	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti						1,392,026,000			1,392,026,000			-			-			-											Dinsos		
			1	Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang)	280,00	160,00		230,00			-			-			-			-												Balai Perlindungan Sosial		
12			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																															
12	01		Ketenaga Kerjaan						49,651,400,000			50,304,700,000			-			-			-													
12	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan						19,877,200,000			19,935,000,000			-			-			-												Disnakertrans	
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00			-			-			-			-												Sekretariat Dinas dan BLKI		
12	01	15	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja						5,831,730,000			5,831,730,000			-			-			-											Disnakertrans		
			1	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4,31	4,35		4,40			-			-			-			-												BID. Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja, DAN BLK		
12	01	16	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan						5,700,000,000			5,900,000,000			-			-			-											Disnakertrans		
			1	Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	2,93	3,66		4,40			-			-			-			-												BID. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
			2	Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10,00	10,00		10,00			-			-			-			-												BID. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
			3	Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9,49	9,51		9,53			-			-			-			-												BID. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
12	01	17	Program Pengawasan Ketenagakerjaan						6,946,075,000			6,946,075,000			-			-			-											Disnakertrans		
			1	Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	2,92	2,98		3,04			-			-			-			-												BID. Pengawasan Ketenagakerjaan		
12	01	18	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi						5,600,000,000			5,895,500,000			-			-			-											Disnakertrans		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1	Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	14,95	15,25		15,55		-		-		-		-			BID. Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	01	19	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri				5,696,395,000	5,796,395,000		-		-		-					Disnakertrans
			1	Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1,25	1,25		1,26		-		-		-		-			BLK
12	02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				10,751,600,000	10,913,100,000		-		-		-					
12	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				3,132,500,000	3,141,600,000		-		-		-		-			DP3AKKB
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-			Sekretariat Dinas
12	02	15	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				3,806,605,000	3,856,605,000		-		-		-					DP3AKKB
			1	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	50,00	60,00		63,33		-		-		-		-			Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
			2	Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50,00	50,00		55,00		-		-		-		-			Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
			3	asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58,72	58,72		62,27		-		-		-		-			Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
			4	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	70,00	75,00		75,00		-		-		-		-			Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
			5	Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %)	65,19	66,66		67,62		-		-		-		-			Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
12	02	16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				3,812,495,000	3,914,895,000		-		-		-					DP3AKKB
			1	Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	75,00	85,00		95,00		-		-		-		-			Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
			2	Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %)	75,00	85,00		95,00		-		-		-		-			Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
			3	Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	75,00	60,00		63,33		-		-		-		-			Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
12	03		Pangan				12,868,300,000	13,070,600,000		-		-		-					
12	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				3,226,900,000	3,236,300,000		-		-		-		-			Dinas Ketapang
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-			Sekretariat Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
12	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						3,298,272,500			3,491,172,500			-		-															Dinas Ketapang		
			1		Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93,90	95,10			96,30			-		-		-			-							-					Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan		
12	03	16	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan						3,057,019,000			3,057,019,000			-		-															Dinas Ketapang		
			1		Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	80,09	82,50			85,50			-		-		-			-							-					Bidang Keterjangkauan Pangan		
12	03	17	Program Perlindungan Konsumen Pangan						3,286,108,500			3,286,108,500			-		-															Dinas Ketapang		
			1		Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	73,21	90,00			90,00			-		-		-			-							-					Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		
12	05		Lingkungan Hidup						29,061,100,000			29,370,200,000			-		-																	
12	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan						15,918,800,000			15,965,100,000			-		-																DLHK	
			1		Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80			3,00			-		-		-			-							-					Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT		
12	05	15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup						13,142,300,000			13,405,100,000			-		-															DLHK		
			1		Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	51,00	51,50			52,00			-		-		-			-							-					Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran & UPT Lab Lingkungan		
			2		Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	58,80	59,00			59,20			-		-		-			-							-					Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran & UPT Lab Lingkungan		
			3		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	203,00	52,00			60,00			-		-		-			-							-					Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas		
12	06		Administrasi Kependudukan dan Sipil						880,000,000			897,600,000			-		-																	
12	06	15	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						880,000,000			897,600,000			-		-															DP3AKKB		
			1		Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	60,00	64,86			67,38			-		-		-			-							-					Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		
			2		Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	20,00	23,33			30,81			-		-		-			-							-					Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		
			3		Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	80,00	85,76			86,47			-		-		-			-							-					Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			4	Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)		77,00		79,19				80,99				-				-				-				-				Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		
			5	Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)		80,00		85,00				100,00				-				-				-				-				Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		
12	07		Pemberdayaan Masyarakat Desa							12,669,000,000				12,868,800,000				-				-				-								
12	07	01	Program Tata Kelola Pemerintahan							3,132,500,000				3,141,600,000				-				-				-						Dinas PMD		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))		2,50		2,80				3,00				-				-				-				-				Sekratraiat Dinas		
12	07	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa							4,031,500,000				4,131,500,000				-				-				-						Dinas PMD		
			1	Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa)		158,00		2,00				2,00				-				-				-				-				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
			2	Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)		1.022,00		2,00				2,00				-				-				-				-				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
12	07	16	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan							3,085,000,000				3,125,000,000				-				-				-						Dinas PMD		
			1	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: Jumlah)		1.022,00		41,00				41,00				-				-				-				-				Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		
12	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa							2,420,000,000				2,470,700,000				-				-				-						Dinas PMD		
			1	Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: Jumlah)		58,00		2,00				2,00				-				-				-				-				Bidang Penataan dan Kerjasama Desa		
12	08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							2,467,400,000				2,516,700,000				-				-				-								
12	08	15	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana							2,467,400,000				2,516,700,000				-				-				-						DP3AKKB		
			1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)		2,40		2,33				2,29				-				-				-				-				Bidang Pengendalian Penduduk dan KB		
			2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)		59,00		60,90				61,00				-				-				-				-				Bidang Pengendalian Penduduk dan KB		
			3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)		10,30		10,26				10,18				-				-				-				-				Bidang Pengendalian Penduduk dan KB		
			4	Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)		2,60		2,53				25,18				-				-				-				-				Bidang Pengendalian Penduduk dan KB		
12	09		Perhubungan							53,304,300,000				54,151,200,000				-				-				-								
12	09	01	Program Tata Kelola Pemerintahan							12,824,300,000				12,861,600,000				-				-				-						Dishub		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-		Dishub dan UPT PPD Serang
12	09	15	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan				4,642,000,000		4,742,000,000		-		-		-			Dishub
			1	Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	0,00	20,00		20,00		-		-		-		-		Bidang Pengembangan Transportasi
			2	Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		-		-		-		-		Bidang Pengembangan Transportasi
12	09	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan				3,200,000,000		3,300,000,000		-		-		-			Dishub
			1	Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		-		-		-		-		Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
			2	Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	10,00	10,00		20,00		-		-		-		-		Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
			3	Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	0,00	10,00		20,00		-		-		-		-		Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
12	09	17	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				29,852,140,000		30,261,740,000		-		-		-			Dishub
			1	Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		-		-		-		-		Bidang Lalulintas dan UPT PPD Serang
12	09	18	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan				1,285,000,000		1,385,000,000		-		-		-			Dishub
			1	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	0,00	100,00		100,00		-		-		-		-		Bidang Lalulintas dan UPT PPD Serang
12	09	19	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara				1,500,860,000		1,600,860,000		-		-		-			Dishub
			1	Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	0,00	0,00		20,00		-		-		-		-		Bidang Perhubungan Laut dan Udara
12	10		Komunikasi dan Informatika				21,589,800,000		21,915,400,000		-		-		-			
12	10	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				6,210,600,000		6,228,600,000		-		-		-			Diskominfo
			1	Nilai IKM (Satuan: Nilai)	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-		Sekretariat Dinas
12	10	15	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi				7,689,600,000		7,843,400,000		-		-		-			Diskominfo
			1	Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	12,41	30,26		48,38		-		-		-		-		Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12	10	16	Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik		7,689,600,000		7,843,400,000		-		-		-			Diskominfo		
			1	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	10,00	20,00		40,00		-		-		-		Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik		
12	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		26,763,900,000		27,130,500,000		-		-		-					
12	11	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		9,861,600,000		9,890,200,000		-		-		-			Dinas KUKM		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		Sekretariat Dinas dan Balai		
12	11	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil		4,635,352,000		4,735,352,000		-		-		-			Dinas KUKM		
			1	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	0,00	1,00		1,00		-		-		-		Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil		
12	11	16	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		3,882,700,000		3,982,700,000		-		-		-			Dinas KUKM		
			1	Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %)	0,00	6,00		6,00		-		-		-		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		
12	11	17	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi		4,244,190,500		4,244,190,500		-		-		-			Dinas KUKM		
			1	Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	0,00	6,00		6,00		-		-		-		Bidang Pemberdayaan Koperasi		
12	11	18	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM		4,140,057,500		4,278,057,500		-		-		-			Dinas KUKM		
			1	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)	0,00	6,00		6,00		-		-		-		Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM		
			2	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	0,00	1,00		1,00		-		-		-		Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM		
12	12		Penanaman Modal		19,802,400,000		20,060,500,000		-		-		-					
12	12	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		8,064,800,000		8,088,200,000		-		-		-			DPMPTSP		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		Sekretariat Dinas		
12	12	15	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi		4,700,515,000		4,700,515,000		-		-		-			DPMPTSP		
			1	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliun)	12,40	13,40		13,80		-		-		-		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD		
			2	Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliun)	39,90	43,00		47,00		-		-		-		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
12	12	16	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						2,156,780,000			2,206,780,000			-		-			-												DPMPTSP		
			1 Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)			75,00		100,00			100,00			-		-		-		-			-					-				Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
12	12	17	Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal						2,519,278,000			2,609,278,000			-		-			-												DPMPTSP		
			1 Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)			100,00		100,00			100,00			-		-		-		-								-				Bidang Pelayanan		
12	12	18	Program Pengendalian Penanaman Modal						2,361,027,000			2,455,727,000			-		-			-												DPMPTSP		
			1 Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)			16,96		17,03			17,09			-		-		-		-								-				Bidang Pengendalian Penanaman Modal		
12	13		Kepemudaan dan Olahraga						23,509,800,000			23,911,700,000			-		-			-								-						
12	13	01	Program Tata Kelola Pemerintahan						3,994,800,000			4,006,400,000			-		-			-												Dispora		
			1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))			2,50		2,80			3,00			-		-		-		-								-				Sekretariat Dinas dan Balai		
12	13	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan						3,950,000,000			4,050,000,000			-		-			-												Dispora		
			1 Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)			70,00		75,00			80,00			-		-		-		-								-				Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda		
			2 Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)			0,00		75,00			80,00			-		-		-		-								-				Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda		
12	13	16	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga						5,574,835,000			5,665,135,000			-		-			-												Dispora		
			1 Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)			50,00		70,00			75,00			-		-		-		-									-			Bidang Pemberdayaan Olahraga		
12	13	17	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga						6,500,000,000			6,600,000,000			-		-			-												Dispora		
			1 Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)			50,00		75,00			80,00			-		-		-		-									-			Bidang Prestasi Olahraga		
12	13	18	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga						3,490,165,000			3,590,165,000			-		-			-												Dispora		
			1 Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)			60,00		75,00			80,00			-		-		-		-									-			Balai PPO		
12	14		Statistik						2,464,000,000			2,513,300,000			-		-			-														
12	14	01	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah						2,464,000,000			2,513,300,000			-		-			-												Bappeda, Diskominfo		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			1	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	30,00	50,00	60,00			-		-		-		-																Bidang PS dan LP DisKOMINFO dan Bidang Litbang BAPPEDA		
12	15			Persandian				1,157,600,000		1,180,700,000		-		-		-																		
12	15	15		Program Tata Kelola Persandian				1,157,600,000		1,180,700,000		-		-		-																	Diskominfo	
			1	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)	10,00	20,00	40,00			-		-		-		-																	Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan	
12	16			Kebudayaan				8,268,300,000		8,433,700,000		-		-		-																		
12	16	15		Program Pelestarian Kebudayaan				3,203,289,000		3,268,289,000		-		-		-																		Dindikbud
			1	Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	70,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		BID. KEBUDAYAAN
			2	Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	70,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		BID. KEBUDAYAAN
			3	Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	70,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		BID. KEBUDAYAAN
			4	Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	70,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		BID. KEBUDAYAAN
12	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				2,065,011,000		2,105,011,000		-		-		-																		Dindikbud
			1	Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	0,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		UPT Museum
12	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				3,000,000,000		3,060,400,000		-		-		-																		Dindikbud
			1	Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	0,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		UPT Taman Budaya
			2	Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	0,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		UPT Taman Budaya
12	17			Perpustakaan				13,413,300,000		13,570,300,000		-		-		-																		
12	17	01		Program Tata Kelola Pemerintahan				6,504,200,000		6,523,100,000		-		-		-																		DPKD
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80	3,00			-		-		-		-																		Sekretariat Dinas
12	17	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				3,479,100,000		3,549,100,000		-		-		-																		DPKD
			1	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	75,00	85,00	90,00			-		-		-		-																		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
12	17	16	Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan							3,430,000,000				3,498,100,000					-			-			-							DPKD		
			1	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	70,00		75,00		80,00				-		-		-		-			-		-		-						Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan		
12	18		Kearsipan							3,250,800,000				3,315,800,000			-		-		-		-		-									
12	18	15	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan							3,250,800,000				3,315,800,000			-		-		-		-		-							DPKD		
			1	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	70,00		80,00		85,00				-		-		-		-		-		-		-							Bidang Pengelolaan Arsip		
			2	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	70,00		80,00		85,00				-		-		-		-		-		-		-							Bidang Pengelolaan Arsip		
			3	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	70,00		85,00		90,00				-		-		-		-		-		-		-							Bidang Pengelolaan Arsip		
20			Urusan Pilihan										-		-		-		-		-		-		-									
20	01		Kelautan dan Perikanan							29,753,200,000				30,220,600,000			-		-		-		-		-									
20	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan							7,472,000,000				7,493,700,000			-		-		-		-		-							DKP		
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50		2,80		3,00				-		-		-		-		-		-		-							Sekretariat Dinas dan Balai		
20	01	15	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap							12,248,733,825				12,248,733,825			-		-		-		-		-							DKP		
			1	Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	7,49		8,01		8,08				-		-		-		-		-		-		-							Bidang Perikanan Tangkap dan Balai Pelabuhan Peikanan Pantai		
20	01	16	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							2,550,000,000				2,750,000,000			-		-		-		-		-							DKP		
			1	Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	50,00		60,00		65,00				-		-		-		-		-		-		-							Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		
20	01	17	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan							3,889,109,000				3,989,109,000			-		-		-		-		-							DKP		
			1	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	50,00		100,00		100,00				-		-		-		-		-		-		-							Bidang Peningkatan Daya Saing, Balai Budidaya Ikan Air Tawar dan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan		
20	01	18	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							3,593,357,175				3,739,057,175			-		-		-		-		-							DKP		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: nilai)	115,00	116,00			117,00			-		-		-		-		-												Bidang Pengolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan Balai Budidaya Ikan Pantai		
20	02		Pariwisata					18,918,400,000		19,206,600,000			-		-		-			-														
20	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan					5,276,000,000		5,291,300,000			-		-		-			-													Dispar	
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80			3,00			-		-		-		-		-						-							Sekretariat Dinas	
20	02	15	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					2,650,000,000		2,750,000,000			-		-		-			-													Dispar	
			1	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	2,00	1,00			1,00			-		-		-		-		-						-							Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
20	02	16	Program Pemasaran Produk Pariwisata					6,475,000,000		6,587,900,000			-		-		-			-													Dispar	
			1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14.705.763,00	15.146.936,00			15.601.344,00			-		-		-		-		-						-							Bidang Pemasaran Produk Pariwisata	
			2	Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1,33	1,36			1,39			-		-		-		-		-					-								Bidang Pemasaran Produk Pariwisata	
			3	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3.634.490,00	3.743.525,00			3.852.216,00			-		-		-		-		-					-								Bidang Pemasaran Produk Pariwisata	
20	02	17	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					1,000,000,000		1,000,000,000			-		-		-			-													Dispar	
			1	Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang)	200,00	300,00			300,00			-		-		-		-		-					-								Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
20	02	18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					3,517,400,000		3,577,400,000			-		-		-			-													Dispar	
			1	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %)	20,00	20,00			20,00			-		-		-		-		-					-								Bidang Destinasi Pariwisata	
20	03		Pertanian					38,609,800,000		39,124,600,000					-		-			-														
20	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan					15,053,000,000		15,096,700,000					-		-			-														Distan
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80			3,00			-		-		-		-		-					-								Sekretariat Dinas dan Balai	
20	03	15	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan					6,104,225,000		6,104,225,000					-		-			-													Distan	
			1	Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)	55,68	57,35			59,07			-		-		-		-		-						-							Bidang Tanaman Pangan, BPBITHP, BPSB dan BPTPH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			2	Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2.396.688,00	2.408.671,00		2.420.714,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Bidang Tanaman Pangan, BPBITHP, BPSB dan BPTPH			
			3	Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	20.551,00	21.579,00		22.657,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Bidang Tanaman Pangan, BPBITHP, BPSB dan BPTPH			
			4	Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	6.801,00	7.141,05		7.498,10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Bidang Tanaman Pangan, BPBITHP, BPSB dan BPTPH			
20	03	16	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura				4,651,690,000		4,651,690,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Distan		
			1	Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	7.498,00	8.246,00		8.970,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Hortikultura, BPBITHP dan BPTPH		
			2	Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	700,00	735,00		771,75		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Hortikultura, BPBITHP dan BPTPH		
20	03	17	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan				3,000,000,000		3,271,100,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Distan		
			1	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan: Kg/Ha)	3.184,00	3.343,20		3.510,36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Perkebunan		
			2	Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1.694,00	1.728,00		1.762,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Perkebunan		
			3	Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	43.116,00	43.978,00		44.858,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Perkebunan		
20	03	18	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan				3,496,068,000		3,496,068,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Distan		
			1	Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)	33,52	33,52		34,18		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Produksi Peternakan dan Balai Pengembangan Peternakan		
20	03	19	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian				3,040,000,000		3,240,000,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Distan		
			1	Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	80,00	85,00		87,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian		
20	03	20	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				3,264,817,000		3,264,817,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	Distan		
			1	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
20	04		Kehutanan					7,744,000,000			7,898,900,000			-			-																	
20	04	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan					7,744,000,000			7,898,900,000			-			-																DLHK	
			1	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)	69.466,00	5.000,00			5.000,00			-				-																	Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW dan BPPTK	
			2	Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	38,00	10,00			10,00			-				-																	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW dan BPPTK	
20	05		Energi dan Sumberdaya Mineral					28,661,500,000			29,141,500,000			-			-																	
20	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan					5,452,700,000			5,468,500,000			-			-																Dinas ESDM	
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80			3,00			-				-																	Sekretariat Dinas	
20	05	15	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara					4,129,442,000			4,293,642,000			-			-																Dinas ESDM	
			1	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	60,00	65,00			70,00			-				-																	Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara	
			2	Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	37,67	41,10			44,52			-				-																	Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara	
20	05	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan					15,427,130,000			15,427,130,000			-			-																Dinas ESDM	
			1	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)	10.000,00	10.000,00			10.000,00			-				-																	Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	
20	05	17	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan					3,652,228,000			3,952,228,000			-			-																Dinas ESDM	
			1	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %)	9,92	16,17			22,83			-				-																	Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan	
20	06		Perdagangan					109,237,078,000			59,445,278,000			-			-																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	06	15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri					106,217,259,850		56,375,459,850		-		-		-			Disperindag
			1	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	0,00	5,00		5,00		-		-		-		-			Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			2	Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	5,00	10,00		12,00		-		-		-		-			Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			3	capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	6,93	5,00		5,00		-		-		-		-			Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			4	Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		-		-		-		-			Bidang Perdagangan Dalam Negeri
20	06	16	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri					1,292,573,000		1,292,573,000		-		-		-			Disperindag
			1	Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	2.828,83	2.970,27		3.118,79		-		-		-		-			Bidang Perdagangan Luar Negeri
20	06	17	Program Perlindungan dan Pengawasan Industri					1,326,378,000		1,376,378,000		-		-		-			Disperindag
			1	Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai)	104,65	108,00		112,00		-		-		-		-			Bidang Pengawasan
20	06	18	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					400,867,150		400,867,150		-		-		-			Disperindag
			1	Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)	75,00	80,00		85,00		-		-		-		-			BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
20	07		Perindustrian					11,117,822,000		11,192,422,000		-		-		-			
20	07	01	Program Tata Kelola Pemerintahan					7,270,200,000		7,291,300,000		-		-		-			Disperindag
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-			Sekretariat Dinas dan Balai
20	07	15	Program Peningkatan Daya Saing Industri					2,593,200,000		2,593,200,000		-		-		-			Disperindag
			1	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	0,00	20,00		20,00		-		-		-		-			Bidang Perindustrian
			2	Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	0,00	20,00		20,00		-		-		-		-			Bidang Perindustrian
			3	Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	0,00	20,00		20,00		-		-		-		-			Bidang Perindustrian
20	07	16	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri					1,254,422,000		1,307,922,000		-		-		-			Disperindag
			1	Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: jumlah)	1.200,00	200,00		200,00		-		-		-		-			Balai PT dan SI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
30	01		Administrasi Pemerintahan				290,260,200,000		290,998,800,000		-		-		-			
30	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				123,936,883,181		124,256,575,404		-		-		-			Badan Penghubung, Setda, Set DPRD
			1	Nilai IKM (Satuan: skala)	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-		seluruh Biro, Penghubung, dan Setwan khusus Tata usaha biro
30	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				135,757,270,500		136,075,787,950		-		-		-			Set DPRD
			1	Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	0,00	100,00		100,00		-		-		-		-		Bagian Hukum dan Persidangan
			2	Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	0,00	100,00		100,00		-		-		-		-		Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan
			3	Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	0,00	100,00		100,00		-		-		-		-		Bagian Aspirasi dan Humas
30	01	16	Program Pembangunan Kemitraan				1,832,777,319		1,933,167,646		-		-		-			Badan Penghubung
			1	Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	0,00	100,00		100,00		-		-		-		-		Semua Sub. Bidang Badan Penghubung
30	01	17	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				1,864,417,500		1,864,417,500		-		-		-			Setda
			1	Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %)	10,00	30,00		50,00		-		-		-		-		Biro Organisasi
30	01	18	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan				1,253,648,000		1,253,648,000		-		-		-			Setda
			1	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %)	65,00	70,00		75,00		-		-		-		-		Biro Pemerintahan
30	01	19	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian				1,757,900,000		1,757,900,000		-		-		-			Setda
			1	Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %)	16,27	17,27		18,28		-		-		-		-		Biro Bina Perekonomian
30	01	20	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum				2,768,595,000		2,768,595,000		-		-		-			Setda
			1	Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		-		-		-		-		Biro Hukum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2	Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro Hukum
			3	Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik (Satuan: %)	50,00	70,00		80,00		-		-		-		-		Biro Hukum
30	01	21	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur				786,629,000		786,629,000		-		-		-			Setda
			1	Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro Bina Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
30	01	22	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,564,208,000		3,564,208,000		-		-		-			Setda
			1	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro Kesra
30	01	23	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan				2,652,263,500		2,652,263,500		-		-		-			Setda
			1	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro Administrasi Pembangunan
			2	Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro Administrasi Pembangunan
30	01	24	Program Fasilitas dan Pelayanan Pimpinan				10,615,608,000		10,615,608,000		-		-		-			Setda
			1	Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro ARTP
			2	Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ((Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro ARTP
			3	Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro ARTP
30	01	25	Program Pelayanan Umum				3,470,000,000		3,470,000,000		-		-		-			Setda
			1	Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		-		-		-		-		Biro Umum
30	02		Pengawasan				20,951,400,000		21,225,500,000		-		-		-			
30	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				8,478,600,000		8,503,300,000		-		-		-			Inspektorat
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80		3,00		-		-		-		-		Sekretariat Inspektorat
30	02	15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				12,472,800,000		12,722,200,000		-		-		-			Inspektorat
			1	Capaian Nilai Sakip (Satuan: %)	55,00	75,00		75,00		-		-		-		-		IRBANWIL 1 S.D 4

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
				2	Indeks Integritas (Satuan: poin)	72,48	73,48			74,48			-		-		-		-		-		-		-		-		-		IRBANWIL 1 S.D 4			
				3	Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	2,00	2,00			3,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		IRBANWIL 1 S.D 4			
				4	Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100,00	100,00			100,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		IRBANWIL 1 S.D 4			
30	03			Perencanaan						33,281,500,000			33,712,600,000			-		-		-		-		-		-		-		-				
30	03	01		Program Tata Kelola Pemerintahan						13,715,700,000			13,755,500,000			-		-		-		-		-		-		-		-		Bappeda		
				1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80			3,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		Sekretariat Badan			
30	03	15		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan						8,802,029,600			8,993,329,600			-		-		-		-		-		-		-		-		Bappeda		
				1	Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	100,00	100,00			0,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang P4			
				2	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang P4			
				3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	70,00	80,00			85,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang P4			
				4	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang P4			
30	03	16		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi						3,696,775,000			3,696,775,000			-		-		-		-		-		-		-		-		Bappeda		
				1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Perekonomian			
30	03	17		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan						3,651,835,000			3,651,835,000			-		-		-		-		-		-		-		-		Bappeda		
				1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Sosial dan Pemerintahan			
30	03	18		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						3,415,160,400			3,615,160,400			-		-		-		-		-		-		-		-		Bappeda		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00		-		-		-		-		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
30	04		Keuangan				81,276,000,000		82,049,800,000										
30	04	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				49,830,500,000		49,975,300,000		-		-		-		-		BPKAD, BPD
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,50	2,80			3,00		-		-		-		-		Sekretariat Badan
30	04	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah				9,808,953,400		10,108,953,400				-		-		-		BPD
			1	Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	55,60	57,58			58,94		-		-		-		-		Bidang Pendapatan Pajak Daerah
			2	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	44,40	42,42			41,06		-		-		-		-		Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
30	04	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5,457,470,000		5,786,470,000				-		-		-		BPKAD
			1	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	75,00	80,00			85,00		-		-		-		-		Bidang Perbendaharaan dan Anggaran
30	04	17	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah				4,590,402,600		4,590,402,600				-		-		-		BPD
			1	Persentase Potensi Tunggal Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %)	2,36	14,20			15,22		-		-		-		-		
30	04	18	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah				4,583,477,000		4,583,477,000				-		-		-		BPKAD
			1	Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	70,00	80,00			90,00		-		-		-		-		Bidang Akuntansi
30	04	19	Program Penatausahaan Aset Daerah				7,005,197,000		7,005,197,000				-		-		-		BPKAD
			1	capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		-		-		-		-		Bidang Aset Daerah
30	05		Kepegawaian				12,190,200,000		12,380,400,000				-		-		-		
30	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				3,132,500,000		3,141,600,000				-		-		-		BKD
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	0,00	2,80			3,00		-		-		-		-		Sekretariat Badan
30	05	15	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah				4,359,073,000		4,459,073,000				-		-		-		BKD
			1	Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	0,00	85,00			90,00		-		-		-		-		Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
				3	Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	0,00	85,00		90,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian			
				4	Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	0,00	85,00		90,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian			
30	05	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4,698,627,000		4,779,727,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		BKD			
				1	Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)	70,00	85,00		90,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur			
30	06		Pendidikan dan Pelatihan				44,180,600,000		44,701,200,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
30	06	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				21,230,500,000		21,292,100,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		BPSDM			
				1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	0,00	2,80		3,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Sekretariat Badan			
30	06	15	Program Pengembangan SDM Aparatur				18,706,934,000		18,906,934,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		BPSDM			
				1	Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70,00	80,00		85,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan			
				2	Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70,00	80,00		85,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional			
30	06	16	Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur				4,243,166,000		4,502,166,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		BPSDM			
				1	Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	70,00	80,00		85,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat			
				2	Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	70,00	100,00		100,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat			
30	07		Penelitian dan Pengembangan				4,977,900,000		5,077,500,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
30	07	15	Program Penelitian dan Pengembangan				4,977,900,000		5,077,500,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bappeda			
				1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	30,00	50,00		60,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Litbang Bappeda			
				2	Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	30,00	50,00		60,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		Bidang Litbang Bappeda			

Tabel 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Banten 2017 – 2022 (Setelah Perubahan)

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
111	01		Pendidikan				1,077,723,230,000		1,136,948,027,300		1,181,742,800,000		1,261,556,210,000.0		1,261,556,210,000.0		5,919,526,477,300.0		
111	011	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				127,904,428,800		29,386,230,300		99,622,493,000		35,914,360,000.0		35,914,360,000.0		328,741,872,100.0	Dindikbud	
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud	
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud	
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud	
111	011	16	Program Pendidikan Khusus				13,388,500,000		11,238,432,000		17,150,000,000		9,016,270,000.0		9,784,770,000.0		60,577,972,000.0	Dindikbud	
				Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	15,00	17,00		34,00		51,00		68,00		85,00		85,00		Dindikbud	
111	011	17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20,735,164,000		4,400,000,000		8,000,000,000		5,344,500,000.0		4,576,000,000.0		43,055,664,000.0	Dindikbud	
				Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: %)	56,23	56,98		57,74		58,49		59,25		60,00		60,00		Dindikbud	
				Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: %)	64,57	64,86		65,14		65,43		65,71		66,00		66,00		Dindikbud	
				Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	95,26	96,21		97,16		98,01		99,05		100,00		100,00		Dindikbud	
				Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	48,28	54,63		60,97		67,31		73,66		80,00		80,00		Dindikbud	
				Persentase Mutu guru SKH yang bersertifikat (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	018		Program Peningkatan Mutu Pembelajaran				3,250,000,000		300,000,000		900,000,000		312,000,000.0		312,000,000.0		5,074,000,000.0	Dindikbud	
				Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dindikbud
111	019		Program penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus				0.00		0.00		984,813,000,000		1,009,954,624,000.0		1,009,954,624,000.0		3,004,722,248,000.0	Dindikbud	
				Angka Putus Sekolah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,24		0,20		0,15		0,15			Dindikbud
				Angka Kelulusan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		99,50		99,61		99,72		99,72			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		54,14		55,19		56,23		56,23			Dindikbud
				Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	15,00	17,00		0,00		51,00		68,00		85,00		85,00			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		46,25		46,82		47,12		47,12			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		41,64		42,34		43,31		43,31			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		41,42		42,45		43,45		43,45			Dindikbud
				Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		46,81		47,33		47,86		47,86			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		42,34		43,86		44,25		44,25			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		41,42		42,45		43,45		43,45			Dindikbud
				Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		52,23		52,86		53,36		53,36			Dindikbud
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		45,25		46,54		47,64		47,64			Dindikbud

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		45,25		46,35		47,25		47,25		Dindikbud
					Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang) (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		52,86		53,35		53,86		53,86		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		46,36		47,25		47,85		47,85		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		43,35		44,25		45,25		45,25		Dindikbud
					Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		63,25		63,68		64,45		64,45		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		56,12		56,86		57,25		57,25		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		49,25		50,35		51,25		51,25		Dindikbud
					Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
11	01	20		Program Pendidikan Menengah Atas				0.00		0.00		39,522,720,000		111,492,258,056.0		111,492,258,056.0		262,507,236,112.0		Dindikbud	
					Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: %)	0,25	0,00		0,00		0,16		0,13		0,10		0,10		0,10		Dindikbud
					Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98,83	0,00		0,00		99,07		99,28		99,49		99,49		99,49		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	50,70	0,00		0,00		54,48		55,74		57,00		57,00		57,00		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	47,60	0,00		0,00		50,84		51,92		53,00		53,00		53,00		Dindikbud

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Presentase Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		50,00		55,00		60,00		60,00		Dindikbud
					Persentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		70,00		75,00		80,00		80,00		Dindikbud
11	01	21	Program Pendidikan Menengah Kejuruan				0.00		0.00		31,734,587,000		89,522,197,944.0		89,522,197,944.0		210,778,982,888.0		Dindikbud
					Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %)	0,50	0,00		0,00		0,32		0,26		0,20		0,20		Dindikbud
					Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99,87	0,00		0,00		99,92		99,83		99,95		99,95		Dindikbud
					Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	54,70	0,00		0,00		57,10		57,90		58,70		58,70		Dindikbud
					Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan: %)	10,00	0,00		0,00		51,00		68,00		85,00		85,00		Dindikbud
					Persentase Lulusan SMK yang Terserap di Pasar Kerja (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		80,00		85,00		90,00		90,00		Dindikbud
11	02		Kesehatan				371,206,890,000		445,305,000,000		666,504,100,000		685,242,430,000.0		607,242,430,000.0		2,775,500,850,000.0		
11	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kesehatan				25,355,757,667		35,627,153,706		89,482,939,422		151,351,120,974.0		57,815,922,071.0		359,632,893,840.0		Dinkes
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinkes
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinkes
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinkes
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinkes

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																																	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
1	0	0	Program Tata Kelola Pemerintahan RSUD Banten						0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						80,204,477,955.0						100,00			88,224,925,751.0						457,654,323,030.0			RSUD Banten Dinkes		
1	2	2																																																
						Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						100,00			100,00						100,00						RSUD Banten Dinkes					
						Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						100,00			100,00						RSUD Banten Dinkes											
						Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						100,00			100,00						RSUD Banten Dinkes											
						Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						100,00			100,00						RSUD Banten Dinkes											
1	0	0	Program Tata Kelola Pemerintahan RSUD Malingping									33,405,981,555						62,105,381,050						62,260,535,165						75,147,511,071.0						82,662,262,178.0						315,581,671,019.0			RSUD Malingping Dinkes					
1	2	3																																																
						Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						100,00			100,00						100,00						RSUD Malingping Dinkes					
						Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						100,00			100,00						100,00						RSUD Malingping Dinkes					
						Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			100,00			100,00						100,00			100,00						100,00						RSUD Malingping Dinkes					
1	0	1	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat									6,628,400,000						6,015,060,000						2,206,500,000						6,255,670,000.0						6,255,670,000.0						27,361,300,000.0			Dinkes					
1	2	5																																																
						Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)			45,00			65,00						81,00			86,00			90,00						94,00			94,00						Dinkes											
						Prevalensi Stunting (Satuan: %)			0,00			0,00						0,00			24,60			23,60						23,60			23,60						Dinkes											

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Cakupan Kabupaten/Kota Sehat (Satuan: Kab/Kota)	0,00	0,00				0,00			7,00		8,00		8,00		8,00	Dinkes
11	02	16	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					65,562,430,841		155,379,175,000		253,936,000,000			245,594,350,000.0		245,594,350,000.0		966,066,305,841.0	Dinkes	
					Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	75,00	90,00			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Dinkes	
					Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	45,00	65,00			81,00			86,00		90,00		94,00		94,00	Dinkes	
					Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	10,00	20,00			35,00			50,00		75,00		90,00		90,00	Dinkes	
					Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	0,00	20,00			30,00			40,00		50,00		50,00		50,00	Dinkes	
11	02	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten					88,864,205,844		77,018,902,727		90,613,209,413			61,127,922,000.0		61,127,922,000.0		378,752,161,984.0	Dinkes	
					Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM pelayanan keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			90,00		93,00		93,00		93,00	Dinkes	
					Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan: %)	88,00	88,00			88,00			90,00		93,00		93,00		93,00	Dinkes	
					Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	70,00	70,00			70,00			90,00		93,00		93,00		93,00	Dinkes	
					Capaian Pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten dan persentase kelengkapan pengisian rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			85,00		90,00		90,00		90,00	Dinkes	
					Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			85,00		90,00		90,00		90,00	Dinkes	
					Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam setelah selesai pelayanan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			85,00		90,00		90,00		90,00	Dinkes	
11	02	18	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit					2,457,310,000		2,835,640,000		2,649,880,000			2,949,070,000.0		2,949,070,000.0		13,840,970,000.0	Dinkes	
					keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di Kab/Kota (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			90,00		90,00		90,00		90,00	Dinkes	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
11	029	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian			6,413,410,000		17,783,540,938		28,530,000,000		18,494,890,000.0		18,494,890,000.0		89,716,730,938.0	Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
																Dinkes
11	020	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah			680,702,865		1,312,950,000		1,300,000,000		1,365,470,000.0		1,365,470,000.0		6,024,592,865.0	Dinkes
																Dinkes
11	022	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan			0.00		0.00		960,000,000		2,000,000,000.0		2,000,000,000.0		4,960,000,000.0	Dinkes
																Dinkes
11	023	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping			21,467,386,429		20,942,504,054		30,796,234,000		40,751,948,000.0		40,751,948,000.0		154,710,020,483.0	Dinkes

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Dinkes
					Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Dinkes
					Capaian SPM penunjang RSUD Malingping (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Dinkes
11	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,074,816,380,000		1,190,395,056,000			701,787,914,000		685,706,160,000.0		908,790,280,000.0		4,561,495,790,000.0		
11	03	01		Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				80,411,076,607		57,505,793,068			61,553,165,800		46,800,000,000.0		46,800,000,000.0		293,070,035,475.0		DPUPR
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR
11	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				803,919,019,223		947,142,635,132			511,896,479,600		506,326,960,000.0		724,141,190,000.0		3,493,426,283,955.0		DPUPR
					Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m) (Satuan: %)	46,75	0,00		0,00				64,94		67,53		71,43		71,43		DPUPR
					Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	74,45	79,56		84,67				100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR
					Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	83,00	86,30		89,70				93,50		95,90		100,00		100,00		DPUPR
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR		
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR		
					Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR		
					Prosentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km) (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		10,00		35,00		55,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR		
11	03	16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi						5,296,583,500		6,716,850,000		5,953,728,600		7,571,200,000.0		7,874,050,000.0		33,412,412,100.0		DPUPR														
					Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	0,00	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		50,00		50,00		DPUPR														
					Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPUPR														
11	03	17	Program Pembangunan Sumberdaya Air						179,949,467,170		173,618,060,200		117,492,300,000		118,976,000,000.0		123,735,040,000.0		713,770,867,370.0		DPUPR														
					Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Ha)	15.118,50	15.332,98		16.721,78		18.110,58		19.387,46		20.888,19		20.888,19				DPUPR														
					Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	46,21	51,59		56,97		62,56		68,06		73,56		73,56				DPUPR														
					Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir (Satuan: %)	15,51	20,89		26,27		31,89		37,39		42,89		42,89				DPUPR														
					Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				DPUPR														
					Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				DPUPR														
					Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				DPUPR														
11	03	18	Program Penataan Ruang						5,240,233,500		5,411,717,600		4,892,240,000		6,032,000,000.0		6,240,000,000.0		27,816,191,100.0		DPUPR														
					Persentase Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang (RTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		62,50		75,00		100,00		100,00				DPUPR														
					Presentase Kesesuaian Pembinaan Pemanfaatan Ruang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				DPUPR														
11	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						428,241,570,000		535,396,500,000		938,527,700,000		611,793,150,000.0		320,593,150,000.0		2,834,552,070,000.0																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab																																	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																			
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
111	041		Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				14,075,138,700				40,003,800,000				15,180,570,000				22,673,400,000.0				25,440,740,000.0					117,373,648,700.0		DPRKP																				
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	
111	045		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan				192,116,720,475				112,362,260,000				116,771,150,000				104,000,000,000.0				108,160,000,000.0					633,410,130,475.0		DPRKP																				
				Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375,29	114,60			203,20			274,60			333,30			333,30				333,30				333,30							DPRKP																	
				cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			33,33			33,33			33,33				100,00				100,00							DPRKP																	
				Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	
111	046		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				175,609,091,130				263,596,440,000				752,040,600,000				422,719,750,000.0				124,592,410,000.0					1,738,558,291,130.0		DPRKP																				
				persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	28,00			69,00			83,00			89,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	
				persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	25,00			50,00			75,00			88,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	
				persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00				100,00				100,00							DPRKP																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																																	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
1 1	0 4	1 7	Program Keciaptakaryaan						46,440,619,695			119,434,000,000			54,535,380,000			62,400,000,000.0			96,53			62,400,000,000.0			96,53			345,209,999,695.0	DPRKP																			
					Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		81,24			88,04			96,53			96,53			96,53			96,53						DPRKP																		
					cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		20,00			20,00			20,00			20,00			20,00			20,00						DPRKP																		
					Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		5,00			15,00			100,00			100,00			100,00			100,00						DPRKP																		
1 1	0 5		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						39,129,970,000			37,131,500,000			42,172,300,000			40,975,510,000.0					40,975,510,000.0			40,975,510,000.0			200,384,790,000.0																					
1 1	0 5	0 1	Program Tata Kelola PemerintahanSatuan Polisi Pamong Praja						8,903,476,000			10,549,660,000			12,310,237,000			12,828,680,000.0					12,828,680,000.0			12,828,680,000.0			57,420,733,000.0	Satpolpp																				
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00						Satpolpp																		
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00						Satpolpp																		
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00						Satpolpp																		
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00						Satpolpp																		
1 1	0 5	0 2	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						6,629,332,000			5,106,000,000			4,126,990,000			5,617,250,000.0					5,617,250,000.0			5,617,250,000.0			27,096,822,000.0	Badan Kesbangpol																				
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00						Badan Kesbangpol																		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kesbangpol		
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kesbangpol		
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kesbangpol		
11	05	03		Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah					7,470,920,000			6,871,958,500			5,646,969,500			7,341,530,000.0			34,672,908,000.0	BPBD	
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD		
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD		
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD		
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD		
11	05	15		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum					3,354,000,000			2,100,000,000			2,262,363,000			2,184,000,000.0			2,184,000,000.0	12,084,363,000.0	Satpolpp
					cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100,00	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Satpolpp	
11	05	16		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					1,458,883,000			1,175,160,000			2,048,760,000			1,222,170,000.0			1,222,170,000.0	7,127,143,000.0	BPBD
					Indek Ketahanan Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00		0,42		0,53		0,65		0,65			BPBD	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																																	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
111	057		Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan				2,084,046,500		1,800,000,000		1,700,000,000		1,872,000,000.0		1,872,000,000.0		9,328,046,500.0	Badan Kesbangpol																																
				Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)	5,00	22,00		24,00		27,00		29,00		33,00		33,00		Badan Kesbangpol																																
111	058		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah				681,120,000		1,250,000,000		2,750,000,000		1,300,000,000.0		1,300,000,000.0		7,281,120,000.0	Satpolpp																																
				Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70,00	75,00		75,00		80,00		80,00		85,00		85,00		Satpolpp																																
111	059		Program Perlindungan Masyarakat				340,472,000		300,000,000		900,000,000		312,000,000.0		312,000,000.0		2,164,472,000.0	Satpolpp																																
				Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satpolpp																																
111	050		Program Penanganan Bencana Kebakaran				560,492,000		408,840,000		2,250,000,000		425,200,000.0		425,200,000.0		4,069,732,000.0	Satpolpp																																
				Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satpolpp																																
111	051		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana				2,630,290,000		2,392,411,500		3,650,744,500		2,488,110,000.0		2,488,110,000.0		13,649,666,000.0	BPBD																																
				Persentase penanganan darurat bencana (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD																																
				Persentase bantuan logistik dan dukungan peralatan penanggulangan bencana (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD																																
111	052		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				1,076,327,000		1,317,470,000		1,181,426,000		1,370,170,000.0		1,370,170,000.0		6,315,563,000.0	BPBD																																
				Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPBD																																
111	053		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional				1,197,156,000		1,060,000,000		1,150,000,000		1,102,400,000.0		1,102,400,000.0		5,611,956,000.0	Badan Kesbangpol																																
				Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Kewaspadaan Nasional																																
111	054		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi				1,128,055,500		700,000,000		647,510,000		728,000,000.0		728,000,000.0		3,931,565,500.0	Badan Kesbangpol																																
				Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70,00	70,00		70,00		75,00		75,00		75,00		75,00		Bidang Kewaspadaan Nasional																																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	05	25	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat				1,615,400,000		2,100,000,000		1,547,300,000		2,184,000,000.0		2,184,000,000.0			9,630,700,000.0	Badan Kesbangpol
				angka pemilu/ pemilukada (Satuan: %)	70,83	0,00		0,00		76,00		0,00		80,00		80,00			Bidang Kewaspadaan Nasional
				Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	62,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Bidang Kewaspadaan Nasional
				Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	68,66	0,00		70,00		0,00		0,00		0,00		70,00			Bidang Kewaspadaan Nasional
				Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)	56,67	65,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65,00			Bidang Kewaspadaan Nasional
111	06		Sosial				33,476,240,000		24,473,137,000		20,728,700,000		26,492,920,000.0		26,492,920,000.0			131,663,917,000.0	
111	06	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial				7,126,521,200		6,900,583,000		6,481,498,000		8,217,440,000.0		8,217,440,000.0			36,943,482,200.0	Dinsos
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinsos
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinsos
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinsos
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinsos
111	06	15	Program Rehabilitasi Sosial				2,803,857,400		1,688,038,000		1,364,738,000		1,755,560,000.0		1,755,560,000.0			9,367,753,400.0	Dinsos
				Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: %)	1.429,00	573,00		608,00		663,00		718,00		723,00		723,00			Dinsos
111	06	16	Program Pemberdayaan Sosial				5,662,892,000		2,192,059,000		1,592,641,000		2,279,750,000.0		2,279,750,000.0			14,007,092,000.0	Dinsos
				Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi sosialnya (Satuan: Orang)	1.624,00	1.505,00		1.520,00		1.483,00		1.483,00		1.483,00		1.483,00			Dinsos

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																																		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
111	06	17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					13,657,860,400			9,924,417,000			8,069,301,000			10,321,400,000.0			10,321,400,000.0					52,294,378,400.0	Dinsos																								
				Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan: (%))	100,00	100,00			100,00			100,00		100,00				100,00			100,00						100,00								Dinsos															
				Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: KK)	48.150,00	30.000,00			25.000,00			50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00						50.000,00								Dinsos																
				Cakupan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (Satuan: Orang)	0,00	0,00			0,00			1.300,00		1.300,00				1.300,00								1.300,00								Dinsos																
111	06	18	Program Penanganan Fakir Miskin					1,545,318,000			650,000,000			560,000,000			676,000,000.0			676,000,000.0						4,107,318,000.0	Dinsos																							
				Cakupan Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Kab/Kota)	0,00	0,00			0,00			8,00		8,00				8,00								8,00								Dinsos																
111	06	19	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti					926,055,000			1,311,800,000			1,103,520,000			1,364,280,000.0			1,364,280,000.0						6,069,935,000.0	Dinsos																							
				Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandang dan pengemis) dan penyandang disabilitas telantar di dalam panti (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00				100,00								100,00								Dinsos																
111	06	20	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti					1,753,736,000			1,806,240,000			1,557,002,000			1,878,490,000.0			1,878,490,000.0						8,873,958,000.0	Dinsos																							
				Cakupan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar dan anak telantar di dalam panti (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00				100,00								100,00								Dinsos																
122			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																																															
122	01		Ketenaga Kerjaan					38,291,360,000			35,499,000,000			50,506,100,000			37,495,570,000.0			37,495,570,000.0						199,287,600,000.0																								
122	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi					21,347,135,500			16,753,733,000			27,170,129,200			18,000,460,000.0			18,000,460,000.0						101,271,917,700.0	Disnakertrans																							
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00				100,00								100,00								Disnakertrans																

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disnakertrans		
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disnakertrans		
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disnakertrans		
12	01	15		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja					3,796,056,000				2,848,484,000				4,523,494,000					2,962,430,000.0				2,962,430,000.0				17,092,894,000.0		Disnakertrans			
					Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4,31	4,35		4,40		4,42		4,44		4,46		4,46		4,46		4,46		4,46		4,46		4,46		4,46		4,46		Disnakertrans		
					Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja Berbasis Masyarakat (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		1,13		1,13		1,13		1,13		1,13		1,13		1,13		1,13		1,13		1,13		1,13		Disnakertrans		
12	01	16		Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan					3,270,800,000				3,702,597,000				5,257,676,000				3,850,710,000.0				3,850,710,000.0				19,932,493,000.0		Disnakertrans				
					Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	2,93	3,66		4,40		5,25		6,17		7,10		7,10		7,10		7,10		7,10		7,10		7,10		7,10		7,10		Disnakertrans		
					Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Disnakertrans		
					Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9,49	9,51		9,53		9,54		9,55		9,56		9,56		9,56		9,56		9,56		9,56		9,56		9,56		9,56		Disnakertrans		
12	01	17		Program Pengawasan Ketenagakerjaan					3,559,226,000				3,575,910,000				3,276,793,000				3,718,950,000.0				3,718,950,000.0				17,849,829,000.0		Disnakertrans				
					Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	2,92	2,98		3,04		3,10		3,11		3,13		3,13		3,13		3,13		3,13		3,13		3,13		3,13		3,13		Disnakertrans		
12	01	18		Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi					3,021,210,000				2,318,626,000				4,095,203,000				2,411,380,000.0				2,411,380,000.0				14,257,799,000.0		Disnakertrans				
					Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	14,95	15,25		15,55		15,86		16,18		16,50		16,50		16,50		16,50		16,50		16,50		16,50		16,50		16,50		Disnakertrans		
12	01	19		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri					3,296,932,500				6,299,650,000				6,182,804,800				6,551,640,000.0				6,551,640,000.0				28,882,667,300.0		Disnakertrans				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																																	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
					Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1,25	1,25			1,26			1,27			1,28			1,28			1,28			1,28			1,28							Disnakertrans															
1 2	0 2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					23,303,456,800		11,537,165,400			6,740,000,000			12,140,940,000.0			12,140,940,000.0						65,862,502,200.0																									
1 2	0 2	0 1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana					9,288,579,100		5,380,480,400			3,140,000,000			5,737,980,000.0			5,737,980,000.0						29,285,019,500.0									DP3AKKB																
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00						100,00			100,00							DP3AKKB															
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00						100,00			100,00							DP3AKKB															
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00						100,00			100,00							DP3AKKB															
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00						100,00			100,00							DP3AKKB															
1 2	0 2	1 7	Program Pemberdayaan Perempuan					0.00		0.00			1,800,000,000			3,443,860,000.0			3,443,860,000.0						8,687,720,000.0									DP3AKKB																
					Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleman (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			15,29			16,47			17,64						17,64			17,64							DP3AKKB															
					Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			32,13			33,13			34,13						34,13			34,13							DP3AKKB															
					Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			16,67			20,00			23,33						23,33			23,33							DP3AKKB															
					Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			82,22			93,33			100,00						100,00			100,00							DP3AKKB															
1 2	0 2	1 8	Program Perlindungan Perempuan dan Anak					0.00		0.00			1,800,000,000			2,959,100,000.0			2,959,100,000.0						7,718,200,000.0									DP3AKKB																
					Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00						100,00			100,00							DP3AKKB															

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				25,00		37,50		37,50		37,50		DP3AKKB
					Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				25,00		37,50		37,50		37,50		DP3AKKB
1 2	0 3			Pangan				10,792,690,000		13,155,500,000			14,116,900,000			13,861,450,000.0		13,861,450,000.0		65,787,990,000.0	
1 2	0 3	0 1		Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan				5,899,526,600		6,263,665,775			7,223,090,000			6,693,930,000.0		6,693,930,000.0		32,774,142,375.0	Dinas Ketapang
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Ketapang
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Ketapang
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Ketapang
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Ketapang
1 2	0 3	1 5		Program Peningkatan Ketahanan Pangan				989,783,400		2,300,670,225			1,937,810,000			2,392,700,000.0		2,392,700,000.0		10,013,663,625.0	Dinas Ketapang
					Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93,90	95,10		96,30				93,50		94,50		95,00		95,00		Dinas Ketapang
1 2	0 3	1 6		Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan				2,160,734,000		2,265,306,000			2,361,000,000			2,355,920,000.0		2,355,920,000.0		11,498,880,000.0	Dinas Ketapang
					Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	80,09	82,50		85,50				84,50		85,50		86,50		86,50		Dinas Ketapang
1 2	0 3	1 7		Program Perlindungan Konsumen Pangan				1,742,646,000		2,325,858,000			2,595,000,000			2,418,900,000.0		2,418,900,000.0		11,501,304,000.0	Dinas Ketapang
					Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	73,21	90,00		90,00				80,50		81,50		82,50		82,50		Dinas Ketapang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas Ketapang
1	2	0	5		Lingkungan Hidup				19,759,778,000		16,074,455,000		18,471,500,000		17,795,710,000.0		17,795,710,000.0		89,897,153,000.0	
1	2	0	5	0	1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			14,344,602,100		11,874,555,000		14,641,500,000		13,427,810,000.0		13,427,810,000.0		67,716,277,100.0	DLHK
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DLHK
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DLHK
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DLHK
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DLHK
1	2	0	5	1	5	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			5,415,175,900		4,199,900,000		2,680,000,000		3,436,132,500.0		3,436,132,500.0		19,167,340,900.0	DLHK
					Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	51,00	51,50			52,00		52,50		53,00		53,50		53,50		DLHK
					Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	58,80	59,00			59,20		66,80		68,80		70,80		70,80		DLHK
					Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		16,90		17,60		19,00		19,00		DLHK
1	2	0	5	1	6	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			0.00		0.00		1,150,000,000		931,767,500.0		931,767,500.0		3,013,535,000.0	DLHK
					Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		98,00		98,00		100,00		100,00		DLHK

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok)	203,00	0,00									68,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 2	0 7	1 6	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				4,360,200,000		6,661,810,700		3,943,879,000		2,436,750,000.0		2,436,750,000.0		19,839,389,700.0	Dinas PMD
				Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: Lembaga)	41,00	41,00		41,00		0,00		0,00		0,00		41,00		Dinas PMD
				Lembaga Kemasyarakatan desa yang diberdayakan di 48 Desa tertinggal (Satuan: Desa)	0,00	0,00		0,00		20,00		16,00		12,00		48,00		Dinas PMD
1 2	0 7	1 8	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan				0.00		0.00		2,953,823,080		2,491,540,000.0		2,491,540,000.0		7,936,903,080.0	Dinas PMD
				Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di berdayakan di 48 desa Tertinggal (Satuan: Desa)	0,00	0,00		0,00		20,00		16,00		12,00		48,00		Dinas PMD
1 2	0 7	1 9	Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan				0.00		0.00		1,685,954,760		2,000,000,000.0		2,000,000,000.0		5,685,954,760.0	Dinas PMD
				Pendampingan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diberdayakan di 48 desa berkembang (Satuan: Desa)	0,00	0,00		0,00		20,00		16,00		12,00		48,00		Dinas PMD
1 2	0 8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1,801,467,000		1,536,295,000		1,500,000,000		1,597,750,000.0		1,597,750,000.0		8,033,262,000.0	
1 2	0 8	1 6	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				0.00		0.00		1,500,000,000		1,597,750,000.0		1,597,750,000.0		4,695,500,000.0	DP3AKKB
				Persentase perangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kebijakan kependudukan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DP3AKKB
				Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		4,03		4,70		5,37		5,37		DP3AKKB
				Persentase peserta KB Aktif (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,02		0,03		0,03		0,03		DP3AKKB
1 2	0 9		Perhubungan				49,680,000,000		61,978,000,000		60,666,810,000		66,740,970,000.0		66,740,970,000.0		305,806,750,000.0	
1 2	0 9	0 1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan				13,927,819,825		19,308,000,000		20,063,905,000		22,364,160,000.0		22,364,160,000.0		98,028,044,825.0	Dishub
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			100,00		100,00		100,00			Dishub
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			100,00		100,00		100,00			Dishub
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			100,00		100,00		100,00			Dishub
1 2	0 9	1 5		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan				4,051,686,000		3,150,000,000		20,598,365,000			18,755,310,000.0		18,755,310,000.0		65,310,671,000.0		Dishub
					Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			50,00		50,00		50,00			Dishub
1 2	0 9	1 6		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan				5,249,682,527		11,690,000,000		5,936,900,000			11,157,600,000.0		11,157,600,000.0		45,191,782,527.0		Dishub
					Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			10,00		10,00		10,00		30,00	Dishub
					Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana Transportasi (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			30,77		30,77		38,46		100,00	Dishub
					Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			15,00		15,00		20,00		50,00	Dishub
1 2	0 9	1 7		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				22,862,410,373		22,287,790,000		7,970,000,000			7,700,000,000.0		7,700,000,000.0		68,520,200,373.0		Dishub
					Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Dishub
					Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			10,00		15,00		25,00		50,00	Dishub
					Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			20,00		20,00		20,00		60,00	Dishub
1 2	0 9	1 8		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan				2,069,550,875		1,406,000,000		1,420,060,000			1,462,240,000.0		1,462,240,000.0		7,820,090,875.0		Dishub
					Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			50,00		100,00		100,00		100,00	Dishub

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Sarana Transportasi Darat (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Dishub
1 2	0 9	1 9	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara				1,518,850,400		4,136,210,000		4,677,580,000		5,301,660,000.0		5,301,660,000.0		20,935,960,400.0		Dishub	
					Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		50,00		100,00		100,00		100,00		Dishub	
					Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub	
1 2	1 0		Komunikasi dan Informatika				36,656,339,000		33,768,408,000		33,293,200,000		35,800,570,000.0		35,800,570,000.0		175,319,087,000.0			
1 2	1 0	0 1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian				5,040,538,000		5,544,878,000		5,662,770,000		6,448,090,000.0		6,448,090,000.0		29,144,366,000.0		Diskominfo	
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo	
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo	
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo	
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo	
1 2	1 0	1 5	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi				12,736,064,600		15,078,782,000		15,968,430,000		15,681,940,000.0		15,681,940,000.0		75,147,156,600.0		Diskominfo	
					Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Satuan: %)	12,41	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00		Diskominfo	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Satuan: %)	12,41	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00		100,00		Diskominfo
					Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan (Satuan: Jumlah)	0,00	0,00		9,00		12,00		13,00		17,00		17,00		17,00		Diskominfo
1 2	1 0	1 6		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik				18,879,736,400		13,144,748,000		11,662,000,000		13,670,540,000.0		13,670,540,000.0		71,027,564,400.0		71,027,564,400.0	Diskominfo
					Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	10,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo
1 2	1 1			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				15,463,680,000		15,172,450,000		22,418,000,000		16,333,490,000.0		16,333,490,000.0		85,721,110,000.0		85,721,110,000.0	
1 2	1 1	0 1		Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				9,108,874,400		6,609,373,000		18,118,000,000		7,427,860,000.0		7,427,860,000.0		48,691,967,400.0		48,691,967,400.0	Dinas KUKM
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas KUKM
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas KUKM
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas KUKM
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas KUKM
1 2	1 1	1 5		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil				2,234,167,200		2,125,116,000		1,575,000,000		3,509,510,000.0		3,509,510,000.0		12,953,303,200.0		12,953,303,200.0	Dinas KUKM
					Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain (Satuan: %)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		5,00		Dinas KUKM
1 2	1 1	1 6		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi				763,425,000		1,075,493,000		1,050,000,000		2,368,520,000.0		2,368,520,000.0		7,625,958,000.0		7,625,958,000.0	Dinas KUKM

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %)	6,00	6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			30,00				Dinas KUKM			
1 2	1 1	1 7		Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi				1,768,533,000			1,468,840,000			1,675,000,000			3,027,600,000.0			3,027,600,000.0					3,027,600,000.0			10,967,573,000.0				Dinas KUKM			
					Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan: %)	0,00	6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			30,00				Dinas KUKM			
1 2	1 2			Penanaman Modal				14,463,830,000			10,453,000,000			10,841,100,000			11,163,170,000.0			11,163,170,000.0					11,163,170,000.0			58,084,270,000.0							
1 2	1 2	0 1		Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				7,258,803,160			3,828,017,000			5,529,886,400			4,273,170,000.0			4,273,170,000.0					4,273,170,000.0			25,163,046,560.0				DPMPTSP			
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				DPMPTSP			
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				DPMPTSP			
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				DPMPTSP			
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				DPMPTSP			
1 2	1 2	1 5		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi				3,867,933,240			2,891,390,000			2,250,000,000			3,007,050,000.0			3,007,050,000.0					3,007,050,000.0			15,023,423,240.0				DPMPTSP			
					Jumlah calon investor yang mendaftar (Satuan: Investor)	0,00	0,00			0,00			1,000,00			1,000,00			1,000,00			1,000,00			1,000,00			3,000,00				DPMPTSP			
					Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan: BUMD)	0,00	0,00			0,00			2,00			2,00			2,00			2,00			2,00			6,00				DPMPTSP			
1 2	1 2	1 6		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				1,538,325,000			1,329,695,000			1,294,803,600			1,382,890,000.0			1,382,890,000.0					1,382,890,000.0			6,928,603,600.0				DPMPTSP			
					Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	75,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				DPMPTSP			
1 2	1 2	1 7		Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal				851,631,600			881,125,000			816,410,000			916,370,000.0			916,370,000.0					916,370,000.0			4,381,906,600.0				DPMPTSP			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					Persentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			DPMPTSP			
1 2	1 2	1 8	Program Pengendalian Penanaman Modal					947,137,000		1,522,773,000		950,000,000		1,583,690,000.0		1,583,690,000.0		6,587,290,000.0													DPMPTSP			
					Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: Cakupan)	16,96	17,03			17,09			17,15			17,22			17,28			17,28			17,28			17,28			DPMPTSP			
1 2	1 3		Kepemudaan dan Olahraga					34,977,610,000		35,000,000,000		35,000,000,000		36,774,420,000.0		36,774,420,000.0		178,526,450,000.0																
1 2	1 3	0 1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga					4,513,050,000		5,317,315,000		5,486,315,000		5,904,410,000.0		5,904,410,000.0		27,125,500,000.0													Dispora			
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00					Dispora			
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00					Dispora			
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00					Dispora			
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00			100,00			100,00			100,00			100,00					Dispora			
1 2	1 3	1 5	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan					8,479,512,000		8,141,070,000		4,963,685,000		8,466,720,000.0		8,466,720,000.0		38,517,707,000.0													Dispora			
					Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)	70,00	75,00			80,00		85,00		90,00		100,00			100,00			100,00			100,00						Dispora			
1 2	1 3	1 6	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga					9,608,887,025		7,696,985,000		12,100,000,000		8,004,870,000.0		8,004,870,000.0		45,415,612,025.0													Dispora			
					Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		80,00		85,00		85,00			85,00			85,00			85,00						Dispora			
1 2	1 3	1 7	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga					7,128,820,975		8,350,000,000		6,350,000,000		8,684,000,000.0		8,684,000,000.0		39,196,820,975.0													Dispora			
					Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	50,00	75,00			80,00		85,00		90,00		100,00			100,00			100,00			100,00						Dispora			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 2	1 3	1 8	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		5,247,340,000		5,494,630,000		6,100,000,000		5,714,420,000.0		5,714,420,000.0		28,270,810,000.0	Dispora
			Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	60,00	75,00	80,00		85,00		90,00		100,00		100,00		Dispora
1 2	1 4		Statistik		824,041,000		1,704,400,000		1,063,840,000		1,772,580,000.0		1,772,580,000.0		7,137,441,000.0	
1 2	1 4	0 1	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian		366,591,000		804,400,000		800,000,000		836,580,000.0		836,580,000.0		3,644,151,000.0	Diskominfo
			Ketersediaan Database Sektoral (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00		50,00		75,00		100,00		100,00		Diskominfo
1 2	1 4	0 2	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		457,450,000		900,000,000		263,840,000		936,000,000.0		936,000,000.0		3,493,290,000.0	Bappeda
			Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan Pembangunan Sesuai SIPD (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00		70,00		80,00		90,00		90,00		Bappeda
1 2	1 5		Persandian		539,460,000		1,017,192,000		852,000,000		600,000,000.0		600,000,000.0		3,608,652,000.0	
1 2	1 5	1 5	Program Tata Kelola Persandian		539,460,000		1,017,192,000		852,000,000		600,000,000.0		600,000,000.0		3,608,652,000.0	Diskominfo
			Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Diskominfo
1 2	1 6		Kebudayaan		11,711,500,000		2,000,000,000		7,745,000,000		2,080,000,000.0		2,080,000,000.0		25,616,500,000.0	
1 2	1 6	1 5	Program Pelestarian Kebudayaan		8,738,733,000		2,000,000,000		7,745,000,000		2,080,000,000.0		2,080,000,000.0		22,643,733,000.0	Dindikbud
			Cakupan Pembinaan Organisasi Seni Budaya (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
			Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	70,00	85,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
			Persentase Kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum yang diimplementasikan (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
			Persentase Kebijakan di bidang pembinaan sejarah dan pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat yang diimplementasikan (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Kebijakan di bidang pembinaan kesenian dan bahasa yang diimplementasikan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
					Persentase Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah sesuai standar (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dindikbud
1 2	1 7		Perpustakaan					13,609,800,000		10,377,400,000		10,170,000,000		11,151,920,000.0		11,151,920,000.0		56,461,040,000.0		
1 2	1 7	0 1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah					8,416,518,500		6,770,400,000		6,945,000,000		7,400,640,000.0		7,400,640,000.0		36,933,198,500.0		DPKD
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPKD
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPKD
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPKD
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPKD
1 2	1 7	1 5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					2,784,654,500		1,427,000,000		1,215,000,000		1,484,080,000.0		1,484,080,000.0		8,394,814,500.0		DPKD
					Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah (Satuan: %)	75,00	85,00			90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		DPKD
1 2	1 7	1 6	Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan					2,408,627,000		2,180,000,000		2,010,000,000		2,267,200,000.0		2,267,200,000.0		11,133,027,000.0		DPKD
					Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	70,00	75,00			80,00		85,00		85,00		85,00		85,00		DPKD
1 2	1 8		Kearsipan					1,844,180,000		1,933,600,000		2,041,000,000		2,010,950,000.0		2,010,950,000.0		9,840,680,000.0		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan				1,844,180,000		1,933,600,000		2,041,000,000		2,010,950,000.0		2,010,950,000.0		9,840,680,000.0	DPKD	
				Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	70,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		DPKD	
				Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	70,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		DPKD	
				Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	70,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		DPKD	
2	0		Urusan Pilihan																
2	0		Kelautan dan Perikanan				16,687,270,000		17,810,500,000		19,135,700,000		19,458,950,000.0		19,458,950,000.0		92,551,370,000.0		
2	0	0					10,753,142,507		8,753,661,000		12,011,150,000		10,039,810,000.0		10,039,810,000.0		51,597,573,507.0	DKP	
		1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan																
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DKP	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DKP	
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DKP	
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DKP	
2	0	1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				2,188,586,493		3,824,455,000		2,912,700,000		3,977,440,000.0		3,977,440,000.0		16,880,621,493.0	DKP	
				Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	7,49	8,01		8,08		8,16		8,23		8,61		8,62		DKP	
				Persentase capaian kinerja pelayanan usaha kepelabuhanan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DKP	
2	0	1	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				454,210,000		701,089,500		708,110,000		729,140,000.0		729,140,000.0		3,321,689,500.0	DKP	
				Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	50,00	60,00		20,00		25,00		30,00		35,00		35,00		DKP	
2	0	1	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan				1,869,302,000		1,686,869,000		1,703,740,000		1,754,350,000.0		1,754,350,000.0		8,768,611,000.0	DKP	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	50,00	100,00			100,00			100,00		100,00		100,00			DKP
					Jumlah ruang lingkup pengujia dan mutu hasil perikanan pada ISO 17025 (Satuan: Dokumen)	0,00	0,00			1,00			1,00		1,00		3,00			DKP
					Produksi Benih Ikan Laut dan Payau (Satuan: Milyar)	0,50	0,00			1,00			1,25		1,50		1,50			
200	018	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					1,422,029,000		2,844,425,500		1,800,000,000			2,958,210,000.0		2,958,210,000.0		11,982,874,500.0	DKP
					Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: Poin)	115,00	116,00			117,00			118,00		119,00		120,00		120,00	DKP
					Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Provinsi Banten (Satuan: %)	0,00	0,00			100,00			100,00		100,00		100,00			DKP
					Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten (Satuan: %)	0,00	0,00			100,00			100,00		100,00		100,00			DKP
200	02		Pariwisata					15,977,050,000		17,837,000,000		16,432,500,000			18,939,890,000.0		18,939,890,000.0		88,126,330,000.0	
200	021	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pariwisata					4,309,807,000		4,854,006,600		4,356,500,000			5,437,550,000.0		5,437,550,000.0		24,395,413,600.0	Dispar
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			100,00			100,00		100,00		100,00			Dispar
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			100,00			100,00		100,00		100,00			Dispar
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			100,00			100,00		100,00		100,00			Dispar
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			100,00			100,00		100,00		100,00			Dispar
200	025	15	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					1,562,660,500		1,751,293,300		1,600,000,000			1,821,350,000.0		1,821,350,000.0		8,556,653,800.0	Dispar

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	0,00	0,00				0,00		4.044.827,00		4.327.965,00		4.760.761,00		4.760.761,00		Dispar
202	02	16		Program Pemasaran Produk Pariwisata					6,183,468,000		7,304,107,250			6,750,000,000		7,596,280,000.0		7,596,280,000.0		35,430,135,250.0	Dispar
					Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14.705.763,00	15.146.936,00		15.601.344,00		16.361.411,00		17.528.110,00		19.105.640,00		19.105.640,00		19.105.640,00		Dispar
					Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1,33	1,36		1,39		1,44		1,54		1,60		1,60		1,60		Dispar
202	02	17		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					1,224,217,100		1,522,666,500			1,376,000,000		1,583,580,000.0		1,583,580,000.0		7,290,043,600.0	Dispar
					Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang)	200,00	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		Dispar
202	02	18		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					2,696,897,400		2,404,926,350			2,350,000,000		2,501,130,000.0		2,501,130,000.0		12,454,083,750.0	Dispar
					Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Sapta Pesona (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dispar
202	03			Pertanian					36,199,310,000		52,530,500,000			55,984,000,000		57,646,930,000.0		57,646,930,000.0		260,007,670,000.0	
202	03	01		Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian					19,039,406,875		29,811,664,675			30,130,580,000		32,771,300,000.0		32,771,300,000.0		144,524,251,550.0	Distan
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distan
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distan
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distan
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distan
202	03	15		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan					4,134,724,000		4,105,099,200			4,800,700,000		4,893,310,000.0		4,893,310,000.0		22,827,143,200.0	Distan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Kw/Ha)	55,68	57,35		59,07		51,72		51,93		52,43		52,43		Distan
				Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2.396.68 8,00	2.408.6 71,00		2.420.71 4,00		2.001.71 0,00		2.116.80 2,00		2.243.11 3,00		11.191.01 0,00		Distan
				Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	20.551,0 0	21.579, 00		22.657,0 0		23.790,0 0		24.980,0 0		26.229,0 0		26.229,00		Distan
				Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	6.801,00	7.141,0 5		7.498,10		7.873,01		8.266,65		8.679,99		8.679,99		Distan
				Penyediaan benih sumber Tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai) (Satuan: Ton)	10,00	0,00		0,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Distan
				Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)	5,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Distan
				Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih tanaman pangan (Satuan: %)	10,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Distan
2 0	0 3	1 6	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura				3,351,063,000		3,357,868,000		3,545,320,000		3,492,190,000.0		3,492,190,000.0		17,238,631,000.0	Distan
				Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	7.498,00	8.246,0 0		8.970,00		10.101,0 0		10.692,0 0		11.672,0 0		11.672,00		Distan
				Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	700,00	735,00		771,75		810,33		850,85		893,39		893,39		Distan
				Penyediaan benih sumber Tanaman Hortikultura (Satuan: Ton)	0,00	0,00		0,00		25,00		30,00		40,00		40,00		Distan
				Pengamanan Produksi Tanaman Hortikultura dari gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Distan
				Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih tanaman Hortikultura (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Distan
				Pengembangan Kawasan Buah Durian (Satuan: Ha)	0,00	0,00		0,00		35,00		50,00		100,00		185,00		Distan
2 0	0 3	1 7	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan				2,375,393,000		2,238,808,200		2,494,300,000		2,952,370,000.0		2,952,370,000.0		13,013,241,200.0	Distan
				Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton)	3.184,00	0,00		0,00		3.012,00		3.072,00		3.133,00		9.217,00		Distan
				Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1.694,00	1.728,0 0		1.762,00		1.798,00		1.834,00		1.870,00		1.870,00		Distan
				Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	43.116,0 0	43.978, 00		44.858,0 0		45.755,0 0		46.670,0 0		47.604,0 0		47.604,00		Distan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Penyediaan Benih Sumber tanaman perkebunan (Kakao, Kelapa) (Satuan: Batang)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		300,00		Distan
					Pengamanan Produksi Tanaman Perkebunan dari gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			10,00		10,00		10,00		10,00		Distan
					Pengawasan Benih Perkebunan (Satuan: Komoditi)	0,00	0,00		0,00			3,00		3,00		3,00		3,00		Distan
20	03	18		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan				1,931,445,925		3,937,665,925			4,963,800,000		4,095,180,000.0		4,095,180,000.0		19,023,271,850.0	Distan
					Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)	33,52	33,52		34,18			145.135,00		147.978,00		150.881,00		443.998,00		Distan
					Peningkatan Capaian Retribusi UPTD BP3T (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			10,00		10,00		10,00		30,00		Distan
20	03	19		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian				3,867,884,000		6,851,536,200			7,331,000,000		7,125,600,000.0		7,125,600,000.0		32,301,620,200.0	Distan
					Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	80,00	85,00		87,00			90,00		100,00		100,00		100,00		Distan
20	03	20		Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1,499,393,200		2,227,857,800			2,718,300,000		2,316,980,000.0		2,316,980,000.0		11,079,511,000.0	Distan
					Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Satuan: Kasus)	0,00	0,00		0,00			28,00		25,00		20,00		20,00		Distan
					Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Hewan (Satuan: Unit)	0,00	0,00		0,00			22,00		25,00		30,00		30,00		Distan
					Peningkatan Capaian Retribusi UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			10,00		10,00		10,00		10,00		Distan
20	04			Kehutanan				8,440,592,000		8,459,545,000			6,350,000,000		8,797,930,000.0		8,797,930,000.0		40,845,997,000.0	
20	04	16		Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan				0.00		0.00			1,300,000,000		1,801,152,000.0		1,801,152,000.0		4,902,304,000.0	DLHK
					Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			10,00		10,00		10,00		10,00		DLHK
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan: Kelompok)	0,00	0,00		0,00			3,00		3,00		3,00		3,00		DLHK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan: Kelompok)	0,00	0,00		0,00			3,00		3,00		3,00		3,00		DLHK
20	04	17	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan					0.00		0.00			5,050,000,000		6,996,778,000.0		6,996,778,000.0		19,043,556,000.0	DLHK
					Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			20,00		20,00		20,00		20,00		DLHK
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (Satuan: Kelompok)	0,00	0,00		0,00			10,00		10,00		10,00		30,00		DLHK
					Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (Satuan: Batang)	0,00	0,00		0,00			180.000,00		180.000,00		180.000,00		540.000,00		DLHK
					Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			12,50		12,50		12,50		37,50		DLHK
					Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan: Ha)	0,00	0,00		0,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00		DLHK
					Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan: Ha)	0,00	0,00		0,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00		DLHK
20	05		Energi dan Sumberdaya Mineral					30,867,530,000		37,324,000,000		36,683,500,000		39,191,370,000.0		39,191,370,000.0		183,257,770,000.0		
20	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					7,878,419,500		8,382,421,000		8,528,640,000		9,092,120,000.0		9,092,120,000.0		42,973,720,500.0		Dinas ESDM
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas ESDM
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas ESDM
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas ESDM

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00			100,00			100,00			100,00				100,00						Dinas ESDM			
20	05	16		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				20,815,338,500		21,886,450,000		21,641,390,000		22,761,910,000.0		22,761,910,000.0			109,866,998,500.0													Dinas ESDM			
					Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: ss)	10.000,00	10,000		10,000		10,000		10,000			10,000			50,000								50,000						Dinas ESDM		
20	05	17		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan				350,965,000		1,809,500,000		1,660,000,000		1,881,880,000.0		1,881,880,000.0			7,584,225,000.0														Dinas ESDM		
					Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %)	9,92	16,17		22,83		29,92		37,42		45,33		45,33			45,33								45,33					Dinas ESDM		
20	05	18		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah				0.00		0.00		2,302,797,500		2,588,420,172.0		2,588,420,172.0			7,479,637,844.0														Dinas ESDM		
					Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		55,44		76,94		100,00		100,00			100,00								100,00					Dinas ESDM		
20	05	19		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara				0.00		0.00		2,550,672,500		2,867,039,828.0		2,867,039,828.0			8,284,752,156.0														Dinas ESDM		
					Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		70,32		86,30		100,00		100,00			100,00									100,00				Dinas ESDM		
20	06			Perdagangan				5,133,984,500		10,000,335,800		6,800,000,000		10,400,360,000.0		10,400,360,000.0			42,735,040,300.0																
20	06	15		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri				1,807,687,500		3,917,439,800		2,650,000,000		4,074,140,000.0		4,074,140,000.0			16,523,407,300.0														Disperindag		
					Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			5,00								5,00					Disperindag		
					Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00									100,00				Disperindag		
					Peningkatan Persentase Produk Lokal yang beredar pada Retail Modern (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00			30,00													Disperindag		
					Jumlah Komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka (Satuan: Komoditi)	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00			6,00													Disperindag		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2066	16	6	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri			1,071,557,000		1,586,966,000		1,550,000,000		1,650,450,000.0		1,650,450,000.0		7,509,423,000.0	Disperindag	
			Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Triliun)	2.828,83	2.970,27		3.118,79		3.274,72		3.438,46		3.610,38		3.610,38			Disperindag
			Calon eksportir baru (Satuan: eksportir)	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00			Disperindag
			Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor (Satuan: jumlah)	0,00	0,00		0,00		6,00		6,00		6,00		18,00			Disperindag
2068	168	8	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			782,250,000		1,171,421,000		800,000,000		1,218,280,000.0		1,218,280,000.0		5,190,231,000.0	Disperindag	
			Cakupan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		30,00		35,00		40,00		40,00			Disperindag
2069	169	9	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri			0.00		0.00		1,800,000,000		3,457,490,000.0		3,457,490,000.0		8,714,980,000.0	Disperindag	
			Indeks Keberdayaan Konsumen (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		30,00		32,00		35,00		35,00			Disperindag
			Persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Disperindag
			Persentase penyelesaian sengketa konsumen (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		50,00		55,00		60,00		60,00			Disperindag
			Persentase Peningkatan Industri yang ber SNI (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00			Disperindag
207	07	7	Perindustrian			85,577,895,500		46,050,664,200		59,885,000,000		48,529,190,000.0		48,529,190,000.0		288,571,939,700.0		
2070	071	1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan			82,305,688,350		40,551,830,200		56,485,000,000		42,810,390,000.0		42,810,390,000.0		264,963,298,550.0	Disperindag	
			Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Disperindag
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Disperindag
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Disperindag

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disperindag
20	07	15	Program Peningkatan Daya Saing Industri					2,320,140,000		4,548,563,000		2,300,000,000		4,730,510,000.0		4,730,510,000.0		18,629,723,000.0		Disperindag
					Jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match (Satuan: Jumlah)	0,00	0,00			0,00		40,00		40,00		40,00		120,00		Disperindag
					Persentase Pertumbuhan Produk Ekspor industri yang berbasis sumber daya alam dan atau Lokal (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		3,00		3,00		4,00		10,00		Disperindag
20	07	16	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri					952,067,150		950,271,000		1,100,000,000		988,290,000.0		988,290,000.0		4,978,918,150.0		Disperindag
					Cakupan Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Industri Kecil Menengah (Satuan: Jumlah)	0,00	0,00			0,00		50,00		50,00		50,00		150,00		Disperindag
30			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																	
30	01		Administrasi Pemerintahan					403,807,300,000		417,874,500,000		314,603,376,000		443,118,410,000.0		443,118,410,000.0		2,022,521,996,000.0		
30	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD					69,319,904,500		70,733,220,000		58,704,992,000		77,703,420,000.0		77,703,420,000.0		354,164,956,500.0		Set DPRD
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Set DPRD
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Set DPRD
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Set DPRD
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Set DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
300	01	02	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum				29,292,494,000		49,617,064,000		25,532,787,000		19,675,769,500.0		22,165,835,700.0		146,283,950,200.0	Setda Biro Umum	
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Umum	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Umum	
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Umum	
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Umum	
300	01	03	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan				28,860,123,100		28,632,637,500		8,088,789,900		10,133,000,000.0		10,133,000,000.0		85,847,550,500.0	Setda Biro ARTP	
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro ARTP	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro ARTP	
300	01	04	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Administrasi Pembangunan Daerah				5,203,182,500		3,065,000,000		2,873,500,000		3,576,980,000.0		3,576,980,000.0		18,295,642,500.0	Setda Biro Adpem	
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Adpem	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Adpem	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab					
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
1				2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Adpem
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Adpem
30	01	05		Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Bina Perekonomian				1,538,835,000			911,910,000			1,334,962,000			1,180,520,000.0		1,180,520,000.0		6,146,747,000.0	Setda Biro Perekonomian
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Perekonomian
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Perekonomian
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Perekonomian
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Perekonomian
30	01	06		Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Kesejahteraan Rakyat				1,988,051,265			1,900,000,000			1,900,000,000			2,238,080,000.0		2,238,080,000.0		10,264,211,265.0	Setda Biro Kesra
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Kesra
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Kesra
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00				100,00		100,00		100,00		100,00			Setda Biro Kesra

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Kesra
30	01	07	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Organisasi					891,754,500		463,200,075		479,000,000		534,150,000.0		534,150,000.0		2,902,254,575.0		Setda Biro Organisasi
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Organisasi
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Organisasi
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Organisasi
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Organisasi
30	01	08	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Pemerintahan					1,297,746,000		1,194,500,000		1,497,000,000		1,339,630,000.0		1,339,630,000.0		6,668,506,000.0		Setda Biro Pemerintahan
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Pemerintahan
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Pemerintahan
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Pemerintahan
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
300	019	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam				1,518,750,200			858,861,000			1,005,610,000			1,035,490,000.0			1,035,490,000.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab																		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				Badan Penghubung			
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				Badan Penghubung			
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				Badan Penghubung			
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				Badan Penghubung			
30	01	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				226,040,775,500		214,792,780,000		86,111,926,000		163,160,638,000.0		163,160,638,000.0		853,266,757,500.0														Set DPRD			
					Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00							Set DPRD		
30	01	16		Program Pembangunan Kemitraan				1,353,456,800		2,156,463,000		3,135,425,344		2,242,730,000.0		2,242,730,000.0		11,130,805,144.0															Badan Penghubung		
					Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara (Satuan: indeks)	0,00	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		4,00			4,00		4,00		4,00									Badan Penghubung		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek (Satuan: Indeks)	0,00	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		4,00			4,00		4,00		4,00									Badan Penghubung		
					Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00									Badan Penghubung		
30	01	17		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				1,458,745,500		2,081,799,925		2,057,100,000		2,165,080,000.0		2,165,080,000.0		9,927,805,425.0															Setda Biro Organisasi		
					Persentase ketercapaian kebijakan penataan kelembagaan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00									Setda Biro Organisasi		
					Persentase ketercapaian kebijakan ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00									Setda Biro Organisasi		
					Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemda (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00		100,00		100,00									Setda Biro Organisasi		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab																																	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD																																		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
3018			Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan				1,160,684,000		2,089,500,000		2,590,000,000		2,173,080,000.0		2,173,080,000.0		10,186,344,000.0	Setda Biro Pemerintahan																																
				Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Pemerintahan																																
				Persentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Pemerintahan																																
				Persentase realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Pemerintahan																																
3019			Program Perumusan Kebijakan Perekonomian				1,935,405,000		1,789,090,000		2,964,114,000		1,860,660,000.0		1,860,660,000.0		10,409,929,000.0	Setda Biro Perekonomian																																
				Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian (Satuan: Dokumen)	0,00	0,00		0,00		13,00		12,00		12,00		37,00		Setda Biro Perekonomian																																
				Jumlah Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan (Satuan: Dokumen)	0,00	0,00		0,00		11,00		11,00		11,00		33,00		Setda Biro Perekonomian																																
				Jumlah Dokumen Kebijakan Produksi Daerah (Satuan: Dokumen)	0,00	0,00		0,00		15,00		16,00		17,00		48,00		Setda Biro Perekonomian																																
3020			Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum				2,518,028,000		2,554,552,500		2,580,100,000		2,656,740,000.0		2,656,740,000.0		12,966,160,500.0	Setda Biro Hukum																																
				Persentase realisasi target propemperda (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Hukum																																
				Persentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah atau Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Hukum																																
				Persentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Hukum																																
				Persentase pelayanan bantuan hukum (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Hukum																																
3021			Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur				625,899,800		1,264,139,000		1,276,790,000		1,314,710,000.0		1,314,710,000.0		5,796,248,800.0	Setda Biro Infrastruktur																																
				Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		20,00		60,00		100,00		100,00		Setda Biro Infrastruktur																																
				Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		47,06		76,47		100,00		100,00		Setda Biro Infrastruktur																																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp								
1			2		3		4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17
					Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Persandian (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			42,86			71,40			100,00			100,00			Setda Biro Infrastruktur
30	01	22	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3,560,698,735				6,577,000,000			8,040,000,000			6,840,080,000.0			6,840,080,000.0			31,857,858,735.0	Setda Biro Kesra
					Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahtaraan Keluarga (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			Setda Biro Kesra
					Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Bidang Sosial dan Keagamaan (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			Setda Biro Kesra
					Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			100,00			100,00			100,00			100,00			Setda Biro Kesra
30	01	23	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan						3,568,417,500				5,272,000,000			3,750,000,000			5,482,880,000.0			5,482,880,000.0			23,556,177,500.0	Setda Biro Adpem
					Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)	70,00	75,00				80,00			85,00			90,00			90,00			90,00			Setda Biro Adpem
					Persentasi Realisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: %)	0,00	0,00				0,00			85,00			90,00			90,00			90,00			Setda Biro Adpem
					Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan: %)	70,00	75,00				80,00			85,00			90,00			90,00			90,00			Setda Biro Adpem
30	01	24	Program Fasilitas dan Pelayanan Pimpinan						10,206,146,900				10,849,862,500			30,745,810,100			31,774,950,000.0			31,774,950,000.0			115,351,719,500.0	Setda Biro ARTP
					Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	70,00	75,00				80,00			85,00			90,00			90,00			90,00			Setda Biro ARTP
					Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)	70,00	75,00				80,00			85,00			90,00			90,00			90,00			Setda Biro ARTP
					Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	70,00	75,00				80,00			85,00			90,00			90,00			90,00			Setda Biro ARTP
30	01	25	Program Pelayanan Umum						6,744,856,000				7,539,436,000			34,333,213,000			41,968,470,500.0			39,478,404,300.0			130,064,379,800.0	Setda Biro Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Setda Biro Umum
300	016	2	Program Dukungan Layanan Aspirasi Masyarakat, Komunikasi dan Informasi DPRD				0.00		0.00		31,784,582,000		60,223,862,000.0		60,223,862,000.0		152,232,306,000.0		Set DPRD	
					Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Set DPRD
300	02		Pengawasan				20,667,150,000		29,876,000,000		26,133,900,000		31,258,250,000.0		31,258,250,000.0		139,193,550,000.0			
300	021	0	Program Tata Kelola Pemerintahan Inspektorat				10,461,461,100		8,715,638,500		9,829,507,500		9,251,470,000.0		9,251,470,000.0		47,509,547,100.0		Inspektorat	
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
300	025	1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				10,205,688,900		21,160,361,500		16,304,392,500		22,006,780,000.0		22,006,780,000.0		91,684,002,900.0		Inspektorat	
					Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
					Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
30	03		Perencanaan					28,872,578,800		30,129,197,000		21,472,800,000		32,068,210,000.0		32,068,210,000.0		144,610,995,800.0		
30	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					17,506,140,800		14,402,748,000		10,227,737,000		15,712,690,000.0		15,712,690,000.0		73,562,005,800.0	Bappeda	
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Bappeda
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Bappeda
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Bappeda
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			100,00		100,00		100,00		100,00	Bappeda
30	03	15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan					4,716,741,600		8,457,524,000		6,816,010,000		8,795,830,000.0		8,795,830,000.0		37,581,935,600.0	Bappeda	
					Persentase dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	100,00	100,00			0,00			0,00		0,00		100,00			Bappeda
					Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00			100,00		100,00		100,00			Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp			
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	70,00	80,00			85,00			0,00		0,00		0,00		85,00		Bappeda
					Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00			0,00		0,00		0,00		75,00		Bappeda
					Persentase kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan terhadap kinerja Perangkat Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			75,00		80,00		85,00		85,00		Bappeda
					Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD (Satuan: Rupiah)	0,00	0,00			0,00			4.000.00 0.000,00		5.000.00 0.000,00		6.000.00 0.000,00		15.000.00 0.000,00		Bappeda
30	03	16	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi					1,402,025,000		2,300,000,000		1,280,613,000		2,392,000,000.0		2,392,000,000.0		9,766,638,000.0		Bappeda	
					Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00			80,00		85,00		90,00		90,00		Bappeda
					Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			75,00		80,00		85,00		85,00		Bappeda
30	03	17	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan					3,814,985,400		2,870,730,000		1,850,000,000		2,985,560,000.0		2,985,560,000.0		14,506,835,400.0		Bappeda	
					Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00			80,00		85,00		90,00		90,00		Bappeda
					Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			75,00		80,00		85,00		85,00		Bappeda
30	03	18	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					1,432,686,000		2,098,195,000		1,298,440,000		2,182,130,000.0		2,182,130,000.0		9,193,581,000.0		Bappeda	
					Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50,00	70,00			75,00			80,00		85,00		90,00		90,00		Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang IPW (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		75,00		80,00		85,00		85,00		Bappeda
					Persentase keselarasan perencanaan tata ruang dengan Pemanfaatan ruang (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		75,00		80,00		85,00		85,00		Bappeda
30	04			Keuangan				126,056,280,000		155,053,500,000		158,897,700,000		166,497,270,000.0		166,497,270,000.0		773,002,020,000.0		
30	04	01		Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				15,532,832,400		12,711,780,300		8,619,014,000		13,909,150,000.0		13,909,150,000.0		64,681,926,700.0		BPKAD
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
30	04	02		Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pendapatan Daerah				82,964,363,802		105,033,618,700		115,774,435,800		113,787,670,000.0		113,787,670,000.0		531,347,758,302.0		BPD
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPD
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPD
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPD
30	04	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					1,150,276,600		2,263,079,200		1,732,702,000		2,353,610,000.0		2,353,610,000.0		9,853,277,800.0		BPKAD
					Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	75,00	80,00			85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		BPKAD
30	04	17	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah					3,357,140,000		4,097,155,000		3,805,466,000		4,261,050,000.0		4,261,050,000.0		19,781,861,000.0		BPD
					Persentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak (%) (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		1,05		1,05		1,05		1,05		BPD
					Jumlah Inovasi yang Terimplementasikan (Satuan: Inovasi)	0,00	0,00			0,00		2,00		3,00		3,00		3,00		BPD
					Penurunan Gangguan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Satuan: Per Kejadian)	0,00	0,00			0,00		30,00		25,00		20,00		20,00		BPD
					Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		50,00		35,00		25,00		25,00		BPD
					Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		2,80		3,00		3,20		32,00		BPD
30	04	18	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah					1,204,452,000		1,787,890,500		918,359,000		1,859,410,000.0		1,859,410,000.0		7,629,521,500.0		BPKAD
					Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	70,00	80,00			90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
30	04	19	Program Penatausahaan Aset Daerah					3,681,829,000		6,847,750,000		2,606,925,000		7,121,660,000.0		7,121,660,000.0		27,379,824,000.0		BPKAD
					Capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BPKAD
30	04	20	Program Peningkatan Pajak Daerah					0.00		0.00		24,390,798,200		22,204,720,000.0		22,204,720,000.0		68,800,238,200.0		BPD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			8,00		8,00		8,00		BPD
					Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan (Satuan: %)	2,36	0,00			0,00			17,56		18,10		18,64		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,72		10,23		10,03		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,94		10,12		9,92		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,75		10,22		10,01		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,72		10,23		10,03		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,86		10,16		9,96		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,67		10,26		10,05		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,76		10,21		10,01		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,74		10,23		10,02		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,73		10,23		10,02		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,71		10,24		10,03		BPD
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			9,71		10,24		10,03		BPD
30	04	21		Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain				0.00		0.00		1,050,000,000		1,000,000,000.0		1,000,000,000.0		3,050,000,000.0	BPD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		2,95		2,96		2,96		2,96		BPD
30	05		Kepegawaian					10,326,110,000		11,116,500,000		12,540,600,000		11,695,970,000.0		11,695,970,000.0		57,375,150,000.0		
30	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah					4,432,614,000		4,181,603,000		5,798,240,000		4,483,660,000.0		4,483,660,000.0		23,379,777,000.0		BKD
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKD
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKD
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKD
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan yang mendukung kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BKD
30	05	15	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah					2,066,316,000		3,246,637,000		2,478,222,000		2,247,446,261.0		2,247,446,261.0		12,286,067,522.0		BKD
					Persentase ASN Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		85,00		90,00		95,00		95,00		BKD
30	05	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					3,827,180,000		3,688,260,000		3,019,138,000		3,835,800,000.0		3,835,800,000.0		18,206,178,000.0		BKD
					Persentase tingkat pencapaian kualifikasi pendidikan (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		85,00		90,00		95,00		95,00		BKD
					Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pengembangan Kompetensi (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		85,00		90,00		95,00		95,00		BKD
30	05	17	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur					0.00		0.00		1,245,000,000		1,129,063,739.0		1,129,063,739.0		3,503,127,478.0		BKD
					Persentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		95,00		100,00		100,00		100,00		BKD
					Persentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00		95,00		100,00		100,00		100,00		BKD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase kinerja pegawai dalam kategori baik (Satuan: %)	0,00	0,00			0,00			93,00		94,00		95,00		95,00	BKD
30	06		Pendidikan dan Pelatihan					41,000,000,000		48,655,000,000		48,655,000,000		51,357,500,000.0		51,357,500,000.0		241,025,000,000.0		
30	06	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					35,582,808,000		24,226,061,750		30,232,452,000		25,951,400,000.0		25,951,400,000.0		141,944,121,750.0	BPSDM	
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00				100,00			BPSDM
30	06	16	Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur					1,195,594,000		1,921,566,000		1,900,300,000		1,998,430,000.0		1,998,430,000.0		9,014,320,000.0	BPSDM	
					Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	70,00	80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		85,00			BPSDM
					Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			BPSDM
					Rasio ASN Provinsi Banten yang lulus uji kompetensi/sertifikasi (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		100,00			BPSDM
					Capaian kesesuaian mutu penyelenggaraan diklat (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			BPSDM
30	06	17	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional					0.00		0.00		2,486,874,000		3,523,245,000.0		3,523,245,000.0		9,533,364,000.0	BPSDM	
					Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		100,00			BPSDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
300	068	1	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan				0.00		0.00		14,035,374,000		19,884,425,000.0		19,884,425,000.0		53,804,224,000.0	BPSDM	
				Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		100,00		BPSDM	
300	077		Penelitian dan Pengembangan				6,020,531,200		7,306,303,000		4,142,810,000		7,598,560,000.0		7,598,560,000.0		32,666,764,200.0		
300	075	1	Program Penelitian dan Pengembangan				6,020,531,200		7,306,303,000		4,142,810,000		7,598,560,000.0		7,598,560,000.0		32,666,764,200.0	Bappeda	
				Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	30,00	50,00		60,00		75,00		80,00		80,00		80,00		Bappeda	
				Meningkatnya inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	30,00	50,00		60,00		75,00		80,00		100,00		100,00		Bappeda	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja dari Perangkat Daerah.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terlihat pada Tabel 8.1

Tabel 8.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	URAIAN INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN 2016	TARGET RPJMD							
				2017		2018		2019	2020	2021	2022
				T	R	T	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LPE	Persen	5.26	5.70	5.71	6.00	5.81	6.20	5.80	5.95	6.10
2	Inflasi	Persen	2.94	4.00	3.98	3.7	3.42	4.20	3.70	3.70	3.70
3	Pengangguran	Persen	8.92	8.69	9.28	8.45	8.52	8.20	8.19	8.03	7.84
4	Kemiskinan	Persen	5.42	5.25	5.59	5.13	5.25	5.00	5.12	5.06	5.00
5	IPM	Poin	70.96	71.35	71.42	71.77	71.95	72.20	72.75	73.21	73.68
6	Index Gini	Poin	0.39	0.400	0.390	0.390	0.367	0.390	0.370	0.365	0.360

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda 2017 (T = Target, R = Realisasi)

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pencapaian target pada indikator makro pembangunan tersebut diperlukan angka proyeksi yang diharapkan dapat dicapai oleh Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 8.2
Capaian dan Target IPM Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2022

DAERAH	CAPAIAN	TARGET IPM					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Prov. Banten	70.96	71.35	71.77	72.20	72.64	73.11	73.59
1. Pandeglang	63.40	64.09	64.79	65.51	66.29	67.10	68.03
2. Kab. Lebak	62.78	63.54	64.33	65.15	66.01	66.92	67.85
3. Kab. Tangerang	70.44	70.83	71.03	71.54	72.11	72.77	73.25
4. Kab. Serang	65.12	65.63	66.15	66.65	67.20	67.78	68.22
5. Kota Tangerang	76.81	77.35	77.72	78.11	78.67	78.98	79.55
6. Kota Cilegon	72.04	72.27	72.64	73.05	73.45	74.10	74.79
7. Kota Serang	71.09	71.77	72.17	72.88	73.47	73.97	74.55
8. Kota Tangerang Selatan	80.11	80.98	81.45	81.89	82.35	83.21	83.99

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda 2017

Tabel 8.3
Capaian dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022

DAERAH	CAPAIAN	TARGET LPE					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Prov. Banten	5.26	5.70	6.00	6.20	6.40	6.70	7.00
1. Pandeglang	5.49	5.50	5.60	5.70	6.00	6.10	6.30
2. Kab. Lebak	5.70	5.50	5.60	5.70	6.00	6.10	6.30
3. Kab. Tangerang	5.32	5.50	5.80	6.00	6.20	6.50	6.80
4. Kab. Serang	5.00	6.38	6.50	6.60	6.70	6.85	7.00
5. Kota Tangerang	5.30	5.88	6.10	6.20	6.35	6.48	6.70
6. Kota Cilegon	5.05	5.25	5.50	6.00	6.20	6.35	6.50
7. Kota Serang	6.22	7.70	7.80	7.90	8.00	8.10	8.20
8. Kota Tangerang Selatan	6.98	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda 2017

Tabel 8.4
Capaian dan Target Kemiskinan
Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022

DAERAH	CAPAIAN	TARGET KEMISKINAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Prov. Banten	5.42	5.25	5.13	5.00	4.87	4.74	4.60
1. Pandeglang	9.67	9.52	9.45	9.36	9.26	9.16	9.04
2. Kab. Lebak	8.71	8.55	8.46	8.36	8.25	8.14	8.01
3. Kab. Tangerang	5.29	5.07	4.90	4.73	4.56	4.39	4.22
4. Kab. Serang	4.58	4.50	4.46	4.40	4.35	4.30	4.23
5. Kota Tangerang	4.94	4.78	4.66	4.53	4.41	4.28	4.15

DAERAH	CAPAIAN	TARGET KEMISKINAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Kota Cilegon	3.57	3.47	3.41	3.34	3.27	3.20	3.12
7. Kota Serang	5.58	5.42	5.31	5.19	5.07	4.94	4.81
8. Kota Tangerang Selatan	1.67	1.60	1.54	1.49	1.43	1.38	1.32

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda 2017

Tabel 8.5
Capaian dan Target Pengangguran
Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022

DAERAH	CAPAIAN	TARGET PENGANGGURAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Prov. Banten	8.92	8.69	8.45	8.20	7.95	7.68	7.40
1. Pandeglang	9.55	9.45	9.34	9.22	9.08	8.92	8.73
2. Kab. Lebak	10.04	9.91	9.77	9.61	9.44	9.24	9.03
3. Kab. Tangerang	8.42	8.11	7.81	7.50	7.20	6.88	6.57
4. Kab. Serang	13.83	13.66	13.47	13.26	13.04	12.78	12.50
5. Kota Tangerang	7.48	7.27	7.06	6.84	6.62	6.39	6.15
6. Kota Cilegon	11.22	10.98	10.73	10.46	10.20	9.90	9.60
7. Kota Serang	8.87	8.66	8.44	8.21	7.99	7.74	7.48
8. Kota Tangerang Selatan	5.73	5.52	5.30	5.09	4.88	4.66	4.44

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda 2017

Indikator kinerja RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 menyajikan penetapan indikator kinerja daerah dan indikator kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek Pelayanan Umum

Merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan,

pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Aspek Daya Saing Daerah

Merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, indeks daya beli, dan jumlah kunjungan wisatawan.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 8.6 berikut :

Tabel 8.6
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Banten 2017 – 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
2	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	BB	BB	A
3	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	CC	B	BB	BB	A
4	Capaian kinerja infrastruktur daerah	100	100	100	100	100
5	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	60	70	80	85	90
6	Indeks Pembangunan Manusia	71.77	72.2	72.75	73.21	73.68
7	Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	0.39	0.39	0.370	0.365	0.360
8	Kemiskinan	5.13	5,00	5.12	5.06	5.00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	8.45	8.20	8.19	8.03	7.84
10	Harapan Lama Sekolah	13	13.5	14	14.5	15
11	Rata Rata Lama Sekolah	8.47	8.7	8.9	9.1	9.3
12	Daya Beli	0	100	100	100	100
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100	100	100	100	100
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.67	91.95	92.23	92.51	92.79
15	Angka Harapan Hidup	69.76	70.06	70.36	70.66	70.96
16	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	304	300	290	290	285
17	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	31	30	29	28	26
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,00	6.20	5.80	5.95	6.10
19	Tingkat Inflasi	3.7	4.2	3.70	3.70	3.70
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	0	0	6	6.2	6.4
21	Indeks Keuangan Inklusif	0	0	2.8	2.9	3
22	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	0	0	7	6	5
23	Emisi Rumah Kaca	0	0	100	100	100

Tabel 8.7
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Banten 2017 – 2022 (Sebelum Perubahan)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1106	Sosial							
1	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan: %)	8.24	4.49	3.89	-	-	-	-
2	Index Gini (Satuan: %)	0.39	0.39	0.39	-	-	-	-
2007	Perindustrian							
1	LPE Sektor Perindustrian (Satuan: %)	3.05	3.7	3.95	-	-	-	-
2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1101	Pendidikan							
1	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	8.37	8.47	8.7	-	-	-	-
2	Harapan lama sekolah (Satuan: Tahun)	12.7	13	13.5	-	-	-	-
1102	Kesehatan							
1	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (Satuan: %)	75	90	100	-	-	-	-
2	Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH)	32	31	30	-	-	-	-
3	Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH)	308	304	300	-	-	-	-
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1102	Kesehatan							
1	Angka Harapan Hidup (Satuan: Tahun)	69.46	69.76	70.06	-	-	-	-
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	15.51	20.89	26.27	-	-	-	-
2	Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: %)	78.98	87.43	89	-	-	-	-
3	Pemenuhan tingkat layanan irigasi (Satuan: hektar)	15,118.50	15,332.98	16,721.78	-	-	-	-
1104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik (Satuan: %)	30	40	50	-	-	-	-
2	Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82.86	84.02	85.18	-	-	-	-
3	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Hektar)	375.29	114.6	203.2	-	-	-	-
4	cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: %)	0	0	20	-	-	-	-
1105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70	75	75	-	-	-	-
2	Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai)	133	133	125	-	-	-	-
3	Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %)	68.46	70	74	-	-	-	-
4	Angka Kriminalitas (Satuan: jumlah)	5,002.00	4,800.00	4,500.00	-	-	-	-
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1201	Ketenaga Kerjaan							
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Satuan: Nilai)	58.06	59.06	60.06	-	-	-	-
1202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Indeks pembangunan gender (IPD) (Satuan: Nilai)	91.39	91.67	91.95	-	-	-	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Satuan: Nilai)	68.74	69.54	70.34	-	-	-	-
1203	Pangan							
1	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %)	82.4	89.2	90.6	-	-	-	-
1205	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan: %)	43.67	44.17	44.67	-	-	-	-
1206	Administrasi Kependudukan dan Capil							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (Satuan: %)	50	80	80	-	-	-	-
1207	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Persentase Desa Mandiri (Satuan: %)	14	16.4	18.8	-	-	-	-
1208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: Nilai)	2.01	1.96	1.91	-	-	-	-
1209	Perhubungan							
1	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (Satuan:%)	0	10	20	-	-	-	-
2	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan: %)	0	10	20	-	-	-	-
1210	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)	20	42.1	61.83	-	-	-	-
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: %)	88.08	88.08	89	-	-	-	-
1211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil (Satuan: %)	0	1	1	-	-	-	-
2	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi (Satuan: %)	0	6	6	-	-	-	-
1212	Penanaman Modal							
1	Jumlah Nilai Investasi (Satuan: triliyun)	52.3	56.4	60.8	-	-	-	-
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor (Satuan: %)	82.16	83.62	85.22	-	-	-	-
1213	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan (Satuan: Nilai)	0	10	20	-	-	-	-
2	Indeks Pembangunan Olahraga (Satuan: Nilai)	0	10	20	-	-	-	-
1216	Kebudayaan							
1	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (Satuan: %)	0	100	100	-	-	-	-
1217	Perpustakaan							
1	Persentase peningkatan minat baca masyarakat (Satuan: %)	25.1	30	35	-	-	-	-

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1218	Kearsipan							
1	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan (Satuan: %)	70	80	85	-	-	-	-
3	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2001	Kelautan dan Perikanan							
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan: %)	4.48	4.55	4.67	-	-	-	-
2002	Pariwisata							
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Satuan: %)	2.84	2.89	2.94	-	-	-	-
2003	Pertanian							
1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD (Satuan: %)	7.05	5.3	5.6	-	-	-	-
2004	Kehutanan							
1	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan: %)	30.6	31.21	31.71	-	-	-	-
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral							
1	Rasio elektrifikasi (Satuan: %)	95.2	97	98	-	-	-	-
2	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (Satuan: %)	12	12.5	13	-	-	-	-
2006	Perdagangan							
1	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan: %)	4.19	4	4	-	-	-	-
2	LPE Sektor Perdagangan (Satuan: %)	3.82	4.9	5.4	-	-	-	-
4	Fokus Administrasi Pemerintahan							
3001	Administrasi Pemerintahan							
1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)	60	70	75	-	-	-	-
2	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD (Satuan: %)	100	100	100	-	-	-	-
3	Capaian Pelayanan Publik (Satuan: %)	100	100	100	-	-	-	-
3002	Pengawasan							
1	Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)	2	2	3	-	-	-	-

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		-9
3003	Perencanaan								
1	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: Peringkat)	60	65	70	-	-	-		-
3004	Keuangan								
1	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Satuan: Opini)	100	100	100	-	-	-		-
2	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %)	62.89	59.3	60.62	-	-	-		-
3005	Kepegawaian								
1	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (Satuan: %)	10	10	15	-	-	-		-
3006	Pendidikan dan Pelatihan								
1	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan: Nilai)	10	10	15	-	-	-		-
3007	Penelitian dan Pengembangan								
1	Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %)	50	100	100	-	-	-		-
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang (Satuan: %)	80	82.5	85	-	-	-		-

Tabel 8.8
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Banten 2017 – 2022 (Setelah Perubahan)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1101	Pendidikan								
1	Harapan lama sekolah	Tahun	12,70	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,00
1	Rata rata lama sekolah	Tahun	8,37	8,47	8,70	8,90	9,10	9,30	9,30
1102	Kesehatan								
1	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	308,00	304,00	300,00	290,00	290,00	285,00	285,00
1	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00	26,00	26,00
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1106	Sosial								
1	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	8,24	4,49	3,89	3,30	2,68	2,08	2,08
1201	Ketenaga Kerjaan								
1	Daya beli	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58,06	59,01	60,01	5,69	5,72	5,74	5,74
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1101	Pendidikan								
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71,13	72,90	74,67	76,45	78,22	80,00	80,00
2	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57,21	58,77	60,33	61,88	63,44	65,00	65,00
2	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1102	Kesehatan								
2	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	247,00	247,00	242,00	237,00	232,00	227,00	227,00
2	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jumlah	1.149,00	1.149,00	1.144,00	1.139,00	1.134,00	1.129,00	1.129,00
2	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	0,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2	BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	0,00	60,00	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	15,51	0,00	0,00	32,65	37,09	42,42	42,42

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74,45	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83,00	0,00	0,00	93,50	95,90	100,00	100,00
2	Luas layanan irigasi	Ha	15.118,50	0,00	0,00	18.110,58	19.387,46	20.888,19	20.888,19
2	Persentase penyediaan prasarana air baku	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
2	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375,29	114,60	203,20	274,60	333,30	375,29	375,29
2	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	0,00	0,00	0,00	75,00	88,00	100,00	100,00
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	82,86	84,02	85,18	86,34	87,50	88,66	88,66
2	cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
1105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
2	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	68,46	70,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
2	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133,00	133,00	125,00	120,00	115,00	110,00	110,00
2	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00
2	Penanganan konflik masyarakat	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1201	Ketenaga Kerjaan								
2	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	0,00	0,00	0,00	43,75	45,00	46,29	46,29
1202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,74	69,54	70,34	71,14	71,94	72,74	72,74
2	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	0,00	0,00	0,00	72,73	77,27	100,00	100,00
2	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91,39	91,67	91,95	92,23	92,51	92,79	92,79
1203	Pangan								
2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82,40	89,20	90,60	83,50	84,50	85,00	85,00
1205	Lingkungan Hidup								
2	Emisi Rumah Kaca	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43,67	44,17	44,67	50,87	51,83	52,79	52,79
1206	Administrasi Kependudukan dan Capil								
2	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1207	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	%	0,00	0,00	0,00	41,67	33,33	25,00	25,00
1208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,40	0,00	0,00	2,21	2,23	2,26	2,26
1209	Perhubungan								
2	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	90,00
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1210	Komunikasi dan Informatika								
2	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	0,00	2,60	3,00	3,60	3,90	4,00	4,00
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88,08	89,00	89,55	90,00	90,00	90,00
1211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	0,00	0,00	0,00	2,80	2,90	3,00	3,00
2	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	18,00
2	Persentase Peningkatan Omset Usaha Keci	%	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
1212	Penanaman Modal								
2	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	5,00	5,00
2	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	trilyun	0,00	0,00	0,00	49,00	51,30	53,90	53,90
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82,16	85,09	85,22	85,47	85,72	85,97	85,97
1213	Kepemudaan dan Olahraga								
2	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	45,00
2	Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	45,00
1214	Statistik								
2	Maturitas Data Base Statistik Sektoral	Nilai	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Maturitas SIPD	%	0,00	0,00	0,00	70,00	75,00	80,00	80,00
1215	Persandian								
2	Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1216	Kebudayaan								
2	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1217	Perpustakaan								
2	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	25,10	0,00	0,00	40,00	45,00	50,00	50,00
1218	Kearsipan								
2	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
2001	Kelautan dan Perikanan								
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,48	0,00	0,00	4,72	4,80	4,93	4,93
2002	Pariwisata								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	2,84	0,00	0,00	2,99	3,04	3,09	3,09
2003	Pertanian								
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	0,00	0,00	6,00	6,20	6,40	6,40	6,40
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	7,05	0,00	0,00	5,80	6,00	6,20	6,20
2004	Kehutanan								
2	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30,60	31,21	31,71	32,21	32,71	33,21	33,21
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral								
2	Rasio elektrifikasi	%	95,20	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0,00	0,00	0,00	0,65	0,63	0,60	0,60
2006	Perdagangan								
2	LPE Sektor Perdagangan	%	3,82	4,90	5,40	5,90	6,40	6,90	6,90
2	Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2007	Perindustrian								
2	LPE Sektor Perindustrian	%	3,05	3,70	3,95	4,20	4,45	4,70	4,70
2	Fokus Administrasi Pemerintahan								
3001	Administrasi Pemerintahan								
2	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Capaian Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	0,00	14,29	28,57	57,14	76,19	100,00	100,00
2	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
2	Persentase Manajemen Reformasi birokrasi	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
2	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3002	Pengawasan								
2	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
2	Capaian Kapabilitas APIP	Level	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00
3003	Perencanaan								
2	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00
2	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	55,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
3004	Keuangan								
2	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	62,89	59,30	60,62	61,91	63,19	64,44	64,44
3005	Kepegawaian								
2	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
3006	Pendidikan dan Pelatihan								
2	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
3007	Penelitian dan Pengembangan								
2	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
3	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80,00	0,00	0,00	87,50	90,00	92,50	92,50